

DR. M. NASIR BUDIMAN, MA
ALWAHIDI ILYAS, S.AG

KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Suatu Tinjauan Normatif

KATA PENGANTAR

PROF. DR. H. M. YASIR NASUTION



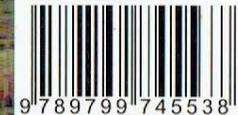
Nadiya Foundation

Nabi Muhammad menjelaskan Bahwa (kepemimpinan) adalah suatu amanah, dan ia di hari kiamat akan menjadi kerugian dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan cara yang haq, serta menunaikan kewajiban yang terpikul di atas pundaknya." (HR Muslim).

Kepemimpinan Islam adalah amanah ke-Tuhanan (*divine trust*) yang merangkumi urusan duniawi-ukhrawi dengan dwiperan utama yaitu memelihara agama dan mengurus dunia. Model kepemimpinan ini berbeda dengan konsep kepemimpinan Barat sekular yang hanya menjurus kepada urusan duniawi-manusiawi.

Kepemimpinan Islam tidak bisa dilepaskan dari aspek ideologis. Artinya, seseorang yang secara ideologis menolak Islam dan syari'atnya, maka ia termasuk jahil. Ketika memimpin, maka ia menjadi pemimpin yang jahil. Ketika penolakan itu dilakukan oleh suatu masyarakat, maka masyarakat itu disebut jahiliyah. Masyarakat Quraisy disebut jahiliyah bukan karena kebodohan (intelektual)-nya, tapi justeru karena mereka menolak syari'at yang dibawa Nabi Muhammad. Dalam Islam, aturan, hukum, dan undang-undang yang tidak mengacu pada Islam adalah jahiliyah. Karena semua produk hukum yang meninggalkan syari'at disebut jahiliyah, maka selayaknya jika ditinggalkan. Para pemimpinnya dijauhi agar menjadi jelas yang haq adalah haq, sedangkan yang bathil adalah bathil.

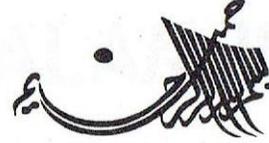
ISBN 979-97455-3-5



9 789799 745538

KEPEMIMPINAN

DALAM ISLAM



(Buku Tuntutan No. 101)

Dr. M. H. H. Suhaimi, MA
AL-KHAYR RIYAS, S. J. O.

Radiya Foundation
Jember, Indonesia 60132

KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

(Suatu Tinjauan Normatif)

**DR. M.NASIR BUDIMAN,MA
ALWAHIDI ILYAS, S.AG**



**Nadiya Foundation
Lhokseumawe 2003**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Budiman, M. Nasir
Kepemimpinan Dalam Islam (suatu Tinjauan ormatif)/
M. Nasir Budiman & Alwahidi Ilyas
Cetakan I, Lhokseumawe, Nadiya Foundation
xxi + 135 halaman, 21 cm
Indeks
ISBN 979-97455-3-5

- I. Islam – Kepemimpinan
- II. Ilyas, Alwahidi

I. Judul

KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM (SUATU TINJAUAN NORMATIF)

Penulis :
M. Nasir Budiman & Alwahidi Ilyas

Kata Pengantar :
Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution

Penerbit :
Nadiya Foundation
Po. Box 70 Batuphat - Lhokseumawe 24353
Nangro Aceh Darussalam. Telp. 0645 - 651216
e-mail : nadiyafoundation@yahoo.com

Design Cover :
Tim Kreatif Nadiya Foundation

Dicetak Oleh :
Perc. Rama Jaya
Jln. Perdana No. P3 Medan.
Telp. (061) 4519218 HP. 081.265.16306

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang Memerbanyak dalam bentuk dan dengan acara
apapun, termasuk foto kopi, tanpa izin tertulis dari
Penerbit/Pengarang

PENGANTAR PENERBIT

KEPEMIMPINAN: KAPTEN KAPAL YANG VISIONER

Dapat dibayangkan jika di tengah-tengah masyarakat tidak ada pemimpin yang *capable*, atau jika sebuah organisasi usaha tanpa pemimpin yang memiliki kemampuan memadai. Dalam sekejap masyarakat akan kacau balau, dan sebuah perusahaan bisa bangkrut total. Para pemimpin adalah orang yang membaca tanda-tanda perubahan realitas, dan kemampuan ini dituntut oleh kondisi masyarakat atau lembaga bisnis yang sedang berkembang.

Seorang pemimpin bagaikan kapten kapal yang akan menjalankan sebuah ekspedisi dengan suatu tujuan, yang bertanggungjawab penuh terhadap kapal dan segala yang ada dalam kapal, juga segenap para penumpang. Namun mengidentikkan seorang pemimpin dengan kapten kapal, juga tidak begitu tepat, karena kapten kapal biasanya hanya menangani masalah-masalah teknis pelayaran kapal. Sedangkan seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat harus memiliki visi dan strategi masyarakat, bangsa dan mungkin negara.

Dalam dunia usaha, bila seorang pemimpin organisasi tidak dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang berubah cepat, ia akan mudah terjebak dalam kompleksitas persoalan yang ditanganinya. Untuk menjadi pemimpin, jelas tidak cukup hanya bermodal kecakapan. Oleh karena itu, naluri kepemimpinan dalam sebuah kebudayaan harus dibangun, bukan hanya melalui pendidikan formal tetapi juga pendidikan non-formal.

Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*) dan memiliki jiwa untuk mengajak orang yang dipimpin menuju kebersamaan (*team work*), sehingga seorang pemimpin tidak selalu bermukim di puncak menara gading. Menurut konsep yang sebenarnya, seorang pemimpin juga harus bersedia menjadi seorang yang dapat melayani (*service*). Andai seorang pemimpin tidak memiliki karakter ini dan hanya sebagai pengontrol dari ruang kantor, pola kepemimpinan ini akan mudah terjebak dalam sistem manajemen tirani seperti Musolini, Hitler dan diktator lainnya yang pernah muncul dalam sejarah.

Mereka adalah manusia-manusia pintar, berkuasa dan sekaligus tidak bersedia untuk melayani (*service*), bahkan mereka selalu memaksa orang lain melayaninya dan mengikuti kehendaknya tanpa *reserve*.

Kepemimpinan sesungguhnya bukan hal yang *given* pada setiap pribadi manusia, tetapi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin harus dikembangkan. Sampai sekarang ini sesungguhnya belum ada sekolah menjadi seorang pemimpin yang tangguh, walaupun dalam kenyataan ada beberapa lembaga perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan tertentu yang mengklaim dirinya

tempat melahirkan para pemimpin nasional, atau lembaga melahirkan manajer profesional (CEO), seperti program pendidikan manajemen untuk memperoleh gelar MBA, sehingga suatu fenomena yang unik di Indonesia orang rame-rame mengikuti kursus manajemen yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu, dalam waktu singkat segera diwisuda dan diberikan gelar MBA.

Kelemahan dalam membaca fenomena ini, membuat orang sering terjebak dalam idealisasi-idealisisi bentuk, bahwa pemimpin harus dilatih dalam kursus singkat seperti kursus untuk menduduki posisi tertentu sebagai pejabat negara atau pimpinan lembaga strategis lainnya. Namun ketika kelak siswa yang dilatih tersebut dan diresmikan sebagai pemegang kekuasaan, bahkan langsung minta dilayani sebagai raja. Senada dengan itu, apa yang dinyatakan oleh Robert K. Greenleaf, dosen dari Harvard Business School, Amerika Serikat dalam karyanya *The Servant as Leader* (1970), mengatakan "... *the great leader is seen as servant first, and that simple fact is the key to his greatness*".

Dalam sejarah agama, kitab suci Al-Qur'an menyebutkan banyak pemimpin yang dilahirkan ke dunia dan membebaskan masyarakat dari kondisi kezaliman dan kehancuran. Sehingga orang melihat kelahiran pemimpin itu ketika krisis, dan pada saat krisis kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya masyarakat melahirkan seorang pemimpin. Krisis dalam sejarah telah melahirkan Nabi Daud. a.s, dan kemudian ketika krisis melanda masyarakat beberapa tahun kemudian sejarah kembali melahirkan pimpinan besar yakni Musa. a.s. Penyimpangan

yang terjadi kemudian setelah Nabi Musa wafat, dunia waktu itu dilanda krisis yang paling dahsyat dan Nabi Isa. a.s kembali menegaskan kebenaran, sampai krisis selanjutnya Nabi Muhammad. SAW sebagai nabi terakhir yang meluruskan ketimpangan dan penyelewengan sejarah.

Bila kita kritis melihat dari sejarah masa lalu, sosok kesemua Nabi yang diutus Tuhan adalah para pemimpin dan sekaligus para pelayan masyarakat untuk membawa ke arah kebaikan. Teladan yang telah diabadikan Allah SWT dalam Al Qur'an pada diri Rasulullah Muhammad SAW, terus dilanjutkan oleh para sahabat yang terdekat dan penerusnya hingga akhir zaman, yang memang istiqamah mewariskan keteladannya. Format prinsip kepemimpinannya yang tercakup dalam sifat FAST (*fatanah, amanah, siddiq dan tabligh*) sungguh sangat langka kita temui dewasa ini, untuk dapat secara paripurna pada diri seorang pemimpin.

Mereka tidak berusaha mengejar jabatan kepemimpinan dan kemudian belajar melayani, melainkan mereka lebih dahulu melayani baru kemudian diterima dan diakui sebagai pemimpin dan pelayan. Makna pelayan sesungguhnya bukan sekedar sebagai "pembantu" bersedia menjadi tukang sapu atau pembersih lantai. *Service* dalam pengertian manajemen adalah bentuk "concern" yakni kesediaan mereka dan memperhatikan pada hal yang bersifat kemaslahatan bersama atau dalam bahasa agama disebut sebagai kepentingan umat.

Buku karya Dr. Nasir Budiman, MA dan Al Wahidi Ilyas, S.Ag, yang ada pada anda ini menarik dibaca untuk

memahami hakikat kepemimpinan dalam pengertian normatif. Karena *urgen-nya* masalah ini, maka Nadiya Foundation melihat ada yang penting dalam buku ini sehingga diterbitkan menjadi bacaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. *Selamat Membaca.*

Lhokseumawe, 31 Desember 2003

IRWANDAR - M.NATSIR MAHMUD NUR

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution
(Rektor IAIN Sumatera Utara)

*M*asalah kepemimpinan merupakan masalah yang urgen bagi suatu masyarakat atau negara. Karena keberhasilan suatu masyarakat atau negara dalam mencapai tujuannya, sangat ditentukan oleh tipe maupun corak kepemimpinannya. Oleh sebab itu, dalam Islam masalah kepemimpinan dianggap sebagai bagian yang amat fundamental. Bahkan kepribadian Rasulullah sendiri adalah mata air yang tidak pernah kering yang dapat dijadikan sebagai penghilang rasa haus, termasuk dalam masalah kepemimpinan, yang dalam tradisi kesejarahan Islam Rasulullah terbukti sebagai sosok yang piawai dalam masalah kepemimpinan. Dalam konteks inilah al-Qur'ân menganjurkan agar umat Islam senantiasa menjadikan kepribadian Muhammad sebagai sumber rujukan utama dalam mencari solusi berbagai permasalahan umat, sebagaimana firman Allah surah Al-Ahzab/33:21 yang artinya :

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (Q.S. Al-Ahzab: 21).

Selain itu, al-Qur'ân juga banyak menyinggung tentang masalah-masalah kepemimpinan, di antaranya sebagaimana tertera dalam surah Ali Imran ayat 26, 28:

Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S. Ali Imran: 26).

Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu) (Q.S. Ali Imran: 28).

Dalam sebuah hadis nabi juga dikatakan bahwa "Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin"

Para pemikir politik Islam masa klasik hingga masa kontemporer juga telah menjadikan masalah kepemimpinan sebagai salah satu *mainstream* pemikirannya. Misalnya syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, bagaimana seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya, bagaimana pendistribusian kewenangan dilimpahkan, bagaimana kepemimpinan dipertanggung jawabkan dan lain sebagainya.

Ketika konsep kepemimpinan dihubungkan dengan Islam, kita berhadapan dengan dua dimensi yang tidak dapat dipungkiri. *Pertama*, dimensi idealitas berupa ketentuan-ketentuan normatif yang berasal dari sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'ân al-Karim dan Hadits Rasulullah Muhammad Saw. *Kedua*, dimensi realitas berupa praktek atau pengamalan yang dilakukan oleh umat Islam dalam kehidupan konkret seperti tampak berkembang dalam sejarah. Jalan berfikir sederhana menyimpulkan bahwa hubungan antara keduanya adalah hubungan garis tegak lurus.

Ketentuan normatif dianggap sepenuhnya menjadi dasar bagi praktek kepemimpinan umat tanpa pengaruh sedikitpun dari warisan pengalaman lokal atau pengalaman-pengalaman lainnya. Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa dimensi realitas kepemimpinan umat mengambil bentuk-bentuk melalui proses "dialektika" antara ketentuan normatif dan kenyataan yang dihadapi di lapangan kehidupan. Bahkan teori-teori kepemimpinan yang memuat ketentuan-ketentuan normatif itu pun dalam perkembangannya juga turut dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang secara *real* dihadapi umat Islam. Itulah sebabnya muncul sejumlah teori dan model kepemimpinan dalam Islam.

Keterbukaan Islam dalam sejarah untuk menerima pengaruh positif dari warisan peradaban lokal dan peradaban lainnya, membuatnya mampu memimpin peradaban abad pertengahan. Itu bukan berarti Islam tidak mempunyai ketentuan normatif instrinsik tentang kepemimpinan. Justeru sebaliknya, Islam mempunyai

ketentuan normatif instrinsik yang bersifat *transcendent* terhadap ruang dan waktu.

Buku yang ditulis oleh saudara M. Nasir Budiman dan Alwahidi Ilyas ini berupaya mengelaborasi masalah kepemimpinan di dalam Islam. Penulisnya berupaya mendeskripsikan tipe-tipe kepemimpinan yang dimulai dari tipe-tipe pemimpin yang umum yang ada di dalam sejarah umat manusia, terutama yang ada di Barat. Kemudian pada bagian akhir, penulisnya berupaya menelaah tipe-tipe kepemimpinan di dalam Islam yang ditarik dari praktek kepemimpinan Nabi dan *al-Khulafa Al-Rasyidin* di Madinah sebagai prototype praktek politik yang ideal yang masih relevan dijadikan sebagai rujukan bagi umat Islam dalam menyelesaikan krisis kepemimpinan.

Buku ini sangat penting karena memberi informasi yang cukup luas tentang aturan normatif kepemimpinan dalam Islam dan mengemukakan perbedaannya dengan kepemimpinan versi Barat, yang dengan itu dapat memperluas horizon pemikiran pembaca tentang kepemimpinan. Oleh sebab itu buku ini sangat bermanfaat bagi para pencinta dan peminat masalah-masalah kepemimpinan. Selain itu, buku ini layak dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam masalah kepemimpinan. Penulisnya berupaya mengartikulasikan konsep kepemimpinan secara dinamis dan segar. Bahwa kepemimpinan dalam Islam harus bersandar pada tiga hal: akseptabilitas, akuntabilitas, dan kredibilitas. []

Medan, 31 Desember 2003

PENGANTAR PENULIS

*S*yukur alhamdulillah buku yang berjudul "*Kepemimpinan dalam Islam (Suatu Tinjauan Normatif)*" telah hadir di hadapan pembaca, semoga dapat menjadi landasan berfikir selanjutnya dalam pengembangan ilmiah di kalangan civitas akademika. Buku ini berangkat dari postulat pada hadith Nabi Muhammad bahwa setiap individu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung-jawaban atas kepemimpinannya. Karena itu, tanggung jawab tidak bisa lepas atas setiap individu, setidaknya-tidaknya tanggung jawab sosial, bahkan terlebih lagi bagi individu yang menyanggah profesi sebagai manajer di suatu lembaga, atau instansi pemerintahan dan swasta.

Kepemimpinan yang dikaji dalam buku ini, tidak hanya difokuskan pada konseptualisasi kepemimpinan dalam Islam yang aktual dalam kehidupan sekarang ini, tetapi juga meninjau kembali pola kepemimpinan para pendahulu muslim yang telah sukses dalam mengembangkan peradaban Islam, bahkan pola kepemimpinan Barat juga disinggung untuk mempertajam analisis kepemimpinan dalam Islam.

Kepemimpinan sering dikonotasikan dengan kekuasaan, seorang pemimpin adalah penguasa dalam suatu lembaga atau institusi, karena itu kekuasaan dalam kepemimpinan Islam dapat saja diakui, namun kekuasaan bukan sasaran akhir bagi seorang pemimpin, Islam menghargai dan menerima kekuasaan sebagai salah satu hal

penting bagi seorang pemimpin, melainkan kekuasaan tersebut menjadi penting diikuti dengan pengabdian kepada masyarakat atau komunitas, baik secara internal (sesama kaum muslimin) maupun secara eksternal (kafir zimni atau non-muslim yang mampu menciptakan kedamaian bersama ummat Islam).

Islam telah membangun fondasi kepemimpinan atas asas *amanah*, *keadilan*, *disiplin*, dan *musyawarah*. Maka pola kepemimpinan otoriter dan kebebasan bukan saja tidak sesuai dalam Islam, melainkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia sebagai makhluk berfikir, berkreasi dan bertanggung jawab dalam hidup dan kehidupan. Karena pemimpin merupakan khalifah Allah di muka bumi, yang harus mengemban misi Tuhan di dunia ini, yaitu membangun dan memakmurkan bumi sembari beribadah kepada-Nya.

Dengan demikian seorang pemimpin dituntut mempunyai sifat-sifat berikut ini. a. Dapat memberikan keputusan yang benar dengan cepat. b. Memiliki kepribadian yang berani. c. Berkemauan kuat dan tetap. d. Mengemban tanggung jawab tanpa ragu-ragu. e. Kejiwaan yang stabil, baik dalam keadaan menang maupun dalam keadaan kalah. f. Berpandangan jauh kedepan. g. Memahami kondisi kejiwaan bawahannya. h. Saling percaya. i. Kecintaan secara timbal balik. Sifat-sifat kepemimpinan ini dikaji di bab IV buku ini dengan tujuan dapat dijadikan sebagai paternalistik terhadap sifat-sifat tersebut, karena sifat tersebut sesuai dengan sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad saw.

Kepada penerbit Nadiya Foundation yang telah bersedia menerbitkan buku ini, semoga bermanfaat dalam

rangka memperluas informasi dan ilmu pengetahuan ummat kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya, penulis buku ini menerima segala bentuk kritik yang mengacu kearah perbaikan selanjutnya, dan atas kesediaan pembaca menyampaikan saran dan kritikan tersebut, terlebih dahulu penulis mengucapkan terimakasih, dan semoga Allah memberi taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Banda Aceh, Agustus 2003

Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	v
Kata Pengantar	i
Pengantar Penulis	
Daftar Isi	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
Landasan Pijakan	1
Fenomena Historis Kepemimpinan	4
BAB II	
DESKRIPSI UMUM KEPEMIMPINAN	10
Pengertian Kepemimpinan	10
Otoritas Kekuasaan Pemimpin Dalam Perspektif Mayoritas	13
Teori Sumber Kekuasaan	15
Tipe-Tipe Pemimpin Mayoritas	22
Perbedaan Umum Konsep Kepemimpinan Barat Dengan Islam	28
BAB III	
DESKRIPSI KEPEMIMPINAN ISLAM	32
Manusia: Antara Pemimpinan dan Yang Dipimpin	32
Pengertian Kepemimpinan Islam	35

Fungsi dan Kedudukan Pemimpinan Dalam Islam	43
Batas Ketaatan Terhadap Pemimpin Dalam Islam	46
Kepemimpinan Islam Panutan	49
Sistem Penetapan pemimpin Dalam Islam	53
Hak dan Tanggungjawab Pemimpin Menurut Islam	56
Sifat Pemimpin Dalam Islam	63

BAB IV**KEPEMIMPINAN DAN PEMERINTAHAN ISLAM : TINJAUAN AL-QUR'ÂN DAN HADITH.....**

71	
Kepemimpinan dan Pemerintahan Dalam Islam	71
Asas Pemerintahan Islam	83
Hukum Imamah (Pemimpin) Dalam Islam	88
Keabsahan Imam (Khalifah) Dalam Islam	90
Pemilihan Imam Dalam Islam.....	92
Pembicaraan Al-Qur'ân Seputar Pemimpin.....	94
Kedudukan Wanita Sebagai Pemimpin.....	104
Realita Sejarah dan Wacana Pengangkatan Pemimpin Wanita : Antara Yang Pro dan Yang Kontra	113
Bagaimana Pendapat Ulama Modern Tentang Kepemimpinan Wanita: Suatu Analisis Akhir..	117

BAB V

PENUTUP	121
DAFTAR BACAAN	125
DAFTAR INDEKS	130
TENTANG PENULIS	134

BAB I

PENDAHULUAN

Landasan Pijakan

Pembahasan tentang kepemimpinan merupakan hal yang unik dalam panggung sejarah peradaban Islam, karena kepemimpinan merupakan kelanjutan dari kenabian dalam arti bahwa Islam sebagai agama yang paling akhir dan untuk semua manusia dan *transgenerasi* memerlukan figur-figur yang dapat menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Nabi. Tetapi kenyataannya tak ada seorang pemimpin pun yang mampu menggantikan nabi yang mempunyai sifat *siddiq, amanah, tabligh dan fatanah*.

Secara sosiologis, Islam merupakan agama yang *humanisme theosentis*. Maka diperlukan kepemimpinan yang *humanis theosentris* pula. Kepemimpinan seperti itu tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhannya. Dalam salah satu sabda Nabi Muhammad saw disinyalir:

كلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ ...

Hadith tersebut mengisyaratkan bahwa tanggung jawab sosial sangat berperan, di mana semua unsur dari

manusia mempunyai tanggung jawab kepemimpinannya, mulai dari jenis kelamin laki-laki sampai kepada perempuan, dan mulai dari majikan sampai kepada hamba sahaya, semuanya membutuhkan kepada tanggung jawab sosial yang satu sama lain saling melengkapi. Kepemimpinan sosial dalam kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan yang sangat urgen, sama halnya dengan kepemimpinan *teologis*, hal ini disebabkan sebagai berikut:

Pertama, alam raya dalam arti seluruh elemennya diciptakan untuk sebuah tujuan. Tujuan itu berupa kesempurnaan yang harus dicapai olehnya sendiri. Kesempurnaan setiap benda di alam raya sesuai dengan kapasitas (batas atau *mahiyah*) wujud yang ia miliki dari tingkat-tingkat wujud. Kesempurnaan tumbuh-tumbuhan lebih rendah dari kesempurnaan binatang, dan kesempurnaan binatang lebih rendah dari kesempurnaan manusia. Tumbuhan tidak akan melebihi kesempurnaan kapasitas wujud binatang. Demikian pula binatang tidak akan bisa melebihi kesempurnaan kapasitas wujud manusia. Itulah yang dimaksud dengan filosofi penciptaan alam raya.

Kedua, untuk mencapai kesempurnaan, Allah Yang Maha Adil dan Bijaksana memberikan bimbingan agar sampai kepada tujuan (kapasitas wujud mereka masing-masing), tanpa bimbingan-Nya mustahil kesempurnaan wujudnya akan tercapai. Dan ini merupakan tuntutan dari Kemahaadilan dan Kemahabijaksanaan Allah. Hal tersebut dapat difahami dari firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ بِبَلِيغِ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyampaikan (kesempurnaan) urusan-Nya (ciptaan-Nya). Sesungguhnya Dia telah menciptakan untuk segala sesuatu kadarnya (ukurannya)" (QS al-Thalaq ayat: 3).

Dengan demikian, keberadaan para pemimpin di bumi tidak terlepas dari bimbingan (*hudan*) dari Allah, Dia yang memberikan amanah berupa kekuasaan yang sangat terbatas kepada manusia untuk mengatur, memimpin bumi beserta seluruh seperangkat fasilitas yang ada di dalamnya, mandat atau kepercayaan yang diberikan itu agar bumi ini tetap teratur dan senantiasa berada di atas keseimbangan sebagaimana ciptaan. Tetapi, dalam kenyataannya banyak sekali ketimpangan dan kesalahan yang dilakukan manusia atau tidak melaksanakan mandat Allah sebagaimana mestinya.

Gary A. Yukl dalam karyanya "*Leadership in Organizations*" yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul "*Kepemimpinan dalam Organisasi*" memaparkan secara lugas, bahwa permasalahan tentang kepemimpinan sudah sejak dahulu kala masih merupakan sebuah subjek spekulasi, walau pun telah dilakukan sejumlah penelitian ilmiah, namun masih belum menemukan ciri-ciri, kemampuan, perilaku, sumber kekuasaan dari seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi pengikutnya untuk mencapai sasaran kelompok.¹

Kajian tentang pemimpin dan kepemimpinan dalam buku ini semakin penting, tatkala sorotan tajam diarahkan

¹Gary A. Yukl, *Leadership in Organizations*, terj. Kepemimpinan Dalam Organisasi, (Jakarta: Prenhallindo, 1998), h. 1.

kepada kepribadian pemimpin itu sendiri, dan sorotan itu kian terus meruncing di saat perjalanan suatu kepemimpinan nyaris tidak mampu mengakomodasikan kepentingan rakyat untuk mencapai pencerahan hidup di segenap aspek kehidupan atau ke sebuah cita-cita hidup dalam *frame* kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan.

Fenomena Historis Kepemimpinan

Ketika seorang pemimpin tidak lagi mengedepankan nurani dalam melihat kebenaran, maka seseorang itu akan berupaya sekuat tenaga “bagaimana kedudukannya sebagai pemimpin senantiasa terus bertahan (tetap eksis) tidak diombang-ambing dan digeser oleh orang lain, kendati perjalanan kepemimpinannya telah bertentangan dengan nurani orang-orang yang dipimpin”.

Hancurnya tata nilai sosial masyarakat dalam konteks keberbangsaan dan kenegaraan, justeru karena semakin melebarnya kesenjangan dan pertikaian politik di antara sesama di hampir mayoritas negara Islam dewasa ini. Kenyataan ini tampak jika ditilik pada pentas masyarakat dunia dengan situasi dan kondisi yang kian semeraut. Sejarah² telah mencatat dan dapat dijadikan sebagai

² Bukti yang sangat otentik tentang perebutan kekuasaan hingga menjadikan umat Islam terpecah belah, ini terlihat pada saat peralihan kepemimpinan Islam dari Usman ibn Affan kepada Ali bin Abi Thalib—yang selanjutnya peralihan kepemimpinan dari Ali kepada Muawwiyah bin Abi Sufyan dari Dinasty Bani Umayyah, dan yang terakhir peralihan kepemimpinan dari Dinasty bani Umayyah kepada Dinasty bani Abbasiyyah.

referensi berharga bagi perjalanan generasi ke depan, dan ini perlu diaktualisasikan dalam kancah kehidupan manusia sekarang dengan harapan, munculnya kesadaran manusia, bahwa perebutan kekuasaan untuk dapat menduduki sebuah tampuk kepemimpinan telah menjadi hal yang begitu riskan bagi keberlangsungan generasi bangsa dan Negara di masa mendatang.

Perpecahan, pertentangan dan bahkan pertumpahan darah dalam tubuh umat Islam terjadi justeru karena persoalan politik, khususnya masalah kepemimpinan. Kenyataan ini dimulai dengan peristiwa pembunuhan khalifah ketiga ‘Usman bin Affan yang selanjutnya pembunuhan terhadap para pemimpin Islam yang lain. Kenyataan semacam ini terus melebar tiada henti di kalangan umat Islam hingga muncul berbagai aliran dan golongan.³

Data historis tersebut dapat dijadikan hipotesis untuk suatu kajian dan pembicaraan tentang pemimpin yang erat kaitannya dengan perpolitikan suatu bangsa, di mana masalah keberlangsungan dan pergerakannya tidaklah dipandang remeh, apalagi dikaitkan dengan eksistensi negara. Ketiga komponen tersebut tidak sedikit pun membuka jurang pemisah antara satu dengan yang lain. Di samping itu pun, bila dikaji secara kontinuitas ketiga-tiga komponen tadi memerlukan rentang waktu yang cukup lama. Kendati demikian, penulis mencoba memberi batasan kajian yang hanya difokuskan pada permasalahan pemimpin atau penguasa negara, dan ternyata bila

³ Musdah Mulia, *Negara Islam—Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, Cetakan I, 2001), h. 1.

ditelusuri secara mendalam dalam al-Qur'ân dan Hadits, istilah negara dalam hal ini negara Islam⁴ sebagai suatu istilah yang tersendiri (khusus) tidak banyak disebutkan, yang sering disebutkan di dalam dua sumber tersebut adalah perihal pemimpin—dan pemimpin ini pun juga disebutkan bukan dalam satu istilah saja, melainkan sangat bervariasi di antaranya: *Imâm* (*Aimmah*), *ri'âyah*, *'imarah* dan kadang juga disebutkan dengan *wâliy* (*wilâyah*).

⁴ "Negara Islam" adalah suatu perkataan yang dipopularkan di awal abad ke 20 sedangkan perkataan negara Islam tidak digunakan secara meluas sebelum itu. Di zaman Nabi Muhammad, perkataan "negara Islam" tidak populer tetapi pengisian pemerintahan Islam di Madinah dan ciri-ciri di zaman pemerintahan Nabi memenuhi syarat-syarat pembentukan negara Islam di Madinah. Sementara yang dimaksudkan dengan negara Islam ialah negara yang meletakkan prinsip tauhid atau ketuhanan sebagai fondasi pembentukan dan pengurusan sebuah masyarakat dan negara. Kuasa mutlak (*sovereignty*) hanya pada Tuhan dan bukan pada manusia, tidak seperti fahaman sekular yang menyatakan bahwa suara mayoritas sebagai suara penentu meski pun keputusan yang dicapai atau yang dibuat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai, baik nilai agama maupun nilai sosial yang dapat meruntuhkan akhlak dan kemanusiaan itu sendiri. Dibandingkan dengan negara sekuler, negara Islam tidak memisahkan aspek agama dari aspek kehidupan. Setiap urusan kehidupan ini pasti ada hubungannya dengan Tuhan, sementara fahaman sekular dengan slogan "biarkan urusan negara ditangani oleh pemerintah, sedang urusan agama pada Tuhan." Ringkasnya, urusan politik pemerintahan negara tidak ada hubungannya dengan agama. Justeru, rakyat bebas membuat keputusan dengan tidak mengindahkan pandangan dan nilai-nilai agama.

Sebagai agama wahyu, kata Daniel Crecelius, Islam memerlukan aturan dan tata kehidupan umatnya langsung di bawah rambu-rambu Allah. Rambu-rambu itu telah ditata sedemikian rupa dalam al-Qur'ân, dan dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad, di dalam keduanya termuat sejumlah perintah dan larangan sebagai kumpulan syari'ah (hukum) agama. Maka syari'ah memberikan bimbingan kepada setiap aspek kehidupan manusia, baik untuk kehidupan kolektif maupun individu. Sama halnya dengan Daniel, Muhammad Maghfur Wachid, memandang bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang dipilih oleh Allah untuk umat manusia, kandungan isinya mengatur segala sisi kehidupan—tidak terkecuali juga pengaturan itu mengarah kepada sisi sosial kemasyarakatan dalam konteks perpolitikan kenegaraan, kepemimpinan dan segala permasalahan yang terkait dengannya.

Salim Azzam, berpendapat bahwa ketika Islam dianggap sebagai agama wahyu yang hanya berperan sebagai petunjuk dan semata-mata berlaku dalam urusan-urusan rohani, sementara untuk urusan-urusan keduniaan Islam kemudian dicampakkan dan diganti dengan suatu sistem berpikir dan sistem sosial yang sepenuhnya bersifat "*man made*" (buatan manusia) dan bertumpukan pada etik situasional, maka muslim tersebut sama halnya dengan '*almani*, yakni seorang sekularis.⁵

Pendapat Salim tersebut melahirkan berbagai wacana baru bagi kemajuan berpikir umat Islam (masih banyak

⁵ Salim Azzam, *Concept of Islamic State*, terj. Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam, pen. Malikul Awwal, dkk., (Bandung, Mizan, Cetakan II, 1990), h. 20-21.

terlihat kontradiksi pemikiran tentang penentuan ada atau tidaknya negara Islam), ternyata negara Islam sangat diharapkan oleh umat Islam sekarang semacam negara Madinah yaitu *Madinah Al-Munawwarah*, karena persyaratan suatu negara *pertama*, adanya penduduk yang tetap, *kedua*, wilayah tertentu, *ketiga*, adanya pemerintah.

Negara Madinah yang telah dipersatukan oleh Nabi Muhammad itu terpenuhi ketiga persyaratan tadi, *pertama*, masyarakat tersebut memiliki wilayah tertentu, yaitu Madinah. *Kedua*, semua golongan dalam masyarakat (Muslim dan Yahudi) mengakui dan menerima Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan pemegang otoritas politik yang sah dalam kehidupan mereka. *Ketiga*, golongan-golongan yang ada memiliki kesadaran dan keinginan untuk hidup bersama dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan bersama.⁶

Sebagai pemimpin Madinah, Nabi Muhammad telah memancang tonggak egaliter, di mana penghargaan kepada profesional lebih diutamakan daripada penghargaan yang berdasarkan keturunan, etnis dan lain-lain, maka tonggak inilah merupakan cikal bakal muncul konsep *Wasiqah Madinah* atau *Madinah Charter*, yaitu konsep kepemimpinan yang tidak sedikit pun tersirat keberpihakan dan sikap diskriminasi terhadap orang yang dipimpinnya. Setiap muslim seharusnya mampu menjadi pemimpin dan mampu pula menjadi orang yang dipimpin, dia adalah *Ra'in* sekaligus *Ra'iyah*. Maka apabila seorang muslim menjadi pemimpin seharusnya pula memperhatikan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 58 - 58:

⁶ Salim Azzam, *Concept ...* h. 190.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menyampaikan amanat kepada orang yang ahli (profesional) dan jika kamu menghukum manusia hendaklah kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". (An-Nisa': 58)

يَتَائِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (*al-Qur'ân*) dan Rasul (*Sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik (*akibatnya*)". []

BAB II

DESKRIPSI UMUM KEPEMIMPINAN

Pengertian Kepemimpinan

Pembicaraan seputar pemimpin dan kepemimpinan yang dikategorikan kedalam ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial lain, pada dasarnya, mempunyai visi, harapan dan manfaat bagi peningkatan taraf hidup manusia. Seperti halnya ilmu-ilmu lain, kepemimpinan mempunyai beberapa tujuan yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup manusia.⁷ Hal itu memberikan pengertian bahwa kepemimpinan, secara umum, sering diinterpretasikan dari tingkah laku pemimpin dan dari permasalahan-permasalahan sosial yang dikaitkan dengan fungsi pemimpin⁸

⁷ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan—Apakah Pemimpinan Abnormal itu?*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedelapan, 1998), h. 2.

⁸ Terkait dengan beberapa fungsi pemimpin sebagaimana disinyalir dalam paparan yang dikemukakan Kartini Kartono, dapat dilihat dalam buku yang sama, *Pemimpin dan Kepemimpinan—Apakah Pemimpinan Abnormal itu?*, h. 102. Dan dibandingkan dengan fungsi kepemimpinan yang dikemukakan Gary Yukl dalam *Leadership In Organization*, (Kepemimpinan Dalam Organisasi), h. 349-350.

Dalam beberapa literatur ditemukan beberapa pengertian tentang kepemimpinan. Secara etimologi kepemimpinan (*ke-pemimpin-an*) mengandung pengertian: orang yang menjalankan suatu aktivitas atau yang mengarahkan orang lain dalam berbagai kegiatan dan organisasi, baik formal maupun non-formal, komersial atau pun sosial untuk memenuhi cita-cita dan tujuan sebagaimana diharapkan.

Terkait dengan istilah kepemimpinan, Gary Yukl yang mengutip pendapat K.F. Janda dalam bukunya "*Human Relations*" dalam masalah ini dia mengatakan, kepemimpinan mempunyai arti yang berbeda pada orang-orang yang berbeda. Kata ini merupakan kata yang diambil dari kamus umum dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kamus teknis sebuah disiplin ilmiah tanpa didefinisikan dengan tepat.⁹

Dari ungkapan Gary tersebut, sangat beralasan bila dikemukakan kronologi terjadinya perbedaan pandangan para pakar dalam mendefinisikan kepemimpinan. Menurut Stogdill sebagaimana dikutip Gary, karena masing-masing peneliti dalam mendefinisikan arti kepemimpinan dilandasi pada perspektif-perspektif individual dan aspek dari fenomena yang paling menarik perhatian mereka, misalnya definisi kepemimpinan yang mengarah kepada perspektif individual yang terkait dengan ciri-ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi dan hubungan peran.¹⁰

⁹ Gary Yukl, *Leadership in Organizations*, terj. Kepemimpinan dan Organisasi, Yusuf Udaya, (Jakarta: Prenhallindo, 1998), h. 3.

¹⁰ Gary Yukl, *Leadership In ...*, hal. 3

Kenyataan sebagaimana diungkapkan tentang keber-
variasian definisi kepemimpinan dalam perspektif individual
di antaranya disebutkan oleh Gary sebagai berikut:

Hemhills & Coons, kepemimpinan adalah perilaku dari
seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas
suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai
bersama.

Jacobs & Jacques, kepemimpinan adalah sebuah proses
memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha
kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan
usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.¹¹

Tiga pengertian kepemimpinan seperti disebutkan,
kiranya telah mewakili dan relevan dengan apa yang
dikemukakan Gary sebelumnya terkait dan mengarah
kepada perspektif individual. Dengan begitu kepemimpinan
menyangkut sebuah proses pengaruh sosial, yaitu pengaruh
yang sengaja dilaksanakan oleh orang-orang tertentu yang
dipilih atau ditetapkan sebagai pemimpin, dengan
tanggung jawab utama menstruktur segala wujud aktivitas
yang terlibat di dalamnya serta berhubungan erat dengan
kelompok (massa yang dipimpin) atau organisasi sebagai
wadah menjalankan kepemimpinan.

Dalam sumber lain dijelaskan juga, kepemimpinan
merupakan seni tentang cara mempengaruhi orang lain
kemudian mengarahkan keinginan, kemampuan dan
kegiatan mereka untuk mencapai tujuan si pemimpin.¹²

¹¹ Gary Yukl, *Leadership*,

¹² Ibnu Syamsi, SU, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*,
(Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Ketiga, 1994), h. 138. Senada
dengan pernyataan tersebut, A.M Kadarman SJ berkomentar,

Otoritas Kekuasaan Pemimpin Dalam Perspektif Mayoritas

Pada dasarnya keberadaan pemimpin dalam suatu
Negara secara global dan berbagai organisasi lain, baik
formal maupun non-formal, ini merupakan pangkal utama
dan paling mendasar penyebab terjadinya berbagai
kegiatan. Kerangka pikir ini dilandasi pada satu alasan, bila
ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara merupakan
suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan
tata kerja dari alat-alat yang menjadi perlengkapan Negara
dan merupakan suatu keutuhan, maka tata kerja jelas
melukiskan ikatan (hubungan) serta pembagian tugas dan
kewajiban antara masing-masing alat tersebut untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.¹³

Tersirat sebuah nilai penting yang tersimpul dalam
pernyataan Soehino tentang eksistensi sebuah Negara
sebagai suatu organisasi kekuasaan dengan cita-cita akhir
terwujudnya satu tujuan tertentu. Dan tujuan tertentu
sebagaimana diinginkan akan tercapai, bila setiap

bahwa kepemimpinan dikatakan juga seni atau proses mem-
pengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mau berusaha
mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok. Inti
pokok definisi tersebut dalam pandangan Kadarman, bahwa
seorang pemimpin bertugas mendorong bawahannya untuk
mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan yang ada. A.M.
Kadarman SJ dkk., *Pengantar Ilmu Manajemen-Buku Panduan
Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan
Ketiga, 1993), h. 116.

¹³ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan
Pertama, 1986), h. 149.

komponen yang terlibat di dalamnya dapat dan mampu memainkan peran sesuai dengan posisi dan kedudukannya masing-masing.

Terkait dengan statemen di atas, Plato¹⁴ salah seorang pemikir klasik yang teorinya banyak dikembangkan dalam perkembangan dunia modern sekarang, sebagaimana dikutip Soehino berpendapat, bahwasanya sebuah negara dengan seperangkat komponennya timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam yang tidak dapat dipenuhi tanpa adanya saling koordinasi dan kerjasama antara satu dengan yang lain. Justeru itu sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka secara bersama pula.¹⁵

Atas dasar itu, pengaturan terhadap posisi dan kedudukan semua komponen yang ada di dalam (secara internal) dipusatkan pada seseorang yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Maka fungsi dan eksistensi pemimpin dalam bingkai kenegaraan adalah melakukan koordinasi dan sentralisasi wewenang terhadap semua komponen tersebut. Jika pengaturan terhadap posisi dan kedudukan

¹⁴ Plato merupakan salah seorang murid terbesar Socrates. Ia hidup pada tahun 429 sampai dengan 347 SM. Pada tahun 389 ia membuka sekolah filsafat di Athena (Yunani) yang diberi nama Academia. Selama 40 tahun Plato mengajar di sekolah tersebut. Di antara buku-bukunya yang sangat populer di bidang pemikiran, sejarah, negara dan hukum adalah "Politeia", "Politikus", dan "Nomoi".

¹⁵ Soehino, *Ilmu ...*, h. 17.

semua komponen ditetapkan pada seseorang yang berkuasa dalam hal ini pemimpin, ini justeru menimbulkan pertanyaan lain. *Pertama*, Dari mana kekuasaan itu bersumber?. *Kedua*, Siapa pemegang kekuasaan? Dan *ketiga* Bagaimana pengesahan kekuasaan itu sendiri?. Ketiga pertanyaan ini difokus kajikan dalam konteks general.

Tiga kerangka di atas yang dikaji dalam pembahasan berikut, tidak juga menuntut suatu jalur pembahasan yang harus final, tetapi kajian yang dilakukan hanya bersifat temporal dan global, sekadar menemukan komperasi alur pikir dengan tema dasar buku ini, Jika tawaran para pakar modern dari Barat dan pakar-pakar Yunani klasik lainnya, bahwa kekuasaan sebagai "power" yang secara *direct* atau *indirect*, dilegalitaskan atau tidak, itu bersumber dari apa?, siapa yang memberikan dan bagaimana pengesahan, justeru dalam Islam timbul sebuah pertanyaan lain yang hampir mirip dengan tiga pertanyaan di atas yakni bagaimana alur pikir yang ditawarkan oleh para pakar muslim?, atau bagaimana yang tersirat dalam sumbernya yang asasi yaitu al-Qur'ân dan Hadith.

Teori Sumber Kekuasaan

Persoalan pertama tentang sumber kekuasaan dimaksudkan untuk mengamati sebuah pergulatan pemikiran yang muncul dan berkembang di tengah-tengah kehidupan manusia, baik Islam maupun non-Islam, sekular atau non-sekular tentang sumber kekuasaan itu. Terkait dengan persoalan ini, banyak pakar Negara klasik seperti Augustinus, Thomas Aquinas dan Marsilius menyatakan, bahwa sumber kekuasaan berasal dari Tuhan, dan teori itu

sendiri dikenal dengan teori teokrasi, teori ini telah berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu dari abad ke V sampai abad ke XV.¹⁶

Di lain pihak para pakar modern dan klasik menyebutkan, bahwa sumber kekuasaan dalam sebuah negara tidak pada Tuhan, melainkan berada di Negara itu sendiri, artinya negaralah yang menciptakan hukum, ini bermaksud bahwa segala sesuatu harus tunduk kepada Negara. Negaralah yang mengatur hukum dan semua komponen yang terlibat di dalamnya harus tunduk dan patuh kepada Negara, dapat dikatakan bahwa sumber kekuasaan tertinggi menurut teori ini tidak pada Tuhan, manusia dan Alam – melainkan berada pada Negara. Baik kapasitas kekuasaan itu bersifat absolut ataupun terbatas.

Landasan berpijak di atas telah dimasukkan dalam sebuah paket teori yang dikenal dengan teori "Kedaulatan Negara", dan teori ini dipelopori oleh beberapa tokoh klasik: Jean Bodin dan Georg Jellinek. Dua tokoh ini telah melahirkan sebuah wacana baru pada zamannya tentang nuansa teori kedaulatan negara. Lagi pun, kedua tokoh ini telah melahirkan argumen untuk mendukung teorinya. Menurut

¹⁶ Soehino, *Ilmu ...*, h. 149-150. Bandingkan dengan pernyataan M. Hasbi Amiruddin yang menyatakan, bahwa teori teokrasi atau yang lazim dikenal dengan teori kedaulatan Tuhan menurut sejarahnya merupakan teori yang paling tua di antara teori-teori Negara yang lain. Tegasnya, teori ini mengklaim secara mutlak bahwa kekuasaan tertinggi itu hanya dimiliki oleh Tuhan atau ada pada Tuhan. M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2000), h. 103.

mereka, hukum itu merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Karena negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum dan memiliki kekuasaan tertinggi yang harus dipatuhi oleh setiap komponen yang terlibat di dalamnya.¹⁷

Ternyata, kondisi yang dilalui teori ini sama dengan teori sebelumnya, di mana lahirnya teori kedaulatan negara telah memunculkan sebuah polemik baru di kalangan para tokoh kenegarawan, polemik itu muncul seputar adanya suatu anggapan bahwa rakyat itu harus tunduk kepada Negara sebagai penguasa tertinggi, maka segala kemauan dan kehendak Negara merupakan satu-satunya kekuatan yang tidak dapat diganggu gugat. Wacana semacam ini telah memunculkan kontradiksi pemikiran antara pencetus teori dengan tokoh lain semisal, Leon Duguit sebagaimana ditulis dalam karyanya "*Traite de Droit Constitutionnel*", Krabbe dalam bukunya "*Kritische Darstellung der Staatslehre*". Dua tokoh inilah yang menentang teori Georg Jellinek dan Jean Bodin, karena menurut Leon Duguit dan Krabbe teori yang dikemukakan itu bertentangan dengan realita yang terjadi.¹⁸

Secara realita dan fakta, menurut Leon Duguit Negara bukan pembuat hukum dan bukan pula penguasa tertinggi yang setiap komponen di dalamnya harus tunduk kepada Negara, tetapi Negara itu sendirilah yang harus tunduk kepada hukum. Mencermati sanggahan yang dilontarkan Leon Duguit dan Krabbe ini, penulis setuju dengan sanggahan dan alasan tersebut, karena posisi Negara dalam

¹⁷ Soehino, *Ilmu ...*, h. 155.

¹⁸ Soehino, *Ilmu ...*,

kenyataannya hanya suatu istilah bagi kehidupan masyarakat yang sistem hidupnya membentuk sebuah komunitas berskala makro, komunitas itu hidup dengan beberapa tujuan tertentu dan terus berkembang menurut situasi dan kondisi yang dilaluinya. Dari itulah kebutuhan terhadap patrol (pola) hidup yang dapat mengatur sistem kehidupannya juga terpikirkan sesuai komitmen dan aspirasi yang muncul ditengah-tengah kehidupan mereka.

Dari itu, negara sebagai suatu istilah merupakan wadah dimana komunitas yang telah mengikatkan diri dengan satu aturan hidup dapat melangsungkan interaksi sosialnya dan dapat pula meneruskan populasinya sesuai aturan yang dibuat dan telah disepakati bersama. Maka sangat jelas di sini paradoks pemikiran terhadap teori kedaulatan negara yang dicetuskan Georg Jellinek dan Jean Bodin di atas, sebab dalam kenyataannya, manusialah yang membuat aturan dalam sebuah komunitas sosial yang ditetapkan dan diputuskan bersama, dan manusia pula sebagai pemegang aturan dan di tangan mereka juga kekuasaan tertinggi itu ada.

Sanggahan Leon Duguit dan Krabbe terhadap teori kedaulatan negara yang dipopulerkan Georg Jellinek dan Jean Bodin, dengan sendirinya telah memunculkan satu teori baru yang dikenal dengan teori kedaulatan hukum,¹⁹

¹⁹ Teori kedaulatan hukum dikembangkan sendiri oleh Hugo Krabbe (1857-1936), hal ini tampak dalam karyanya, *Die Lehre der Rechts-souveranitat*, dan pengembangan selanjutnya diteruskan oleh muridnya R. Kranenburg dalam bukunya dengan judul *Algemene Staatsleer* (1937). Baca Kranenburg dan Tk. B. Sabaruddin, *Ilmu Negara Umum*,

teori ini bermuara dari munculnya pertentangan pemikiran antara Leon Duguit dengan Georg Jellinek. Jika Georg Jellinek berkata, hukum itu adalah penjelmaan daripada kehendak Negara, Leon Duguit berkata lain lagi, ternyata dalam kenyataannya negaralah yang harus tunduk kepada hukum. Justeru hukum telah menjadi penguasa tertinggi di dalam suatu Negara, maka setiap komponen yang terlibat di dalamnya baik raja atau penguasa, rakyat atau warganegara bahkan Negara itu sendiri harus tunduk kepada hukum.

Pernyataan Krabbe semacam itu, telah menimbulkan kebingungan di kalangan para ilmuwan, dan ini terus dipertanyakan seputar bagaimana hukum itu dapat menjelma menjadi sebuah aturan. Menyahuti pendapat tersebut, Krabbe berargumen, bahwa yang menjadi sumber hukum itu adalah rasa hukum yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Rasa hukum ini merupakan sesuatu yang sangat sederhana, maka segala sesuatu yang masih bersifat primitif atau yang tingkatannya masih rendah disebut instink hukum. Sementara dalam bentuknya yang lebih luas atau dalam tingkatnya yang lebih tinggi disebut dengan kesadaran hukum.²⁰

Teori Krabbe tersebut bukanlah teori ketiga yang dapat mengantarkan sistem (bentuk) teori yang komprehensif, ternyata teori tersebut banyak ditemukan kelemahan-kelemahan, di antara kelemahan ini telah dikemukakan oleh Struycken, dimana sumber hukum dalam teori kedaulatan

(Jakarta, Pradnya Paramita, 1986), h. 141, dalam M. Hasbi Amiruddin, *Konsepsi ...*, h. 106.

²⁰ Soehino, *Ilmu ...*, h. 156.

hukum yang dipaparkan Krabbe tidak dapat dijadikan sumber hukum dengan alasan karena rasa hukum itu selalu berubah-ubah pada setiap masa, di samping mencuatnya perbedaan dari golongan yang satu dengan golongan lainnya. Jika kondisi yang terjadi semacam ini, rasa hukum yang bersumber dalam masyarakat akan memunculkan konflik baru, karena masing-masing individu memiliki rasa tersendiri yang tidak sama dengan individu lain.²¹

Kelemahan lain dari teori Krabbe yang banyak mendapat sanggahan dan kritikan adalah, pada kenyataannya juga tumbuh dan berkembang sebuah teori lain, teori ini dikenal dengan teori kedaulatan rakyat. Teori ini pertama sekali mencuat ke permukaan dengan sebab penindasan yang dilakukan para raja yang berkuasa terhadap rakyatnya, eksekusi dari itu, telah membangkitkan minat dan kekuatan pada diri rakyat yang dipimpin untuk membentengi tindakan dan sikap rajanya dari ketidak-sesuaian aturan.

Usaha ini menurut keterangan dimulai oleh kaum monarkomaken yang dipelopori Johannes Althusius, dalam ajarannya itu Johannes tidak lagi mendasarkan kekuasaan raja atas kehendak Tuhan, tetapi atas kekuasaan rakyat, ada juga yang mengatakan, bahwa munculnya teori ini karena kegagalan beberapa teori sebelumnya, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan Negara, teori kedaulatan hukum. Kegagalan teori ini ditandai dengan praktik-praktik yang senantiasa merugikan rakyat.²² Para pelopor teori ini di antaranya, J.J. Rousseau dan John Locke.

²¹ Soehino. *Ilmu ...*,

²² M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara ...*, h. 107.

Kajian beberapa teori tentang sumber kekuasaan sebagaimana dijelaskan di atas, hal ini telah pula memunculkan sebuah implikasi bagi penulis untuk melahirkan satu argumen, bahwasanya sumber kekuasaan dalam perspektif para pemikir Barat non-Islam khususnya pemikir-pemikir klasik, menurut mereka kekuasaan itu sumbernya begitu bervariasi, ada yang bersumber dari Tuhan, Negara, Hukum dan Rakyat. Ternyata bila dihubungkan dengan Islam, anggapan semacam itu sangat berlawanan.

Meski ada di antara pemikir muslim yang juga melahirkan kesamaan pendapat sebagaimana beberapa pendapat pemikir klasik. Tetapi dalam kenyataannya pola pikir mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan ini tampak bila kita mengkaji secara lebih mendalam penafsiran dari beberapa teori tentang sumber kekuasaan. Terhadap persoalan ini meski muncul dua fenomena mengenai sumber kekuasaan—ada sebahagian menerima terkait dengan salah satu teori sumber kekuasaan, dan ada sebahagian yang lain menolak.

Persoalan kekuasaan dalam kepemimpinan Islam dapat saja diakui, namun kekuasaan bukan sasaran akhir bagi seorang pemimpin, Islam menghargai dan menerima kekuasaan sebagai salah satu hal penting bagi seorang pemimpin, akan tetapi kekuasaan tersebut menjadi penting diikuti dengan pengabdian kepada masyarakat atau komunitas, baik secara internal (sesama kaum muslimin) maupun secara eksternal (kafir zimni atau non-muslim yang mampu menciptakan kedamaian bersama ummat Islam).

Tipe-tipe Pemimpin Mayoritas

Menyangkut dengan tipe-tipe pemimpin, para ahli telah membuat sebuah klasifikasi khusus yang berkaitan dengan pendekatan kepemimpinan, pendekatan ini dibagi dalam dua sisi. *Pertama*, pendekatan sifat (*trait approach*). Pendekatan sifat adalah pendekatan kepemimpinan yang mengarah kepada a. sifat fisik, b. sifat intelegensi dan kemampuan, c. kepribadian, d. hubungan dengan tugasnya dan e. sifat sosial. *Kedua*, pendekatan penggunaan wewenang.²³ Pendekatan kedua merupakan jenis pendekatan yang cenderung mengarah kepada tipe atau gaya²⁴ kepemimpinan seseorang. Ibnu Syamsi SU, mengklasifikasikan 3 macam tipe pemimpin, *pertama*, pemimpin otokratis, *kedua*, pemimpin yang tidak peduli dan *ketiga* pemimpin yang demokratis.²⁵

²³ Ibnu Syamsi, SU, *Pokok-Pokok ...*, h. 139.

²⁴ Gaya diterjemahkan dengan sikap, gerakan, tingkah laku. Sedangkan tipe dimaksudkan dengan model, corak dan macam. Lihat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ketiga, edisi II, 1994), h. 297 & 1061. Kendati terdapat perbedaan pemahaman kedua istilah tersebut, dalam uraian tentang tipe-tipe kepemimpinan antara istilah gaya dan tipe dipadukan menjadi satu karena punya hubungan erat. Dalam pengertian bisa digunakan istilah "gaya" dan bisa juga digunakan istilah "tipe". Sebab, model atau tipe kepemimpinan seseorang misalnya "Demokratis" justeru mengarah kepada muncul gaya atau tingkah laku tersendiri dalam kepemimpinannya, dan tingkah laku ini berbeda munculnya sesuai dengan tipe atau model kepemimpinan yang dipakai.

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, h. 139.

Selanjutnya bila direlevansikan dengan pernyataan Ibnu Syamsi, SU serta dikaitkan dengan tiga macam tipe pemimpin seperti disebutkan. A.M. Kadarman SJ yang mengutip pendapat Kootz, O'Donnell dan Weihrich juga berprinsip sama, hal ini didasari pada cara pemimpin menggunakan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut menurut tiga pakar tadi gaya kepemimpinan dapat diklasifikasikan dalam tiga wujud. *Pertama*, gaya pemimpin *otocratic*. *Kedua*, gaya pemimpin *democratic* atau partisipatif dan *ketiga*, gaya pemimpin *free rein*.²⁶

Di samping tiga gaya atau tipe kepemimpinan seperti disebutkan, ternyata banyak pakar lain seperti dikutip oleh Kartini Kartono yaitu sebagai berikut: a. tipe kharismatis, b. tipe paternalistis dan maternalistis, c. tipe militeristis, d. otokratis, e. tipe *laisser faire*, f. tipe populistis, g. tipe administrative dan h. tipe demokratis.²⁷

²⁶ Lihat. A.M. Kadarman SJ, *Pengantar Ilmu ...*, h. 118. Gaya kepemimpinan seperti disebutkan tidak hanya terbatas pada tiga gaya saja, tetapi terdapat beberapa gaya lain yang disandangkan kepada pemimpin dengan model pelaksanaan kepemimpinan yang berbeda antara satu dengan yang lain, termasuk dengan gaya pemimpin *fathernalistik*, *soldiers* dan demokratis. Lihat perbandingan dengan apa yang dikemukakan Ibnu Syamsi, SU dengan tiga tipe kepemimpinan—tipe kepemimpinan otokratis, tipe kepemimpinan tidak peduli dan tipe kepemimpinan yang demokratis. Dan beberapa tipe kepemimpinan ini erat kaitannya dengan gaya kepemimpinan—ini akan ketemu bila dikaji secara mendalam tentang semua tipe seperti disebutkan.

²⁷ Lihat, Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan – Apakah Pemimpin Abnormal itu?*, (Jakarta, Rajawali Press,

Meski begitu banyak tipe atau model pemimpin dalam kegiatan kepemimpinan, di sini hanya difokuskan pada beberapa tipe saja yaitu tipe kepemimpinan paternalistis, kepemimpinan otokratik, kepemimpinan demokratik atau partisipatif, kepemimpinan *laissez faire* dan kepemimpinan *free rein*. Kajian terhadap lima tipe pemimpin ini—karena model atau tipe pemimpin tersebut telah begitu lumrah muncul dalam kehidupan manusia dengan skop kegiatan yang luas atau sempit, formal atau tidak formal.

- a. Kepemimpinan paternalistis. Tipe pemimpin semacam ini wujud kepemimpinan dengan sifat kebapakan, model kepemimpinan ini memiliki beberapa sifat di antaranya sebagai berikut:
1. Pimpinan menganggap bawahannya sebagai manusia lemah yang tidak atau belum dewasa, atau menganggap bawahannya seperti anaknya yang senantiasa perlu dibimbing dan dikembangkan.
 2. Pimpinan bersikap terlalu melindungi (*overly protective*).
 3. Pimpinan hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif.
 4. Selalu bersikap maha tahu dan benar.²⁸

cetakan kedelapan, 1998), h. 69. Penjelasan tentang beberapa tipe tersebut dapat dilihat dalam buku yang sama, mulai halaman 69 sampai dengan halaman 74. Dengan demikian kita dapat menemukan sebuah komperasi tipe kepemimpinan yang digambarkan dalam perspektif mayoritas—apakah sesuai dengan tipe (model) kepemimpinan yang diinginkan dalam Al-Qur'an.

²⁸ Katini Kartono, *Pemimpin dan ...*,

- b. Kepemimpinan Otokratik. Otokratik berasal dari perkataan *autos* dengan makna sendiri, *kratos* bermakna kekuasaan atau kekuatan. Dengan demikian, otokrat berarti penguasa absolut. Dalam hal ini, maksud dari kepemimpinan otokratik yaitu pemimpin yang mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi.²⁹ Kemutlakan ini telah menjadi kata kunci, bahwa pemimpin senantiasa dipandang sebagai orang yang memberi perintah dan yang dapat menuntut, serta segala keputusannya ada ditangannya sendiri.
- c. Kepemimpinan Demokratik atau partisipatif. Pemimpin semacam ini dipandang sebagai orang yang tidak akan melakukan suatu kegiatan tanpa terlebih dahulu mengkonsultasikan dengan bawahannya, pemimpin mengikutsertakan pendapat bawahan sebelum mengusulkan suatu kegiatan atau keputusan. Begitu halnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan disamping tugas atau pekerjaan diserahkan kepada bawahannya—sistem kepemimpinan ini juga melibatkan dirinya untuk menyelesaikan tugas-tugas.
- d. Kepemimpinan *laissez faire*. *Laissez faire* adalah corak pemimpin yang hanya berkedok sebagai pemimpin, dalam kenyataannya dia tidak pernah memimpin. Pimpinan ini senantiasa membiarkan kelompoknya dan setiap individu yang terlibat di bawah kepemimpinannya dapat berbuat sesuka hatinya. Semua tanggung jawab dirinya sebagai pimpinan diserahkan kepada para bawahannya.

²⁹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan ...*,

- e. Kepemimpinan *Free Rein*. Pemimpin model ini hanya menggunakan sedikit kekuasaan, dan lebih banyak memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk melakukan kegiatan. Fungsi pemimpin dalam model kepemimpinan semacam ini hanya sebagai fasilitator melalui pemberian informasi dan sebagai orang yang berhubungan dengan kelompok lain.

Mencermati pada beberapa tipe (model) kepemimpinan yang telah diuraikan di atas, ternyata banyak sekali perbedaan antara model yang satu dengan yang lain. Meski demikian, bila dikaji secara mendalam ada sebahagian berpendapat bahwasanya model kepemimpinan yang cenderung relevan dan cocok diterapkan dalam praktik kepemimpinan adalah model pemimpin yang demokrat. Sementara beberapa model lain tidak cocok bahkan bertolak belakang dengan nilai humanistic.

Meski sinyalimen tersebut dapat dibenarkan sesuai fakta yang terjadi, tetapi dalam konsepsi penulis pembenaran itu perlu ditinjau kembali, hal ini didasari pada sebuah pertanyaan, jika model pimpinan demokratis relevan diterapkan—mengapa di beberapa Negara yang menerapkan system tersebut nyaris berada diambang kehancuran, bahkan mengukir nilai sejarah panjang sebagai Negara yang sering terjadinya konflik?³⁰

³⁰ Salah satu contoh yang dapat diangkat dalam buku ini tentang cermin sebuah Negara dengan menggunakan model pimpinan demokratis semisal Indonesia. Dalam realitanya pada saat sekarang Indonesia tengah dilanda sebuah konflik horizontal yang semakin mencuat dan meruncing—di mana beberapa daerah yang menjadi bahagian Indonesia tengah

Dari berbagai tipe atau model kepemimpinan tersebut di atas, memang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena itu seorang pemimpin menjadi penting memiliki sifat kepemimpinan yang positif, sehingga manajemen suatu lembaga, institusi atau organisasi menjadi positif pula, sifat-sifat yang dimaksud dapat dikemukakan di bawah ini:

- a. *Kharisma (Gezag)*, dengan memiliki sifat ini seorang pemimpin akan didengar pendapatnya, dipatuhi dan dilaksanakan semua peraturan yang telah disepakati tanpa pemaksaan sama sekali.
- b. *Kepedulian*, dengan memiliki sifat ini seorang pemimpin akan dihargai oleh bawahannya, karena mereka merasa diperhatikan, artinya pemimpin tersebut telah membangkitkan kecerdasan emosional bawahannya.
- c. *Komitmen*, dengan memiliki sifat ini seorang pemimpin akan akan tampil prima terhadap pekerjaan yang telah direncanakan dan sifat ini sekaligus dapat dijadikan sebagai paternalistik bagi bawahannya.
- d. *Komunikator*, dengan memiliki sifat ini, seorang pemimpin akan mudah menyampaikan ide atau gagasan cemerlangnya kepada bawahannya.
- e. *Konsisten*, dengan memiliki sifat ini seorang pemimpin akan berhasil dalam menjalankan roda kepemimpinannya dengan baik.

berusaha agar pisah dengan Indonesia. Fenomena semacam ini barangkali juga tampak di beberapa Negara lain dengan menganut system yang sama "Demokratik".

- f. *Kreatif*, dengan memiliki sifat ini seorang pemimpin akan mampu memusatkan perhatiannya pada harapan yang nyata, mampu menjelaskan berbagai strategi untuk mencapai keberhasilan kepada bawahannya.
- g. *Kompeten*, dengan memiliki sifat ini seorang pemimpin akan tampil sebagai tenaga profesional dalam bidangnya, sehingga kepercayaan bawahannya menjadi tinggi.
- h. *Keberanian*, seorang pemimpin yang memiliki sifat ini tidak takut mengambil resiko, namun dengan penuh keyakinan terhadap ide atau gagasannya akan mencapai keberhasilan yang gemilang.

Sifat-sifat kepemimpinan tersebut menjadi penting dibudayakan ke dalam diri anggota timnya, karena sifat tersebut dapat memperpendek hirarki manajemen dan membangun budaya tanggung jawab yang tersebar ke dalam setiap individu pekerja.

Perbedaan Umum Konsep Kepemimpinan Barat dengan Kepemimpinan Islam

Sebelum diuraikan secara detail titik tolak perbedaan konsep kepemimpinan Barat dan kepemimpinan dalam Islam, sebelumnya juga dipaparkan tentang sumber kekuasaan pemimpin mayoritas (bukan Islam). Dalam uraian berikut penulis menguraikan secara singkat mengenai sumber kepemimpinan Islam. Perhatikan banyak argumen yang ditulis oleh beberapa pakar tentang kepemimpinan Islam, dikatakan bahwa sumber kepemimpinan Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Tuntutan kepada pemimpin Islam supaya mereka mengetahui, memahami dan mengamalkan

segala dasar ajaran Islam di setiap kondisi dan tempat. Berdasarkan tuntutan tersebut, ayat 58-59 surat an-Nisa' harus dijadikan rujukan utama kepemimpinan Islam, sebab ayat tersebut menjadi asas terhadap ajaran agama, budaya dan *siasah* Islam serta merupakan kaedah pertama di dalam perlembagaan Daulah Islamiyyah.

Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (58). Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (59)

Memperhatikan terjemahan ayat di atas, ada empat hal yang menjadi inti pokok terkait dengan kepemimpinan manusia di bumi, sebagai berikut: *Pertama*. Allah sebagai puncak pimpinan yang wajib ditaati dan dipatuhi. *Kedua*. Kesetiaan dan ketaatan kepada Nabi Muhammad merupakan jalan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. *Ketiga*. Ketaatan dan kesetiaan kaum muslimin kepada *ulil amri* (pemimpin) yaitu orang yang telah diberikan kekuasaan untuk memimpin masyarakat. *Keempat*. Mengikrar al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai Undang-Undang mutlak dalam kehidupan masyarakat Islam, sekaligus menjadikannya sebagai sumber rujukan untuk menyelesaikan segala persengketaan yang terjadi di lingkungan umat Islam sendiri.

Gambaran tentang landasan dan sumber pokok kepemimpinan Islam sebagaimana disebutkan melahirkan satu indikator bahwasanya konsep kepemimpinan Islam dengan Barat sukalar mempunyai perbedaan, perbedaan di maksud terlihat di semua sudut pandang, di antara macam perbedaan konsep kepemimpinan Islam dengan konsep kepemimpinan Barat sekular. Kepemimpinan Islam adalah amanah ke-Tuhanan (*divine trust*) yang merangkumi urusan duniawi-ukhrawi dengan dwiperan utama yaitu memelihara agama dan mengurus dunia. Model kepemimpinan ini berbeda dengan konsep kepemimpinan Barat sekular yang hanya menjurus kepada urusan duniawi-manusiawi. Kepemimpinan ini dianggap sebagai proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain atau kumpulan-kumpulan tertentu ke arah pencapaian tujuan. (lihat beberapa definisi kepemimpinan yang ditulis oleh pemikir Barat).

Dalam konteks organisasi, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi subordinat untuk mendapatkan kerjasama dan keterlibatan mereka ke arah mencapai sasaran organisasi dengan mengefektifkan dinamika kumpulan, memperhubungkan inter personal antara anggota-anggotanya. Sialnya, dalam usaha mempertahankan status-quo, kuasa, dan pengaruh, kepemimpinan sering kali bertukar menjadi seorang yang diktatoris. Pemimpin semacam ini memaksa pengikut menerima perubahan-perubahan seperti perubahan tujuan, aturan yang disepakati, prosedur, input, proses dan seterusnya output dalam sesuatu sistem sosial.

Kenyataan seperti disebutkan itu, tentu sangat berbeda dengan model dan konsep kepemimpinan yang diinginkan Islam. Islam menganggap kepemimpinan adalah taklif atau beban tanggungjawab dan bukan satu keistimewaan yang ada pada diri seseorang. Pemimpin diibaratkan sebagai "pengembala" yang akan diminta tanggungjawab di atas gembalaannya (lihat Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Dari uraian tersebut tersimpul suatu kejelasan, di mana kepemimpinan atau pemerintahan dalam Islam adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Pemimpin perlu dipimpin oleh ilmu, iman dan amal untuk menjadikan kepemimpinannya sebagai alat yang aktif yang dapat merealisasikan tujuan yang hendak dicapai yaitu membela agama dan mengurus dunia.[]

BAB III

DESKRIPSI KEPEMIMPINAN ISLAM

Manusia: Antara Pemimpin dan Yang Dipimpin

Sebagaimana *al-hikmah al-Ilahiyah* (kebijaksanaan Tuhan), menuntut perlunya pengutusan para rasul untuk membimbing umat manusia, demikian pula tentang perlunya seorang imâm, yakni bahwa *al-hikmah al-ilahiyah* juga menuntut perlunya kehadiran seorang imâm sesudah meninggalnya Rasul untuk terus dapat membimbing manusia dan memelihara kemurnian ajaran para nabi dan agama Ilahi dari penyimpangan dan perubahan. Selain itu, untuk menerangkan kebutuhan-kebutuhan zaman dan menyeru manusia ke jalan serta pelaksanaan ajaran para Nabi. Tanpa itu, tujuan penciptaan manusia yaitu kesempurnaan dan kebahagiaan, *al-takamul wa al-sa'adah*, sulit dicapai.

يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ وَأَلْفَهُمْ سَوَاءً مِمَّنْ سَاءَ وَكَوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang benar, *al-shadiqin*." (Q.S. al-Taubah: 119).

Ayat ini tidak berlaku untuk satu masa dan umat saja, tapi untuk seluruh zaman. Seruan agar orang-orang beriman bergabung dalam barisan orang-orang yang benar, *al-shâdiqin*, pertanda adanya imâm maksum yang harus diikuti pada setiap zaman, sebagaimana disebutkan oleh banyak mufassir Sunni dan Syi'ah terhadap makna ayat ini.

Setiap umat secara naluriah perlu kepada pemimpin, kenyataan ini juga berlaku pada diri umat Islam. Atas dasar itulah, Allah menurunkan surat An-Nisa' ayat 59 untuk menjadi pegangan bagi semua insan yang beriman supaya umat Islam taat kepada Allah, Rasul dan kepada pemimpin yang dalam beberapa sumber lain lazim disebut dengan imâm.

يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ وَأَلْفَهُمْ سَوَاءً مِمَّنْ سَاءَ وَكَوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: "Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antaramu ...". QS. An-Nisa': 59.

Dalam ayat di atas tersirat ungkapan Allah "Ulî al-Amri" kata ini dimaknai dengan "patuh atau taat kepada Amir (penguasa)". Adanya perintah supaya umat Islam taat kepada Ulî al-Amri, di samping taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hal ini menunjukkan bahwa Islam memang secara prinsip menuntut kehidupan berjama'ah di bawah kepemimpinan seseorang atau lembaga. Sebab, dengan kehidupan semacam ini—berupa kehidupan yang teratur dan terorganisir, umat Islam akan terjaga dengan baik,

terhindar dari perpecahan serta menangkis upaya lawan merusak tata kehidupan dan kesatuan umat Islam.

Statemen di atas melahirkan sebuah indikasi bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan berjama'ah sudah tentu diperlukan pemimpin yang dapat memberikan bimbingan dan arahan serta penyelesaian terhadap segala masalah yang timbul, baik masalah itu seputar sosial kemasyarakatan maupun masalah yang terkait dengan keagamaan sendiri. Dengan kata lain, keberadaan pemimpin di tengah-tengah masyarakat, akan mengecilkan volume masalah yang timbul. Sebab isu-isu yang ada di tengah masyarakat bila dibiarkan tanpa ada figur yang dapat dipatuhi dan dipercayai kepemimpinannya, justeru masyarakat akan menghadapi kekacauan dan kemelut yang pada akhirnya bercerai berai.³¹ Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'ân di surah An-Nisa' ayat 83.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَبِطُونَ ۗ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

³¹ Kekhawatiran semacam itu bukan hanya sekadar sebuah utopi, tetapi ia telah menjadi sebuah realitas sejarah yang begitu panjang, pembuktiannya dapat disimak dalam sejarah kehidupan masyarakat Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke sana. Disebutkan, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tengah terjadi kekacauan yang hebat—kekacauan ini dikarenakan banyak faktor yang salah satunya adalah krisis kepemimpinan. Atas dasar itulah kehadiran Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka disambut dengan gembira sebagai pemimpin bagi mereka.

Artinya: "Dan apabila sampai kepada mereka berita keamanan (baik) atau ketakutan (buruk), mereka lantas menyiarkannya. Dan sekiranya mereka menyerahkan (meminta pertimbangan) kepada Rasul dan kepada Ulil Amri di antara mereka, sesungguhnya mereka akan mengetahuinya dari orang-orang yang akan mengambil putusan (Ulil Amri) di antara mereka. Kalau sekiranya tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, niscaya kamu akan mengikuti syaitan, kecuali segolongan kecil saja (daripadamu)".

Karena masyarakat awam yang menghadapi isu membingungkan, hal ini tentu saja memerlukan kepada pemecahan masalah yang datang dari pihak yang dianggap mempunyai otoritas untuk menyelesaikannya. Ini berarti menuntut adanya pemimpin atau lembaga kepemimpinan yang mampu memberikan petunjuk dan pemecahan serta menetapkan langkah yang harus diambil masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan kekacauan, sikap saling bermusuhan yang pada akhirnya dapat melemahkan masyarakat atau jama'ah itu sendiri.

Pengertian Kepemimpinan Islam

Menemukan satu definisi "Kepemimpinan Islam" yang sesuai dan terarah sebagaimana maksud dan tujuannya, tuntutan yang paling utama adalah memahami kedua istilah tersebut yaitu "kepemimpinan" dan "Islam". Dengan alasan, berangkat pada kajian beberapa sumber yang membahas tentang kepemimpinan—khususnya kepemimpinan Islam. Ternyata definisi tentang ini masih sangat

variasi.³² Meski demikian, dalam kajian ini akan dicari kebulatan pengertian berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa ungkapan para ahli.

Terkait dengan istilah pertama "Kepemimpinan" yang asal katanya pemimpin, dalam pandangan umum para pakar menyebutkan, kepemimpinan adalah suatu seni tentang cara mempengaruhi orang lain kemudian mengarahkan keinginan, kemampuan dan kegiatan mereka untuk mencapai tujuan si pemimpin.³³

Definisi lebih lanjut tentang kepemimpinan dalam konsep global, telah pula disinggung dalam pembahasan sebelumnya, dan kesemuanya itu berintikan pada satu tujuan dari sekian banyak tujuan yang diprakarsai bersama, diputuskan secara bersama dan dilaksanakan secara bersama

³² Bervariasinya definisi kepemimpinan Islam dapat diasumsikan pada beberapa faktor. Faktor pertama ilmu yang mempelajari tentang kepemimpinan yang orientasinya "Islam" terhitung masih baru berkembang di tengah-tengah kehidupan manusia, kenyataan ini tampak bila kita mengkaji banyak literatur Islam—dan sedikit sekali yang membahas tentang kepemimpinan Islam. Faktor kedua, kajian tentang kepemimpinan itu sendiri atau lazim diistilahkan dengan "Leadership" dalam pandangan umum telah menjadi kajian penting di dunia, karena ilmu kepemimpinan erat kaitannya dengan ilmu manajemen. Meski demikian, variasinya definisi kepemimpinan Islam, tidak berarti bervariasi definisi kepemimpinan, tetapi variasi itu lahir ketika para pakar mencari format baru bagaimana sebenarnya pengertian kepemimpinan Islam?, bukan bagaimana sebenarnya pengertian kepemimpinan?.

³³ Ibnu Syamsi, SU, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Ketiga, 1994), h. 138.

pula. Meski demikian, kepemimpinan berarti juga penafsiran tingkah laku pemimpin dan pendekatan terhadap permasalahan sosial yang dikaitkan dengan beberapa fungsi pemimpin, serta menjalankan suatu aktivitas atau mengarahkan orang lain dalam berbagai kegiatan dan organisasi, baik formal maupun non-formal, komersial ataupun sosial untuk memenuhi cita-cita sebagaimana diharapkan.

Sementara kata Islam berasal dari asal kata *aslama-yuslimu-islaman*, kata ini mengandung arti "menyerah", yaitu menyerah diri kepada petunjuk dan peraturan Allah.³⁴ Di samping pengertian semacam itu, sebahagian ahli yang lain mengartikan Islam dengan pengertian "selamat dan damai". Tegasnya, keseluruhan pengertian tersebut berintikan pada satu komitmen, bahwa umat Islam yang telah yakin Islam-lah satu-satunya agama terakhir yang diturunkan kepada manusia, dalam perjalanan hidupnya harus tunduk dan patuh kepada risalah tersebut. Sebab dengan kepatuhan, keikhlasan dan kecenderungan dirinya kepada ajaran Islam yang *hanif*, kedamaian dan keselamatan hidup yang menjadi impian setiap insan akan terwujud baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Ketika kepemimpinan dikaitkan dengan Islam, hal ini mengandung makna bahwa pendekatan dan prosedur yang harus ditempuh oleh seorang pemimpin adalah yang dapat mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian terhadap yang dipimpin, ini menjadi relevan dengan makna Islam itu sendiri. Dengan demikian,

³⁴ Lihat, Bustanuddin Agus, *Al-Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan Pertama, 1993), h. 59.

kebenaran dan keadilan menjadi penting dijadikan sebagai landasan teori kepemimpinan Islam.

Kiranya pernyataan di atas telah menjadi inti utama tujuan kepemimpinan Islam, di mana setiap pemimpin Islam dapat merealisasikan maksud dan tujuan risalah Islam sebagai satu-satunya risalah yang menjamin kedamaian dan kebahagiaan hidup bagi tiap insan beriman. Dari itu, definisi yang relevan tentang kepemimpinan Islam berdasarkan dua penjelasan istilah di atas yaitu:

“Usaha seseorang yang telah diberikan kepercayaan untuk mengatur, mengarahkan tata kehidupan manusia dengan segala komponen yang terlibat di dalamnya ke arah kesempurnaan dan kesejahteraan hidup sesama, dengan tujuan akhir tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat”.

Pernyataan di atas diperluas lagi pemahamannya sebagaimana dikemukakan EK. Imam Munawwir, bahwa Kepemimpinan (*leadership*) Islam berarti bagaimana ajaran Islam dapat memberi *sibghah* dan *wijah*, corak serta arah kepada pemimpin itu, dan dengan kepemimpinannya mampu merubah pandangan atau sikap mental yang selama ini dianggap, menghambat dan mengidap pada sekelompok masyarakat maupun perorangan.³⁵

Pandangan atau sikap mental pemimpin yang dihindangi suatu sikap memihak pada sekelompok orang, atau lazim disebut dengan sikap *nepotisme*—suatu paham mementingkan kelompok serta kaum kerabatnya sendiri,

³⁵ EK. Imam Munawwir, *Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam*, (Surabaya, Usaha Nasional, t.t.), hal, ix.

ternyata sikap dan pandangan semacam itu menjadi tantangan utama ketika umat Islam berusaha membangun sebuah tatanan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Karena, sikap *nepotisme* yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan umat Islam akan memberikan eksese negatif bagi kelangsungan tatanan sosial tadi, dan pada akhirnya eksistensi umat Islam akan terjerembab ke lembah perpecahan antar sesama.

Agar kondisi umat Islam semacam itu terhindari, umat Islam harus bersikap objektif serta terbebas dari sikap dikotomi antar sesama. Sikap ini dipraktikkan di segala situasi dan kondisi yang dilalui, tidak terkecuali ketika umat Islam melaksanakan suatu suksesi kepemimpinan. Menumbuh kembangkan sikap objektif pada saat terjadinya suksesi, dalam kenyataannya akan tercipta suatu kondisi masyarakat yang bebas dari segala bentuk permainan politik, dan permainan itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, misalnya saja “*money politic*” dan lain sebagainya.

Jika umat Islam telah dapat membentengi diri dan tidak lagi terkontaminasi dengan unsur-unsur apapun termasuk “*money politic*” tadi, prediksi yang muncul adalah: *pertama*, umat Islam telah merekonstruksi satu bangunan politik ideal yaitu macam bangunan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Kedua*, perpecahan di antara sesama dengan sebab, masing-masing individu punya kecenderungan terhadap kelompok dan kubunya sendiri akan dapat dihindari sekecil mungkin. *Ketiga*, pemimpin yang dipilih akan melaksanakan tugasnya sebagai penguasa tidak dengan semena-mena. *Keempat*, rakyat akan ta’at dan patuh kepada pemimpin, dengan sebab kepemimpinan yang dijalankan itu relevan dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, kepemimpinan Islam yang disinyalir oleh Allah dalam Al-Qur'ân sebagai *mustakhlif* yang bertugas menjadi penguasa, hal ini tidak berarti manusia dapat menjalankan kekuasaannya secara semena-mena, tetapi predikat *mustakhlif* di sini benar-benar dilaksanakan sebagaimana diinginkan Islam, sebagai agama yang mengarahkan manusia kepada keselamatan dan kedamaian—mampu merubah pandangan atau sikap mental manusia kepada kebenaran. Dan yang paling esensial adalah kesanggupan manusia memakmurkan dan memperbaiki segala yang ada di alam maya ini yang tidak hanya terbatas pada skop manusianya, tetapi juga terkait dengan makhluk Allah yang lain.³⁶

Dalam hal ini, keberadaan pemimpin yang senantiasa diidentikkan sebagai penguasa dalam pemahaman umum, maka posisi dan tugasnya adalah merealisasikan hal-hal yang telah disebutkan tadi yaitu kesanggupan untuk memakmurkan bumi, memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan terhadap yang dipimpin, bukan sebaliknya melakukan kezaliman dan kerusakan terhadap mereka.

Kendati demikian, tidak aneh dalam kenyataannya sering ditemukan profil-profil pemimpin atau penguasa yang tidak lagi mengetahui posisi dan eksistensinya sebagai

³⁶ Lihat, A. Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan Ketiga, 1994), h. 117., terkait dengan keberadaan manusia sebagai pemimpin atau penguasa (*istikhlaf*), dalam hal ini berarti kesanggupan manusia memakmurkan bumi, bukan merusak—tetapi justeru mampu memberikan keseimbangan dalam konteks keadilan dan ketenteraman, bukan melaksanakan kezaliman.

pemimpin dengan tugas dan kewajibannya sebagai pengayom rakyat (orang yang dipimpin). Akibatnya, mereka sering berbuat semena-mena, seakan-akan kekuasaan yang didapatkan itu telah menjadi suatu yang mutlak untuk dirinya, mutlak didapatkan dari hasil usahanya, sehingga kebebasan sikap manusia di tengah-tengah kehidupan manusia lain semakin merajalela. Egoan manusia dengan sebab kekuasaan, dalam kenyataannya terkadang manusia berusaha menjadi sosok yang paling *sentris* atau *antroposentris* sebagai pusat segala perhatian, kepentingan dan kebenaran.

Justeru karena sifat ego dan angkuhnya manusia dengan sebab manusia memiliki kekuasaan—dan manusia dengan bebas pula berbuat apa saja, hal ini tentu saja dapat mendiskreditkan posisi Tuhan sebagai Zat yang memberi kuasa kepada manusia di bumi, dan pendiskreditan itu ternyata telah sampai ke taraf yang paling ekstrim, sikap seperti ini justeru memunculkan image baru, di mana manusia dapat dianggap sebagai *fabermundi* (pencipta dunianya) bukan lagi dianggap sebagai *viatormundi* (penziarah di dunia ini).³⁷

Kenyataan sebagaimana disebutkan, direspon oleh Machasin dengan mengungkapkan hal yang sama, di mana jika orang-orang mau kembali kepada al-Qur'ân, niscaya mereka akan melihat betapa besarnya kekuasaan dan

³⁷ Harry Hamersma, *Tokoh-tokoh Filsafat Modern*, (Jakarta: Gramedia, cet-IV, 1986), h. 3, dalam Alwahidi Ilyas, *Umat Islam Di Tengah Pergumulan Dunia Modern*, Sinar Darussalam (Medium Pengetahuan dan Kebudayaan), Nomor 225, 2001, hal. 76-77.

kemahabesaran Allah yang disinyalir di dalamnya, meski demikian manusia seringkali merasa diri terlalu besar dan kuat, yang pada akhirnya dapat berbuat sekehendak hatinya, baik dalam hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan sesama manusia.³⁸

Apa yang dikemukakan Machasin tersebut telah menjadi sebuah renungan berharga bagi perjalanan pemimpin sekarang dalam berbagai kapasitas kepemimpinan dan umat Islam secara keseluruhan, terkait dengan hal di atas, Machasin menawarkan suatu solusi kepada manusia dan khususnya umat Islam, supaya mereka tidak lagi bersikap *fabermundi* (pencipta dunianya) tetapi kembali bersikap *viaturmundi* (penziarah di dunia ini), hal ini tentu saja umat Islam (para pemimpin) kembali kepada ideologi kehidupannya yakni al-Qur'an dan Al-Hadith. Sebab, membuka kembali lembaran al-Qur'an berarti umat Islam telah membuka kembali fakta dan realita sejarah masa lalu yang diabadikan oleh Allah dengan berbagai macam peristiwa, hal ini menyiratkan makna yang begitu mendalam "menjadi i'tibar" bagi perjalanan kehidupan manusia di bumi.

Dari paparan di atas, hal yang sangat esensial untuk digaris bawahi, bahwasanya pemimpin Islam berarti seorang individu yang sadar akan tanggung jawab sebagai individu yang diberikan amanah untuk memimpin atau yang menjalankan kekuasaannya, dengan komitmen dan cita-cita menjadikan orang yang dipimpin memperoleh kedamaian dan kesejahteraan hidup, dan penguasaan ini

³⁸ Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan I, 1996), h. 71.

tidak hanya terbatas pada diri manusia dengan segala populasinya, tetapi melekat juga pada tiap makhluk Allah yang lain.

Justeru karena itu, kesadaran manusia akan mandat kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya dan mandat kekuasaan yang dipercayakan oleh manusia, hal ini menjadikan pribadi pemimpin atau penguasa terus berfikir, di mana kekuasaan itu merupakan suatu karunia atau amanah Allah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam Sunnahnya. Dan kekuasaan itu kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah.³⁹

Fungsi dan Kedudukan Pemimpin Dalam Islam

Kedudukan pemimpin dalam suatu masyarakat sangatlah penting, meski pun ia bukan segala-galanya, sebagaimana dikatakan "bahwa pemimpin dalam konsepsi Islam bukanlah manusia yang terbebas dari kesalahan dan kesilapan", melainkan mereka juga manusia yang banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu keharusan rakyatlah sebagai obyek yang dipimpin untuk menegur dan memperbaiki kesalahan pemimpinnya.

³⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum – Studi Studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan Pertama, 1992), h. 79.

Oleh sebab itu, kepatuhan rakyat kepada pemimpin merupakan suatu keharusan yang tidak boleh disepelekan, kendati pun posisi pemimpin dalam Islam memiliki derajat sama dengan orang yang dipimpin, karena ia memikul amanah yang diberikan oleh Allah serta rakyat yang dipimpinnya, tetapi masalah keberhasilan dan kesuksesan kerja dalam hal ini segala program yang dilakukan, ini tidak hanya berada di tangan seorang pemimpin semata, melainkan juga diikuti oleh rakyat dengan memberikan motivasi dan dukungan terhadap segala bentuk program yang di-planningkan pemimpinnya sesuai dengan syari'at (Islam).

Dengan begitu, masalah fungsi utama kepemimpinan dalam Islam adalah berkaitan erat dengan suksesnya segala program yang direncanakan berkonsepkan risalah Islam (al-Qur'ân dan Hadith). Fungsi lain kepemimpinan Islam dalam konteks eksternal dan internal yaitu: a. Menjalin kerjasama di antara organisasi Islam untuk kemudian secara bersama-sama pula berusaha menciptakan sebuah iklim yang memungkinkan melibatkan peran seluruh orang yang dipimpin ke arah pelaksanaan risalah Islam secara kâffah, serta perbaikan semua aspek kehidupan umat. b. Menciptakan calon-calon pemimpin umat yang beriman, beribadah, cerdas dan memiliki ketrampilan managerial yang multi etnik, hal ini tentu saja dapat ditempuh melalui pengkaderan dan didikan yang benar-benar berjiwa islami, supaya calon pemimpin itu benar-benar melaksanakan tugasnya bernaafaskan risalah Islam, bukan bermental munafik dan hipokrit, sebagaimana dikatakan oleh seorang pujangga Rusia yang mempunyai rasa kemanusiaan, yaitu Leo Tolstoy dalam bukunya *"The Law of Love and The Law of*

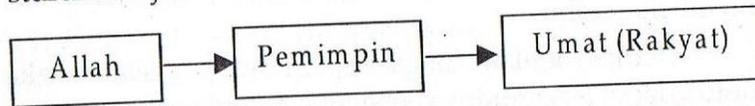
Violence" bahwa "Pokok utama dari buruknya organisasi dan (negara) sosial kita, ialah keimanan yang palsu (kemunafikan) atau diistilahkan juga dengan *"The principal cause of our bad social organization is false belief"*. Sisi lain, fungsi utama kepemimpinan Islam adalah menjadi pelindung bagi orang-orang yang dipimpinnya, membela hak mereka di samping membela nasibnya.

Memperhatikan fungsi kepemimpinan Islam, maka untuk dapat terwujudnya beberapa faktor tersebut seorang pemimpin hendaklah diberikan amanah memimpin dengan memiliki sifat lain, sifat dimaksud merupakan ciri ideal seseorang yang dijagokan sebagai pemimpin, berkaitan dengan hal tersebut, Mahmud Syeik Khaththab dalam bukunya *"Ar-Rasûl Al-Qaid"* menyebutkan sifat-sifat pemimpin itu hendaknya bercerminkan pada sifat dan sikap Nabi Muhammad:

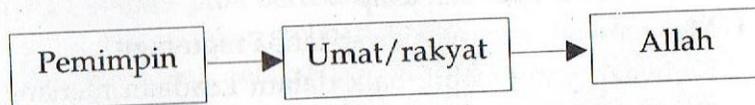
- a. Dapat memberikan keputusan yang benar dengan cepat.
- b. Memiliki kepribadian yang berani
- c. Berkemauan kuat dan tetap
- d. Mengemban tanggung jawab tanpa ragu-ragu
- e. Kejiwaan yang stabil, baik dalam keadaan menang maupun dalam keadaan kalah.
- f. Berpandangan jauh kedepan.
- g. Memahami kondisi kejiwaan bawahannya.
- h. Saling percaya.
- i. Kecintaan secara timbal balik.

Berkenaan dengan fungsi utama kepemimpinan Islam, dapat dipertegas bahwa eksistensi seorang pemimpin yang diangkat oleh rakyat sebagai pengemban amanah Allah dan pengemban amanah dari orang yang mengang-

katnya, fenomena pemimpin semacam ini dalam konsepsi Islam tentulah sangat kontradiksi dengan konsep teokrasi yang berangkat pada prinsip bahwa penguasa adalah bayangan Tuhan di muka bumi atau lazim disebut dengan wakil Tuhan bagi makhluk, hal ini tercermin dalam strukturnya:



Gambaran struktur di atas sangat berbeda dengan konsep Islam, di mana kepemimpinan atau pemerintahan atau kedaulatan atau istilah-istilah lain yang perlu didefinisikan kembali lebih jelas, menurut Dr. Jamaluddin Athiyyah adalah asli milik Allah. Adapun manusia diangkat sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi dan menegakkan syari'at Allah, untuk dapat terwujud hal itulah, jelas diperlukan seorang pemimpin [amir] yang mengatur mereka. Maka struktur kekuasaan menurut Islam adalah sebagai berikut:



Batas Ketaatan Terhadap Pemimpin Dalam Islam

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra dari Nabi Muhammad sesungguhnya beliau bersabda kepada Ka'ab bin Ajrah, "Semoga Allah menjauhkan kamu dari pemimpin yang bodoh." Ka'ab bertanya, "Siapakah pemimpin yang tolol itu, ya Nabi Muhammad?" Nabi Muhammad menjawab: "Yaitu para pemimpin sesudahku

yang tidak mau memberi petunjuk seperti petunjukku, tidak pula mau menerapkan syari'at (peraturan, undang-undang) seperti ajaranku. Barangsiapa membenarkan perilaku pemimpin tersebut dengan segala kebohongannya dan membantu segala perilaku zhalimnya, maka mereka bukan termasuk umatku dan aku terbebas dari mereka. Mereka tidak akan pernah mencicipi telagaku (di surga). Sebaliknya, barangsiapa tidak membenarkan segala kebohongan yang diperbuat pemimpin tersebut dan tidak pula membantu perilaku zhalimnya, maka mereka termasuk umatku dan aku pun meridhainya. Mereka akan minum air telagaku (di surga)".

"Ya Ka'ab, puasa itu pemisah api neraka, shadaqah adalah penghapus dosa, dan shalat itu adalah petunjuk." Maksudnya: "Wahai Ka'ab bin Ajrah, manusia itu terbagi dua golongan. Golongan pertama adalah mereka yang menjual dirinya (ke jalan Allah) maka ia akan selamat dari amuk api neraka. Sedang golongan kedua adalah mereka yang menjual dirinya (kepada hawa nafsu) maka nerakalah tempat tinggal mereka." (HR Ahmad).

Pertanyaan Ka'ab tentu saja sama dengan pertanyaan kita, siapakah pemimpin yang bodoh itu? Dengan tegas Nabi Muhammad menyampaikan bahwa pemimpin yang bodoh adalah mereka yang tidak menggunakan petunjuk dan aturan sebagaimana petunjuk dan aturan yang dipraktikkan Nabi Muhammad. Tegasnya, semua pemimpin yang tidak menerapkan syari'at Islam dalam praktik kepemimpinannya, maka mereka termasuk pemimpin yang bodoh.

Tolok ukur yang dipakai Nabi Muhammad cukup sederhana sehingga memungkinkan siapapun melakukan

klarifikasi, apakah pemimpinnya termasuk jahil atau tidak. Sehebat apapun kepemimpinan seseorang jika ia tidak menerapkan syari'at Islam, maka pemimpin tersebut di hadapan Allah dan Rasul-Nya tetap dinilai jahil alias bodoh.

Kebodohan dalam terminologi kepemimpinan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari aspek ideologis. Artinya, seseorang yang secara ideologis menolak Islam dan syari'atnya, maka ia termasuk jahil. Ketika memimpin, maka ia menjadi pemimpin yang jahil. Ketika penolakan itu dilakukan oleh suatu masyarakat, maka masyarakat itu disebut jahiliyah. Masyarakat Quraisy disebut jahiliyah bukan karena kebodohan (intelektual)-nya, tapi justru karena mereka menolak syari'at yang dibawa Nabi Muhammad. Dalam Islam, aturan, hukum, dan undang-undang yang tidak mengacu pada Islam adalah jahiliyah. Karena semua produk hukum yang meninggalkan syari'at disebut jahiliyah, maka selayaknya jika ditinggalkan. Para pemimpinnya dijauhi agar menjadi jelas yang haq adalah haq, sedangkan yang bathil adalah bathil.⁴⁰

Sikap kaum muslimin sangat jelas dalam hal kepemimpinan. Baik kepemimpinan bangsa maupun kepemimpinan organisasi, termasuk kepemimpinan partai politik. Jika kepemimpinan itu menolak syari'at Islam, maka tidak ada hubungan apa-apa dengan umat

⁴⁰ Tentang hal ini Allah menegaskan: Artinya: "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, padahal (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. al-Maidah: 50)

Islam. Artinya, umat Islam tidak boleh mengakui kepemimpinannya, tidak membenarkan pemerintahnya, juga tidak memberikan partisipasi dalam bentuk apapun kepadanya. Sebaliknya, jika suatu kepemimpinan itu menerima syari'at atau setidaknya tidaknya mendesakkan diberlakukannya syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka siapapun orangnya, dari mana pun asal-usulnya, harus dibantu dan didukung. Taat kepadanya merupakan kewajiban agama.

Kepemimpinan Islam Panutan

Dalam banyak sumber disebutkan, bahwa kepemimpinan Islam panutan merupakan sosok pemimpin yang memiliki beberapa karakteristik sebagaimana ditentukan dalam risalah Islam, dan beberapa karakteristik dimaksud seyogyanya dihiasi pada diri seorang pemimpin—ini berdampak terhadap suksesnya pola kepemimpinan yang dijalankan, di antara karakteristik itu adalah:

- a. Berpengetahuan
- b. Punya keberanian
- c. Bijaksana
- d. Adil
- e. Ikhlas
- f. Tidak mementingkan diri sendiri
- g. Tanggung jawab
- h. Dapat menjalin kerjasama yang baik.

Beberapa karakteristik tersebut merupakan modal utama yang dapat mengantarkan seorang pemimpin ke singgasana kepemimpinan yang berhasil (sukses), dan karakteristik tersebut itulah yang selalu dicerminkan oleh

Nabi Muhammad dalam kehidupannya yang wajib dicontohi oleh umatnya sekarang, di samping banyak lagi karakteristik lain. Oleh karena itu, berbicara tentang profil kepemimpinan Islam panutan, pada hakekatnya kita berbicara tentang profil Nabi Muhammad yang disinyalir sebagai manusia yang mampu menebarkan rahmat bagi sekalian alam, di mana rahmat ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga dirasakan oleh segenap makhluk Allah yang lain.

Berbicara tentang profil Nabi Muhammad sebagai pemimpin panutan, berarti kita berbicara tentang suatu nilai kepribadian yang sangat kompleks. Di samping Rasul sebagai pemimpin keluarga, juga memimpin masyarakat, bahkan beliau juga menjadi pemimpin di medan perang. Sebagaimana disebutkan S.H. Nasr yang dikutip EK. Imam Munawwir, bahwa keberadaan Rasul dalam kehidupan sosial, di samping sebagai ayah bagi anak-anak dan suami bagi isteri-isterinya, beliau juga kepala negara, hakim dan panglima perang yang silih berganti berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Tetapi semua tantangan dan rintangan itu beliau hadapi secara tegar, di mana hatinya senantiasa beristirahat dalam ketenteraman dan kepuasan terhadap yang Agung dan secara batin ia terus menerus mencari kedamaian yang abadi.⁴¹

Pernyataan di atas tersirat konsep yang begitu ideal bahwasanya pemimpin dalam pandangan Islam merupakan wakil dari umat, atau lebih tepatnya pegawai umat. Di antara hak yang sangat mendasar adalah wakil layak

⁴¹ EK. Imam Munawwir, *Asas-asas Kepemimpinan Dalam Islam*, Usaha Nasional, Surabaya, t.t., h. 183.

diperhitungkan atau perwakilan itu dicabut jika memang dikehendaki, terutama jika orang yang mewakili mengabaikan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakannya. Di sisi lain, pemimpin dalam Islam bukanlah seorang penguasa yang terjaga dari kesalahan. Tetapi dia merupakan manusia biasa yang bisa salah dan benar. Karena itulah, menjadi hak kaum muslimin untuk meluruskan pemimpin yang berbuat salah dan meluruskan kesalahannya itu.⁴²

Realita ini akan tampak bila kita ber-orientasi kepada profil pemimpin masa lalu yang menjadi nilai sejarah monumental pasca Nabi Muhammad yaitu profil kepemimpinan khulafa' al-râsyidîn. Mereka semua pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya benar-benar berlandaskan syari'ah (al-Qur'ân dan Hadith), mereka merupakan sosok pemimpin yang luwes dalam segala hal. Sehingga keberadaan umat Islam saat itu mampu memperoleh kejayaan secara *kâffah*. Hidup dialam ketenangan, keadilan-persamaan hak, dan semua individu dapat merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Misalnya saja profil Abu Bakar sebagai pemimpin pertama pasca Nabi Muhammad. Setelah beliau terpilih sebagai khalifah, dalam pidato pertamanya beliau berkata, "Wahai semua manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, pada hal aku bukanlah orang yang terbaik dari kalian. Jika kalian melihat aku berada di

⁴² Lihat Yusuf Al-Qardhawiy, *Min Fiqhid-Daulah Fil Islam*, Darusy-Syuruq, Cet-I, Cairo, 1997, (terjemahan: Fiqh Daulah Dalam Persepektif Al-Qur'an dan As-Sunnah), pen. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet- Keempat, 1999), h. 191.

atas kebenaran, maka tolonglah aku, dan jika kalian melihat aku berada di atas kebatilan, maka luruskanlah aku. Taatlah kepadaku selagi aku taat kepada Allah di tengah kalian, dan jika aku durhaka kepada-Nya, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk taat kepadaku”.

Hal serupa juga tampak pada diri ‘Umar ibn Kathab sebagai pemimpin kedua, tatkala ‘Umar menjadi khalifah pada bulan Agustus 634 M, dia mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan dari khalifah pertama, dia adalah khalifah yang saat ini mendapat rahmat dan mendapat *bai’at* dari masyarakat. Tugas yang dipikulnya memang lebih ringan dari pendahulunya, karena dia memiliki waktu dan kecakapan untuk melakukan konsolidasi, mengembangkan (*ekspansi*) serta memimpin negara baru menuju sebuah kekuasaan yang besar dan terhormat.⁴³ Setelah beliau terpilih menjadi khalifah, dalam pidatonya beliau juga berkata, “Wahai sekalian manusia, barangsiapa di antara kalian melihat penyimpangan pada diriku, maka hendaklah dia meluruskan aku”.

Menguatkan pernyataan di atas, Muhammad Husein Haikal sebagaimana dikutip Salim Ali Al-Bahsanawi menyatakan, khalifah ‘Umar yang dikenal dengan ketegasannya dalam menegakkan keadilan, berkata, “sesungguhnya aku setelah kekerasanku itu meletakkan pipiku di atas tanah untuk orang-orang yang menahan diri dari meminta-meminta dan menjaga kehormatan.

⁴³ Lihat Afzal Iqbal, *Diplomacy In Early Islam*, Qaumi Press, Lower Mall, Lahore, India, (terjemahan: Diplomasi Islam), pen. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cetakan-Pertama, 2000), h. 152.

Akan tetapi aku mempunyai kewajiban kepadamu sekalian yang dapat aku sebutkan, maka ambillah. Aku berkewajiban untuk tidak berpilih kasih sedikitpun terhadap hasil bumi kamu dan pemberian Allah kepadamu kecuali yang diwajibkan (*zakat*). Aku berkewajiban apabila aku membuat kalian kecewa mengembalikan hak-hakmu, aku berkewajiban untuk menambah pemberianku dan kesejahteraanmu Insya Allah, serta mengamankan tempat-tempatmu (dari musuh Allah), aku berkewajiban untuk tidak mencampakkan kalian dalam kehancuran dan menelantarkan kalian di tempat-tempat yang terancam. Jika kalian pergi dalam tugas (*melakukan jihad fisabilillah* atau yang lain), maka aku menjadi penanggung jawab keluarga kalian.” Kemudian berkata lagi, “Bertakwalah kepada Allah, bantulah aku untuk memimpin kalian, dan bantulah aku dalam memimpin *beramar makruf nahi munkar* dan memberi nasehat dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas yang diberikan Allah kepadaku untuk mengurus kalian”.⁴⁴

Sistem Penetapan Pemimpin Dalam Islam

Selanjutnya Ibnu Taimiyyah mengemukakan, untuk mencapai pemimpin yang diinginkan Islam, maka hal itu harus dipilih yang paling dekat dengan tujuan. Dia kemukakan tentang pemimpin shalat, maka dipilihlah

⁴⁴ Lihat Muhammad Husein Haikal *Al-Faruq Umar*, dalam Salim Ali Al-Bahsanawi, *Asy-Syari’ah Al-Muftara ‘Alaiha*, Dar Al-Wafa’ Al-Manshurah, Mesir, Cet-Pertama, 1995, (terjemahan: Wawasan Sistem Politik Islam), pen. Mustolah Maufur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet-Pertama, 1996), h. 136.

orang yang memenuhi syara-syarat seperti kata Nabi Muhammad: "Orang yang akan mengimami suatu kaum adalah orang yang paling ahli membaca Kitab Allah, maka bila mereka dalam bacaannya itu sama, maka yang lebih alim (tahu) tentang Sunnah Rasul; apabila mereka tentang Sunnah adalah sama, maka hendaklah diangkat jadi imam orang yang lebih dahulu pergi hijrah; jika mereka hijrahnya sama, maka hendaklah diangkat orang yang lebih tua umurnya. Dan janganlah seorang terlalu percaya kepada orang lain yang sedang berkuasa, dan tidak boleh ia (seseorang itu tadi) duduk di (atas kursi) rumahnya (tuan rumah) kecuali dengan izinnya."

Apabila antara dua orang masih terdapat sama mahir dan patutnya, sulit ditentukan mana yang lebih mahir di antara keduanya, maka diadakan undian untuk memilih keduanya. Hal itu pernah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqash dalam peperangan Qadisiyah, ketika mereka bertikai tentang siapakah yang akan adzan untuk memanggil orang melaksanakan shalat berjama'ah, karena hendak mengamalkan sabda Nabi Muhammad:

"Sekiranya mereka mengerti akan kelebihan adzan dan saf pertama, kemudian mereka tidak menemukannya kecuali setelah diadakan undian untuk itu, maka mereka pun melakukan undian dengan menggunakan panah." Apabila orang-orang yang akan menjalankan perintah Allah itu telah tersusun, tetapi untuk melaksanakannya memerlukan undian, maka berarti pula pemimpin telah memberikan amanah itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi kepemimpinan di dalam Islam dipilih dari segi bobot atau kualitas yang kaitannya dengan penyelenggaraan kepemimpinan, yaitu melaksanakan

aturan-aturan Allah di masyarakat. Seleksi bobot itu dipilih yang paling memadai, dan apabila ada dua orang yang sama bobotnya maka harus diundi. Kepemimpinan pada jenjang-jenjang berikutnya pun juga seperti itu.

Meskipun demikian, dalam hal kepemimpinan tidak boleh bersikap seperti orang yang ingin meraih shaf pertama dalam shalat. Karena masalah kepemimpinan merupakan amanah yang memikul tanggung jawab berat. Nabi Muhammad menjelaskan kepada Abu Dzar Al-Ghifari: "*Bahwa (kepemimpinan) adalah suatu amanah, dan ia di hari kiamat akan menjadi kerugian dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan cara yang haq, serta menunaikan kewajiban yang terpikul di atas pundaknya.*" (HR Muslim).

Bahkan Nabi mengemukakan ancaman: "*Tidaklah seorang pemimpin yang dituntut Tuhan supaya memimpin rakyatnya, yang ia mati karena sampai ajalnya, sedangkan ia telah melakukan kecurangan dalam kepemimpinannya itu, kecuali Allah mengharamkan surga baginya.*" (HR Muslim).

Karena pentingnya bobot dan tanggung jawab bagi pemimpin, dan kepemimpinan itu berkaitan dengan perbaikan rakyat dan bahkan nasib mereka di akhirat, maka para ulama memutuskan ada orang-orang yang tidak dibolehkan jadi pemimpin tertinggi (kepala negara), yaitu: a. Orang wanita. b. Orang kafir. c. Anak kecil yang belum sampai umur. d. Orang gila.

Imam Al-Mawardi sebagaimana disebutkan dalam kitabnya "*Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*" halaman 5-7 sebagaimana dikutip Rafi Munawwir, bahwa syarat-syarat pemilih dan yang dipilih ada tiga. 1. Adil. 2. Pemilih harus benar-benar memahami kondisi serta dedikasi orang yang akan dipilih menjadi pemimpin. 3. Al-Ra'yu (pendapat yang

jiu) dan hikmah, artinya; ini diberlakukan tatkala ada calon yang sama baiknya.⁴⁵

Hak dan Tanggungjawab Pemimpin Menurut Islam

Seorang imâm wajib bersifat ma'shum, terpelihara dari perbuatan dosa dan kesalahan, karena seorang yang tidak maksum tidak dapat dipercaya sepenuhnya untuk diambil darinya prinsip-prinsip agama maupun cabang-cabangnya. Oleh karena itu meyakini bahwa ucapan seorang imâm ma'sum, perbuatan, dan persetujuannya, adalah hujjah syar'iyah, kebenaran agama, yang mesti dipatuhi. Yang dimaksud dengan persetujuan imam maksum atau *taqrir al-Ma'shum* ialah sang imâm tidak menegur suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai Islam yang berlangsung di hadapannya, bahkan ia membiarkannya saja.

Dalam hal ini seorang imâm tidak membawa syari'at baru. Kewajibannya hanyalah menjaga agama Islam, memperkenalkan, mengajarkan, menyampaikan dan membimbing manusia kepada ajarannya yang luhur. Seorang imâm harus menguasai dan memiliki pengetahuan yang utuh terhadap semua pokok agama Islam, cabang-cabangnya, hukum, peraturan, dan tafsir Al-qur'ân. Pengetahuan ini bersifat rabbani, suci dan didapat dari Nabi Muhammad, supaya sang imâm mendapat kepercayaan penuh dari umat dan dapat diandalkan dalam memahami hakikat Islam.

⁴⁵ Rafi Munawwir, *Sukses Dalam Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi*, Al-Muslimun (Majalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam), Nomor: 306, September 1995, h. 87-88.

Dengan demikian, keimamam para imâm ma'sum tidak diperoleh melalui pemilihan rakyat. Kepemimpinan dalam masyarakat manusia terdiri dari dua kelompok yaitu pemimpin dan yang dipimpin. Secara teorinya, orang yang dipilih menjadi pemimpin biasanya memiliki kualitas yang lebih baik daripada orang yang dipimpin. Sebagai agama, Islam menilai martabat insan berdasarkan amal manusia yang berbentuk fardu 'ain (yang bersifat pribadi dan wajib untuk dirinya) dan fardu kifayah (yang bersifat kemasyarakatan dan wajib untuk semuanya). Pelaksanaan amal itu dilandasi oleh lima kategori yaitu wajib, sunat, mubah (harus), makruh dan haram.

Berteraskan kriteria ini, wujud kesinambungan (*tawazun*) di antara otoritas dan wibawa pemimpin di satu pihak dengan kesetiaan dan kerjasama yang dipimpin di pihak lain. Ini bermakna kepemimpinan Islam berhak mendapat: a. Kesetiaan (*wala'*) daripada ahli-ahli. b. Ketaatan daripada ahli-ahli. c. Nasihat dan pembetulan dari ahli-ahli jika bersalah.

Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang maksudnya: "Allah menjadi ridha kepada kamu dalam tiga perkara; (pertama) bahwa hendaklah kamu sembah Dia dan sekali-kali jangan kamu sekutukan Dia dengan sesuatu. (Kedua), bahwa kamu berpegang teguh semuanya kepada tali Allah dan jangan kamu berpecah-belah. (Ketiga), hendaklah kamu menasehati orang-orang yang ditakdirkan Allah menjadi pemimpin kamu".

Sementara itu yang menjadi tanggungjawab utama yang wajib dilakukan oleh pemimpin ialah, mentaati Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Pemimpin mesti dipimpin oleh iman, ilmu

dan amal supaya tidak terjerumus melakukan segala macam perbuatan jahat, mengikut tuntutan hawa nafsu dan lebih mengutamakan keuntungan dunia yang sementara. Ibn Taimiyah mengingatkan, pemimpin yang tidak dipimpin oleh iman, ilmu dan amal akan dikuasai oleh sifat tamaknya, yang akan melahirkan dua kesan yaitu kikir dan dengki.

Bermusyawarah dengan orang yang dipimpin dan segala urusan dan permasalahan. 'Umar ibn al-Khattab berkata: "Aku telah menyeru kamu sekalian tidak kecuali kamu bersama-samaku untuk memikul beban amanah yang telah diberikan kepadaku. Aku hanya salah seorang daripadamu, dan hari ini kalianlah manusia yang mempersaksikan kebenaran ini. Siapa beda pendapat denganku mereka boleh berbuat demikian. Dan siapa yang setuju denganku mereka boleh juga berbuat demikian. Aku tidak akan memaksa kalian untuk tunduk kepada keinginan-keinginanku".

Berlaku adil dalam seluruh tindakan. Jika keadilan ditegakkan, segala bentuk kezaliman, penindasan dan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dapat dielakkan. Di samping itu, tugas dan kewajiban lain pemimpin yaitu mengarahkan orang yang dipimpin menuju keridhaan Allah. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dalam jama'ah yang paling kecil sekali pun hingga kepada jama'ah yang lebih besar. Melaksanakan kepemimpinan melalui teladan supaya mampu menjadi *qudwah* sekaligus memberi contoh teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Membina hubungan yang rapat dengan orang yang dipimpin yang berasaskan kepada nilai-nilai kemanusiaan,

timbang rasa dan dilakukan kerjasama yang intim. Setiap interaksi dalam sebuah komunitas baik kecil maupun besar harus mencerminkan pengabdian diri kepada Allah dan penghayatan status dirinya sebagai khalifah di muka bumi.

Melatarbelakangi pada uraian di atas, secara tegas dapat dinyatakan bahwa dasar utama perlunya diangkat pemimpin dalam Islam yang berlandaskan iman, amal dan akhlaq di antaranya: *Pertama*. Membentengi eksistensi risalah Islam dari segala bentuk rongrongan dan kecaman. *Kedua*. Melindungi umat Islam dan segenap populasinya untuk senantiasa berada dalam bingkai keseragaman iman, visi dan misi. *Ketiga*. Mengayomi umat Islam agar selalu berada di bawah payung persaudaraan dan persatuan, agar keberadaan mereka tetap utuh dan kuat di sepanjang waktu dan zaman.

Tiga faktor tersebut di atas mengingatkan kembali terhadap firman Allah yang disebutkan di surat Ar-Rûm ayat 31-32: *Artinya: "... janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka"*. Ayat di atas, menurut Muhammad Faiz Al-Math dipahami, bahwa perpecahan sebagaimana disinyalir di situ termasuk dosa besar.⁴⁶ Sebab, dengan perpecahan itu menjadikan umat Islam lemah, hal ini berdampak, dimana umat Islam dengan mudah dijadikan bulan-bulanan oleh

⁴⁶ Muhammad Faiz Al-Math, *Min mu'jizat Al-Islam*, Darul Basyir, Beirut, Cet-I, 1990 M. terjemahan: keistimewaan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, cetakan kedua, 1995), h. 119.

umat non-Islam, kenyataan ini terbukti di saat khalifah al-Râsyidîn berakhir, dan tampuk kepemimpinan dipegang oleh Bani Umayyah dan Abbasiyah serta masa-masa selanjutnya.

Karena itulah, menurut Muhammad Faiz Al-Math. Islam mewajibkan umatnya untuk memilih dan mempunyai pemimpin yang dipilih sendiri oleh umat Islam. Di samping ada tuntutan, bahwa *bai'at* terhadap pemimpin yang telah dipilih merupakan suatu kewajiban, begitu halnya dengan keta'atan mereka terhadapnya, ini juga satu kewajiban yang tidak boleh dilanggar, kecuali pemimpin itu dalam menjalankan kepemimpinannya tidak lagi sesuai dengan nilai syara' yang berlaku.⁴⁷

Kendatipun seorang pemimpin telah menunaikan beberapa kewajiban sebagaimana disebutkan, bukan berarti proses kepemimpinannya itu telah selesai, akan tetapi banyak hal lain yang sangat umum sekali perlu diperhatikan sebagai tugas pokok dirinya sebagai pemimpin, dimana seorang pemimpin itu memiliki tugas mewujudkan rahmat, kebaikan, keselamatan dan keadilan, baik jasmaniah maupun rohaniyah.⁴⁸

Penjabaran dari beberapa tugas pokok yang disebutkan, Dhiya'uddin Al-Rayis sebagaimana dikutip Bustanuddin Agus, berkaitan dengan hal itu, beliau mencantumkan tiga kaidah yang wujudkan oleh seorang pemimpin diwilayah pemerintahan Islam, yaitu: 1. mewujudkan keadilan, keadilan di sini sifatnya menye-

⁴⁷ Muhammad Faiz Al-Math, *Keistimewaan ...*, h. 120.

⁴⁸ Bustanuddin Agus, *Al-Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan pertama, 1993), h. 136.

luruh, yaitu kesetaraan rakyat di hadapan hukum, keadilan dalam hal kemakmuran serta keadilan bagi kaum minoritas non-muslim (*kafir zimmi*) yang hidup di wilayah Islam dan tidak pernah mengganggu kehidupan umat Islam. 2. menjalankan pemerintahan dengan sistem musyawarah. 3. pemimpin harus bertanggung jawab dari tiap kebijakan yang ditempuh kepada rakyat dan kepada Allah.⁴⁹

Di samping yang telah disebutkan, tugas dan fungsi lain para imam (pemimpin) bagi kehidupan umat Islam terlihat dari eksistensi manusia itu sendiri sebagai sosok yang dalam proses perjalanannya memiliki tujuan hidup, dalam proses perjalanan tersebut tentu saja banyak hal atau kendala-kendala yang pasti dihadapi oleh manusia itu sendiri. Justeru karena itu, Allah Dzat Yang Maha Sempurna, adalah tempat yang dituju oleh semua manusia. Mustahil manusia akan berhasil tanpa adanya tuntunan seorang imam, seorang yang bisa men-tarbiyah dan melepaskan mereka dari kedhaliman serta kesesatan. Hanya insan yang berorientasi kepada ajaran Ilahi dan di dalam hidayah Ilahi yang dapat menghidayahi mereka.

Di samping hal tersebut, fungsi dan tugas lain pemimpin (imam) untuk dapat memelihara Syari'at Islam. Ajaran Islam merupakan ajaran samawi yang sempurna untuk dapat memberi nilai kehidupan dan bimbingan rohani. Tapi manusia di alam ini, bukan lahan yang sempurna sehingga dapat tumbuh dan dijalankan

⁴⁹ Muhammad Dhiya'uddin Al-Rayis, *An-Nazhariyat al-Siyasah al-Islamiyah*, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, 1976, h. 325-344. Dalam, Bustanuddin Agus, *Al-Islam ...*, h. 137.

dengan sempurna pula. Kenyataan ini akan menyebabkan penyimpangan dan penyelewengan, sehingga dapat meninggalkan kemurnian dan keutamaan. Sehingga hilanglah fungsi penghidayahan manusia secara umum.

Kepemimpinan umat dalam segi sosial politik. Sistem sosial dan pemimpin merupakan dua unsur yang kuat untuk tercapainya bentuk kehidupan sosial yang ideal. Pemimpin yang memenuhi persyaratan yang sempurna adalah personal yang dapat berjalan dalam sistem untuk sampai pada tujuan. Masyarakat ideal islami adalah masyarakat yang dipimpin oleh aturan islami; di mana telah menjadi keperluan fitrah manusia untuk selalu menghindari dari penyimpangan, memelihara hak individu, menentukan langkah dan sistem untuk mencapai tujuan mulia, serta mempersiapkan dan melengkapi pertahanan yang dinamis dalam masyarakat untuk tetap menjamin kemerdekaan dalam kehidupannya.

Manusia yang sudah biasa melakukan dosa dan kesalahan, tidak akan mampu mengemban risalah yang mulia itu. Allah memilih seorang imâm yang sempurna (tidak dhalim) agar tampil dengan kesempurnaannya untuk dapat merealisasikan Risalah Ilahi, membangkitkan umat untuk taat serta meluruskan pemikiran mereka dari penyelewengan yang ada. Meluruskan penyimpangan hujjah. Seorang imâm akan memberikan dalil/hujjah yang benar sehingga penyelewengan akan terhenti. Ia juga menyajikan pemahaman yang benar terhadap orang yang belum mengerti, menenteramkan serta mengukuhkan hati orang yang sudah mengerti dan memahami.

Sifat Pemimpin Dalam Islam

Sebagaimana dipahami, bahwa kepemimpinan dalam Islam memegang peran dan fungsi utama yaitu, bagaimana cara yang dilakukan seorang pemimpin itu di dalam memandu, menuntun, membimbing, membangunkan motivasi kerja serta mengemudikan dan menjalin hubungan komunikasi yang baik di samping memberikan pengawasan yang efisien. Dan yang paling penting, seorang pemimpin itu mampu mengarahkan pengikutnya kepada sasaran yang akan dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.⁵⁰

Syaikh Muhammad Khadhiri seorang penulis Mesir modern dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* sebagaimana dikutip Salim Azzam mengatakan bahwa "Karena memberi perintah adalah hak istimewa Allah semata, maka tidak ada yang berhak memberi perintah selain Dia. Hal ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh semua muslim".⁵¹ Sebagaimana dikatakan Kayid Yusuf Mahmud Qar'usy, dalam kitabnya *Thuruq Intiha' Wilayah al-Hukkam fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Nuzhum al-Dusturiyyah*, yang dikutip Hibbah Rauf Izzat yang mengatakan, bahwa kekuasaan khalifah tidaklah mutlak, tetapi terikat dengan syari'at dan syûra. Oleh sebab itu, jika khalifah tidak memiliki komitmen terhadap syari'at, meninggalkan syûra sebagai prinsip dasar Islam serta melakukan kezaliman, untuk kondisi ini umat wajib melakukan suatu tindakan tanggung jawab politik bagi

⁵⁰ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali, 1983, h. 6.

⁵¹ Kartini Kartono, *Pemimpin ...*, h. 91.

khalifah dan menurunkannya dari jabatan. Selanjutnya meminta kembali kekuasaan tersebut untuk diberikan kepada yang lain.⁵²

Justeru karena itu, jika seorang pemimpin telah yakin akan keesaan dan kekuasaan Allah yang juga merupakan merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para Rasul. Dari sinilah filsafat politik Islam mengambil titik pijak. Di mana prinsip dasar Islam bahwa semua makhluk manusia, baik secara individual maupun kolektif harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan Allah, dan tidak seorang pun diperkenankan memberikan perintah atau aturan-aturan sekehendaknya sendiri dan tidak seorang pun juga diperkenankan untuk mengakui kewajiban untuk melaksanakan perintah semacam itu.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, untuk terwujudnya intensitas pemimpin secara menyeluruh dalam kehidupan umat, di samping memiliki tugas membangun kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik dalam konteks keseragaman keyakinan dan persepsi mengikut pada nilai syari'ah yang ditetapkan, maka suatu keharusan bagi umat Islam sekarang memilih dan mengangkat para pemimpin itu dari kalangannya sendiri (satu ikatan akidah) bukan dari kalangan orang-orang kafir, tuntutan semacam ini, bukan berarti Islam bersikap dikhotomi terhadap sesama, tetapi kebijakan yang ditempuh oleh umat Islam mengangkat

⁵² Hibbah Rauf Izzat. *Wanita ...*, h. 121.

⁵³ Abul A'la Al-Maudûdî, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Hukum dan Konstitusi Politik, pen. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, Cetakan VI, 1998), h. 156-157.

pemimpin dari kalangannya sendiri, ini ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'ân.

Ketegasan ini juga berlaku bagi umat Islam yang hanya berlabelkan Islam, terhadap kondisi umat Islam semacam ini, dengan tegas Allah memperingatkan dalam al-Qur'ân sebagaimana disebutkan di surat Al-Maidah: "*pemimpin kalian hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengerjakan shalat dan membayar zakat dan mereka itu adalah orang-orang ruku'. Dan barangsiapa yang mengambil Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman menjadi pemimpin, maka sesungguhnya merekalah orang-orang yang menang*".

Tentang larangan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang kafir, dengan tegas pula Allah memberikan kecaman sebagaimana disebutkan di surat 'Alî Imran ayat 28:

Artinya: "Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin, siapa yang melakukannya, maka Allah sangat membencinya". Di surat yang lain Allah menyatakan: "*Orang-orang yang mengangkat orang kafir menjadi pemimpin selain orang yang beriman, adalah mereka mengharapkan kekuasaan daripada mereka? Sesungguhnya segenap kekuasaan itu kepunyaan Allah*".

Ketegasan Allah di surat An-Nisa' mengandung nilai peringatan kepada umat Islam, Agustiono yang mengutip pendapat Azyumardi Azra, berkaitan dengan ayat di atas beliau memberikan kesimpulan, bahwa larangan ayat di atas merupakan suatu kewajiban yang wajib dita'ati, dan bila dilanggar maka pelakunya bisa menjadi fasiq, maka sangat berdosa besarlah bagi umat Islam yang memilih dan menjadikan pemimpinnya bukan orang Islam yang beriman

yang telah jelas menghalangi aspirasi dan eksistensi umat Islam itu sendiri.⁵⁴

Untuk itu, supaya kehidupan umat Islam dapat berjalan sesuai dengan proporsi yang digariskan dalam ideologinya (al-Qur'ân dan Hadith), maka imâm atau pemimpin yang diangkat di tengah-tengah umat Islam hendaknya memenuhi beberapa syarat dan sifat yaitu sebagai berikut:

Pertama. Tidak Dhalim. Sebagaimana dinyatakan al-Qur'ân bahwa janji imâmah dari Allah tidak diberikan kepada orang yang dhalim. Dhalim dalam artian yang luas. Baik dhalim dalam artian pelanggaran syari'at, atau mendhalimi diri-sendiri atau orang lain. Seorang pemimpin spiritual yang membawa amanah Ilahi harus mampu meyakinkan hati manusia sehingga dapat menjalankan perintah dan larangannya. Barang siapa yang berada pada kedhaliman atau dosa mustahil akan dapat menyinari umat dengan cahaya kebenaran. Atau, mustahil Allah memilih orang yang seharusnya mengajak kepada taat tapi dirinya sendiri bermaksiat. Maka mustahil pula kita diwajibkan taat kepada orang yang bermaksiat kepadanya.

Kedua. Memiliki Ilmu yang Luas (Paling Alim). Tugas imâmah adalah menuntun dan men-tarbiyah manusia untuk berada pada rahmat Ilahi. Padanya terdapat ilmu Ilahi, kepandaian, pemahaman akan kitab-Nya serta hikmah. Semua keperluan keilmuan untuk

⁵⁴ Agustiono, *Konsep Al-Qur'an Tentang Pimpinan Politik*, Harian Waspada, 6 Juni, 1999.

membimbing dan bukti kekuasaan Allah wajib ada pada dirinya. Mustahil seorang imâm masih memerlukan bimbingan dari orang lain untuk kepemimpinannya, atau masih perlu pendapat orang lain dalam menentukan sesuatu, karena kurangnya pengetahuan dalam pencapaian tujuan kehidupan ini.

Ketiga. Memiliki Keberanian. Imâm bukan hanya menjadi pemimpin dalam keadaan damai. Tapi imâm adalah pemimpin dalam semua keadaan (damai dan perang). Maka keberanian merupakan keharusan baginya. Allah memerintahkan hanya harus takut kepada Diri-Nya. Ketakutan, walaupun terhadap diri-sendiri pun tidak dibenarkan, apalagi ketakutan kepada musuh Islam.

Keempat. Zuhud dan Merdeka. Imâm adalah orang yang tidak memiliki keterikatan dengan kehidupan dunia. Tidak mengejanya, apalagi dikuasai oleh dunia. Orientasi maknawi bahwa akhirat adalah lebih utama. Dengan begitu seorang imâm akan memerdekakan dirinya dari ikatan materi. *Kelima.* Berakhlak Mulia. Tugas imâm adalah menaikkan derajat kemampuan dengan akhlak yang sempurna. Dia juga bertugas bahwa orang akan melihatnya sehingga keberadaannya merupakan pelajaran yang langsung dapat dicontoh. Dalam Surat 'Alî Imrân ayat 159 dinyatakan bahwa perilaku yang lemah lembut dari pemimpin merupakan pengikat, sehingga umat tidak lari darinya.

Oleh sebab itu, untuk terealisasinya beberapa hal tersebut, maka pemilihan dan pengangkatan pemimpin dalam Islam benar-benar melalui proses seleksi secara tepat dan benar, ini memiliki tujuan supaya pemimpin

dalam realita nantinya tidak menjadikan jabatan kepemimpinannya yang bersimbulkan Islam sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berbicara tentang proses seleksi yang tepat terhadap jabatan pemimpin, secara detail Islam menawarkan beberapa kriteria yang perlu dipedomani yaitu sebagai berikut:

a. Seorang pemimpin memiliki nilai takwa yang tinggi

Kriteria pertama dalam penjabarannya sangat luas sekali, di mana seorang pemimpin itu senantiasa dituntut untuk mencari ampunan Allah, artinya senantiasa bekerja mencari ridha Allah serta sesuai pula dengan perintah Allah:

1. Suka menafkahkan sebagian harta bendanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dengan jalan memberikan makan fakir miskin, anak yatim serta sumbangan di jalan Allah.
2. Sanggup menahan amarahnya
3. Senantiasa memaafkan kesalahan orang lain
4. Berbuat baik, pemaaf, jujur dan adil

b. Seorang pemimpin memiliki wawasan etika Qur'âni

Berkaitan dengan kriteria kedua tersebut, penjabarannya itu hendaklah dipedomani pada sirah kehidupan Nabi Muhammad sebagai manusia agung yang dipilih oleh Allah untuk umat manusia, di samping sebagai Rasul yang diberikan tugas membumikan Al-Qur'ân sebagai risalah samawi terakhir di tengah kehidupan manusia, Nabi Muhammad juga seorang pemimpin yang paling tangguh dan efektif. Segalam macam kualitas yang diperlukan untuk tampil sebagai figur pemimpin terhimpun pada diri beliau. Maka

referensi terhadap diri beliau yang tersirat beberapa sifat wajib merupakan suatu yang sangat tepat. Di antaranya:

Shiddiq (benar)

Yang dimaksud dengan sifat shiddiq (benar) pada diri Nabi Muhammad adalah benar dalam setiap perbuatan dan perkataannya, mustahil Rasul itu berkata dusta, karena Rasul merupakan sosok manusia pilihan yang memiliki keistimewaan universal dan sebagai pengemban risalah untuk selalu dipedomani serta wajib diikuti oleh semua manusia. Dalam al-Qur'ân Allah menyebutkan yang artinya: *"Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan mereka (manusia) tidak mengetahuinya"*. Qur'ân surat Saba' : 28.

Al-Amanah (jujur/terpercaya)

Terkait dengan amanah/jujur dan terpercaya, seorang Rasul sangat mustahil melakukan pengkhianatan, baik terhadap manusia lebih lagi terhadap Allah. Dia wajib menunaikan amanah yang telah diterimanya, wajib berlaku jujur sekalipun perbuatan dan sikapnya itu harus ditebus dengan jiwa raganya. Firman Allah yang artinya: *"... dan Kami (Allah) turunkan Al-Kitab (Al-Qur'ân) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri"*. Qur'ân surat An-Nahlu : 89.

Tabligh (penyampaian)

Seorang Rasul sebagai manusia pilihan yang diutuskan oleh Allah untuk manusia, mustahil menyembunyikan segala sesuatu yang telah diberikan kepadanya tentang

kebenaran ayat-ayat Allah, segala perintah dan larangan Allah wajib disampaikan, dan tidak lupa sepotong ayat pun demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Meskipun pada saat penyampaian dihadang oleh berbagai macam kendala dan penyampaian itu dilaksanakan dengan risiko yang tinggi bagi keselamatan dirinya, tetapi dalam kondisi dan situasi apapun segala yang benar itu wajib disampaikan. Firman Allah yang maksudnya: "... maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya". (Qur'ân surat 'Alî-Imran : 20).

Fathanah (cerdas atau pintar)

Dalam sifat ini, seorang Rasul mustahil sebagai manusia yang kurang cerdas ataupun lemah akal—tetapi dia wajib memiliki potensi akal dan daya pikir serta punya kapasitas (kemampuan) rasio yang tinggi sebagai seorang utusan Allah dalam arti sosok manusia yang diistimewakan.

Berdasarkan uraian di atas, suatu yang sangat tepat bila dikatakan bahwa beberapa kriteria tersebut perlu digarisbawahi oleh umat Islam dalam menetapkan calon pemimpin di tengah kehidupannya. Karena, dengan ketetapan tersebut akan mampu melahirkan sosok pemimpin panutan bangsa, bukan bertipekan golongan dan umat.[]

BAB IV

KEPEMIMPINAN DAN PEMERINTAHAN ISLAM : Tinjauan Al-Qur'ân Dan Hadith

Kepemimpinan dan Pemerintahan dalam Islam

Islam satu-satunya agama terakhir diturunkan oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia yang ajarannya mengatur seluruh aspek kehidupan baik menyangkut masalah pribadi maupun masyarakat dengan cita utama mengarahkan manusia untuk perbaikan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kesemua itu selalu menjadi sentral pembicaraan Islam. Tidak terkecuali dengan system perpolitikan suatu bangsa yang di dalamnya dibicarakan seputar pemimpin dan pemerintahan.

Tema pemimpin dalam kenyataannya telah menjadi suatu tema yang hangat dibicarakan sekarang, dalam pandangan agama Islam, pemimpin yang sering diistilahkan dengan imam atau khalifah ternyata menyimpan sebuah kemisteriusan dan perlu kepada kajian lebih mendalam, sebab masalah khalifah yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'ân sebagai wakil Allah dibumi yang

tugasnya mengatur, membina dan sejenis dengannya—ini merupakan amanah Allah yang paling berat yang harus dipikul, berbicara masalah amanah juga berbicara pada kronologi sejarah yang paling spesifik. Ini disebutkan di dalam al-Qur'ân di surah al-Ahzab ayat 72.⁵⁵

Terkait dengan pemimpin sebagai pengembal amanah dari Allah—maka tugas dan tanggung jawab utama sebagai orang yang diberikan amanah (kepercayaan) dapat melaksanakan aturan atau undang-undang Allah seperti tersimpul dalam risalah Islam. Dengan demikian, kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang punya tugas dan tanggung jawab merealisasikan segala aturan Allah di lingkungan masyarakat yang dipimpin terkait di semua sisi kehidupan.

Dari itu jelas bahwasanya keberadaan pemimpin di tengah-tengah umat Islam telah menjadi suatu yang sangat menentukan, berhasil atau tidaknya sebuah sistem hidup masyarakat yang diikat oleh nilai-nilai Islam sangat terkait dengan pemimpin di tengah-tengah mereka.

Supaya sistem hidup masyarakat benar-benar berteraskan nilai Islam, maka Islam sebagai agama yang hanif telah mengharuskan umatnya agar pemerintahan yang dibangun itu tegak diatas kaidah sistem sosial yang telah digariskan oleh Allah untuk manusia. Allah tidak akan

⁵⁵ Dalam surah tersebut Allah menyatakan, *"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia"*. Penjelasan lebih lanjut tentang amanat ini dapat dilihat dalam tafsir Ibn Katsir pada halaman 23.

membiarkan umat Islam hidup tanpa pemimpin. Justeru karena itu, pengangkatan imam (pemimpin) hukumnya wajib berdasarkan akal, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pengangkatan imam atau pemimpin tersebut wajib berdasarkan syari'at. Sebab, tanpa seorang imam manusia akan berada dalam keadaan yang kacau dan tidak diperhitungkan oleh bangsa lain.

Untuk itu, telah menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam punya pemimpin di antara mereka. Terkait dengan sinyalimen ini Rasulullah bersabda dengan maksud: *"Jika kamu berada di suatu negeri yang tidak ada pemimpin di dalamnya, maka tinggalkanlah negeri itu"*. Dalam Hadith yang lain Rasulullah bersabda dengan maksud: *"Apabila keluar tiga orang dalam suatu perjalanan, hendaknya salah seorang mereka itu dijadikan pemimpin"*. Mencermati sabda Rasulullah tersebut, kian jelas bagi umat Islam, bahwa kehadiran dan pengangkatan pemimpin begitu urgen bagi keberlangsungan sebuah komunitas sosial umat Islam yang dibentuk, atau dalam suatu kegiatan yang terstruktur, karena imam atau pemimpin diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, oleh sebab itu profil pemimpin yang dipilih hendaknya seorang yang terbaik diantara manusia, yaitu orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Sebaliknya orang kafir dan fasiq atau umat Islam sendiri yang tidak komitmen dan konsisten dengan Islam, model mereka ini tidak boleh dijadikan pemimpin oleh umat Islam.

Apa yang diutarakan di atas muncul suatu indikasi bahwa kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, telah menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan umat. Jika demikian posisinya, maka membangun sebuah negara

dengan pemerintah yang berteraskan nilai-nilai Islam juga menjadi suatu keniscayaan pula. Seperti yang dikemukakan Abul A'la Al-Maudûdî, Karakteristik lain negara Islam sekaligus pemerintahan Islam adalah, bahwa ia merupakan negara ideologis yang berlandaskan pada sebuah konstitusional ideologis yaitu al-Qur'ân, dan bertujuan untuk menegakkan ideologis tersebut.⁵⁶

Al-Qur'ân merupakan hudan atau rambu-rambu bagi umat Islam yang kandungan isinya memuat semua aturan hidup yang wajib dipegangi oleh setiap insan agar kebahagiaan, kesejahteraan sebagai suatu tujuan hidup manusia tercapai, di samping itu al-Qur'ân juga memuat seperangkat aturan yang terkait erat dengan sistem pembinaan masyarakat dan pembentukan pribadi manusia yang paripurna. Hal ini dinyatakan di surah Alî 'Imran ayat 102-104:

يَتَّيِبُهَا لِيَوْمٍ تَكُونُونَ فِيهِ أَبْرَارًا أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ أَنْ تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِهِ كَانُوا غَافِلِينَ ﴿١٠٢﴾ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

⁵⁶ Sayyid Abul A'la Al-Maudûdî, *The Islamic Law and constitution*, (Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam), (Bandung: Mizan, cetakan pertama, 1990, h. 166.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam (102). Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.(103). Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.(104)"

Ayat di atas memberi isyarat tentang pentingnya pembentukan pribadi muslim dan jamâ'ah islamiyah dalam rangka mewujudkan ummah yang diharapkan.⁵⁷ Selanjutnya konsep yang ditawarkan oleh Imanuddin Khalil dalam bukunya *Al-Hijrah wa Al-Harakah*, beliau melukiskan bahwa tiga fase yang harus dilalui kaum muslimin dalam rangka pembentukan ummah ini, pertama, tegaknya Islam dalam skop kemanusiaan (*da'irah insanîyah*), kedua, tegaknya Islam dalam skop Negara, (*da'irah dawlah*), ketiga, tegaknya Islam dalam skop peradaban (*da'irah hadrah*).

⁵⁷ Abu Ridha, *Ummah dan Perubahan Tata Sosial Politik*, Al-muslimun (Majalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam), nomor 328, April 1997, hal. 57.

Sebuah indikasi muncul berdasarkan statemen di atas, bahwa cita-cita pembentukan umat Islam yang paripurna bukanlah sebuah cita-cita semu, tetapi harus diwujudkan dalam suatu realitas kehidupan yang tidak mengenal situasi dan kondisi, sebab perwujudan manusia yang *kaffah* (memiliki nilai kepribadian yang agung dan menyeluruh) harus dilalui dengan berbagai cara, di antara cara dimaksud telah disinyalir sebelumnya, yaitu merealisasikan risalah Islam sehingga Islam dengan seperangkat hukumnya dapat tegak dalam kehidupan masyarakat, sebab bila ditilik pada era kehidupan sekarang, tantangan yang paling asas dihadapi oleh para cendekiawan Islam berkisar pada sebuah tanggung jawab yakni mereka harus mengislamkan umat Islam sendiri, mengapa dikatakan demikian?. Inilah fenomena yang sangat memprihatinkan, umat Islam hanya terkontaminasi dengan Islam dengan sebab mereka dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang berketurunan Islam, tetapi dalam kenyataan—Islamnya mereka hanya sekadar simbol (Islam KTP), dan mereka tidak pernah melaksanakan semua yang diperintahkan sebagaimana tercantum dalam risalah Islam itu sendiri.

Di samping itu, pembentukan umat yang paripurna bukan hanya berkisar pada terealisasinya Islam di tengah-tengah masyarakat, tetapi ajaran Islam juga harus membumi dalam pentas kenegaraan dan peradaban. Cita-cita ini begitu penting, sebab bila Islam tidak membumi dalam kancah kenegaraan, maka nuansa perpolitikan suatu bangsa akan amburadul, umat manusia akan semakin liar dengan sistem politiknya, manusia akan semakin haus dan bringas dengan kekuasaannya, untuk

mengantisipasi supaya fenomena ini tidak terjadi, risalah Islam wajib dikendepankan—dan umat yang berada dalam lingkaran perpolitikan itu sendiri wajib menjadikan Islam sebagai satu-satunya aturan yang tak diragukan lagi.

Jika pengamalan ajaran Islam telah mampu teresapi secara *kâffah* dalam kehidupan perpolitikan suatu bangsa khususnya umat Islam, keyakinan umat Islam akan dapat hidup secara damai dan tidak kacau balau seperti yang sering tampak di mayoritas negara Islam bukan lagi impian kosong. Pertikaian antar sesama dengan sebab saling memperebutkan kekuasaan, tamak dengan jabatan dan berbagai macam dekadensi sosial lain akan dapat dihindarkan. Dengan bahasa yang lebih indah, kesadaran manusia bahwa semua yang dimiliki dan yang akan dimiliki hanyalah titipan yang akan berakhir darinya, manusia tidak memiliki apapun selain yang dititipkan Allah dan pada masanya nanti akan diambil kembali oleh Allah sebagai zat yang Maha memiliki segala-galanya.

Dari itulah, hal yang paling mendasar yang perlu digaris bawahi oleh umat Islam terkait dengan pentingnya menjaga amanah berupa kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya, supaya mereka menjalankan kepemimpinan secara baik, adil dan berbagai sifat kebajikan lainnya. Begitu halnya dengan penetapan (pengangkatan) pemimpin di antara mereka—Islam sama sekali melarang melimpahkan wewenang memimpin kepada yang bukan Islam atau umat Islam sendiri yang tidak punya *i'tiqad* baik kepada ajaran Islam. Jika keadaan ini terjadi dituntut supaya umat Islam dapat mengambil alih kembali

kekuasaan dari tangan-tangan yang kurang absah seperti disebutkan, hal ini ditempuh dengan cara-cara yang diridhai oleh syari'ah dan etika kemasyarakatan. Jika saja hal ini dilakukan tidak berarti tugas perjuangan telah selesai. Justeru setelah kekuasaan di tangan-tangan yang salah (bertindak zalim) didapatkan, tugas berat bagi umat Islam lebih menantang lagi. Artinya, bila umat Islam gagal mewujudkan pelaksanaan kepemimpinan dan kekuasaan itu dalam *frame* keadilan dan kebenaran justeru ia kembali menjadi bumerang dalam kehidupan sosial umat Islam.

Ada dua sinyalimen yang muncul di tengah-tengah umat Islam bila dicermati uraian di atas, sinyalimen *pertama* ada sebahagian pakar muslim berprinsip dengan argument umat Islam tidak perlu kepada negara Islam—asal rakyat yang tinggal di dalamnya melaksanakan ajaran Islam. Sinyalimen *kedua* berpersepsi bahwa umat Islam perlu kepada negara Islam. Meski beraneka ragam pendapat seputar perlu atau tidaknya Negara Islam, tetapi bila diperhatikan surat al-Hâjj ayat 41, tersimpul suatu makna, bahwa umat Islam tidak perlu kepada Negara Islam, tetapi yang diperlukan oleh umat Islam adalah "ketetapan", pengakuan bahwa mereka hidup dalam sebuah Negara di bumi ini yang melaksanakan ajaran Islam secara *kâffah*.

Terkait dengan eksistensi sebuah negara, dalam perspektif umum dikatakan bahwa kedaulatan negara adalah pengakuan formalitas dari negara-negara lain, hal ini berbeda dengan Islam yang memberi pengakuan secara lugas berdasarkan dalilnya yang valid bahwasanya umat Islam yang ingin membentuk sebuah negara

tidak perlu kepada pengesahan (legalitas) dari negara-negara lain, karena bumi yang diciptakan oleh Allah tidak diperuntukkan untuk suatu bangsa dan golongan tertentu dan semua manusia punya hak atas ciptaan Allah, maka yang paling penting menurut penulis, manusia hanya wajib meminta pengakuan dari Allah, bentuk pengakuan ini ditunjukkan oleh Allah dalam surat al-Hâjj ayat 41 yang berintikan pada tiga tugas utama yang harus tetap dilaksanakan oleh kaum muslimin, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam al-Qur'ân:

Artinya: "Jikalau mereka sudah mendapatkan ketetapan (kedaulatan) di atas bumi, mereka tetap melakukan shalat, menunaikan zakat, dan melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Dan kepada Allah segala urusan dikembalikan." (Al-Hâjj: 41)

Menurut ayat di atas, tiga tugas itu adalah shalat, zakat, dan amar ma'ruf nahi munkar. Shalat melambangkan tugas kepada Allah, yaitu dengan menjadikan pengabdian kepada-Nya sebagai tugas utama. Bahwa segala kehidupan ini harus dipersembahkan demi bakti dan pengabdian kita kepada Allah. Tidak boleh satu aktivitas pun yang lepas dari tujuan pengabdian ini, jika kita masih mengaku sebagai umat yang yakin dan percaya bahwa Allah satu-satunya tempat kita mengadu.

Tugas kedua yang harus diemban oleh kaum muslimin dan para pemimpin Negara yang diistilahkan dengan *umara* yaitu menunaikan zakat. Dalam syari'at Islam, zakat merupakan lambang kemakmuran bagi keberlangsungan hidup kaum muslimin. Ini tersimpul pengertian bahwa tugas para pemimpin (*umara*) adalah mengusahakan dan menciptakan kemakmuran bagi

seluruh rakyatnya. Seorang khalifah, pemimpin umat, atau kepala negara yang membawahi rakyat, harus mempunyai visi ekonomi yang cemerlang. Jika tidak, kondisi masyarakat akan terus hidup di alam kemudharatan ekonomi yang pada akhirnya terjerumus kepada hal-hal yang tidak dianjurkan dalam Islam.

Mengusahakan dan menciptakan kemakmuran bagi umat atau rakyat tidaklah mudah, apalagi jika yang diurus itu mencapai ratusan juta manusia. Sebab kemakmuran itu harus merata secara proporsional meliputi seluruh lapisan masyarakat, cita dan harapan itu bukan hanya dalam skop parsial (untuk kalangan tertentu). Tetapi perwujudan kemakmuran di sini adalah wujud kemakmuran yang mengena segenap lapisan. Perwujudan kemakmuran yang di maksudkan itu tidak berarti sama rata sama rasa. Tetapi ada strata sosial ekonomi yang mesti terjadi secara alamiah (tidak boleh dipaksakan). Tetapi yang perlu diingat bagi para pemimpin, bahwasanya tugas pemimpin negara justeru terletak pada usaha mendistribusikan kemakmuran ini. Begitulah sesungguhnya konsep utama dari zakat, di mana masyarakat yang punya kelebihan harta mendistribusikan kekayaannya kepada kaum yang tidak punya.

Meski sistem distribusi dan pengambilan zakat seperti disebutkan, tetapi yang perlu dicamkan oleh umat Islam bahwa zakat yang diberikan kepadanya sebagai kewajiban yang diambil dari orang-orang yang mampu tidaklah dicukupkan pada takaran itu saja, artinya kehidupan mereka yang tidak mampu hanya terfokus pada posisi sebagai penerima zakat, tetapi dalam kondisi tertentu dari zakat yang diberikan itu seseorang punya

i'tiqad dan komitmen suatu saat nanti mereka berbalik sebagai orang yang mampu memberikan zakat kepada orang lain, jalan ke arah ini dapat ditempuh dengan cara berusaha dan memaknai nilai zakat yang diberikan kepadanya dengan membuka dan mengembangkan usaha-usaha tertentu dan halal hasilnya. Jika kondisi ini dapat terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat muslim, cita-cita terwujudnya kemakmuran secara menyeluruh akan tercapai.

Adapun pekerjaan ketiga yang harus diemban seorang pemimpin adalah tugas kemasyarakatan, yang dalam ayat tersebut dilambangkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kongkretnya yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan, serta mencegah kemungkaran dan kezhaliman. Terkait dengan amar ma'ruf dan nahi munkar ini, Syekh Muhammad Abduh berkata bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan suatu kewajiban yang dipikulkan atas tiap orang muslim agar yang paling rendah dari mereka sanggup memegang hidung orang yang paling tinggi dari mereka, hal ini bermaksud bahwa orang yang sanggup menghadapi penguasa dan mencegahnya dari perbuatan munkar, pahalanya lebih besar daripada pahala orang yang menghadapi pribadi biasa, karena ia berani memasang dirinya di depan bahaya yang lebih besar.⁵⁸

Tantangan dan resiko yang dihadapi umat Islam dengan mengambil peran menghalangi para penguasa

⁵⁸ Taufiq Asy-Syawī, *Fuqhusy-Syuura wal Istisyarat*, (Syuura Bukan Demokrasi), (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan Pertama, 1997), h. 88.

berbuat zhalim, menegakkan keadilan, beramar ma'ruf dan mencegah manusia dari melakukan kemunkaran, ini telah menjadi tanggung jawab umat Islam secara menyeluruh. Di samping itu, tugas lain kaum muslimin yang paling berat adalah mengenai penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan umat Islam. Sebab masalah supremasi hukum bukanlah masalah sepele bagi umat manusia, jika ini tidak dapat ditegakkan dalam konteks keberlangsungan sosial masyarakat Islam, justeru kesewenang-wenangan dengan sebab pemimpin itu punya *power* (kekuasaan) akan mempergunakan kekuasaan secara serampangan dan untuk kepentingan tertentu. Sebagaimana dikatakan Lord Acton, *Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*. (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan mutlak akan secara mutlak pula menyalahgunakan kekuasaan itu.⁵⁹)

Melihat tiga tugas berat yang dipikulkan oleh umat Islam—terutama para pemimpin, untuk itu mereka tidak boleh merasa puas setelah merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan. Jika tujuannya hanya berkuasa, maka cukuplah dengan menjadi presiden, menteri, atau pejabat penting lainnya. Jika hal itu yang menjadi tujuan perjuangannya, maka selesailah sudah. Berarti untuk selanjutnya mereka akan digantikan oleh orang yang

⁵⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia, Edisi ke-18, 1997), h. 52. Dalam Tim Penerbit Buku, 75 Tahun Prof. Miriam Budiardjo, *Menggapai Kedaualatan Untuk Rakyat*, (Bandung: Mizan, Cet. Pertama, 1998), h. 107.

lebih baik, yaitu sekelompok orang yang memiliki idealisme yang lebih baik. Mereka bisa saja dari kelompok yang sama atau justeru dari kelompok lain yang sama sekali bertentangan secara ideologis. Kemenangan Islam itu tidak diukur dari seberapa banyak kader-kadernya telah menempati pos-pos tertentu dalam sebuah pemerintahan. Karena semua nilainya sangat pragmatis. Yang lebih penting adalah, apakah kader-kader itu mampu melaksanakan tiga tugas utama sebagaimana yang diamanatkan Allah di atas. Inilah ukuran yang lebih jelas dan pasti.

Asas Pemerintahan Islam

Mencermati argumen yang ditulis oleh Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr dalam bukunya *Introduction to Islamic Political System* dan telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul "Sistem Politik Islam sebuah pengantar". Dalam buku tersebut Sayid memaparkan secara gamblang dan lugas, bahwasanya mempelajari pemerintahan Islam merupakan suatu kewajiban dalam agama, sebab menurut Sayid landasan dasar pemerintahan Islam yakni dapat mengimplementasikan perintah Allah di muka bumi sekaligus sebagai medium pelaksanaan tugas manusia sebagai khalifah Allah.

Tujuan dan sasaran seperti disebutkan oleh Sayid telah menjadi pesan moral bagi kehidupan pemimpin dan pada umumnya umat Islam sekarang, di mana pemerintah Islam ditegakkan dengan terminal mampu mendeklarasikan Allah sebagai tujuan dan batas akhir kafilah kemanusiaan, yang di dalamnya watak-watak Ilahiah menjadi rambu-rambu perjalanan menuju pada tujuan besarnya berupa,

keadilan, pengetahuan, kekuasaan yang sarat dengan nilai-nilai Islam, kebajikan dan yang paling esensial dapat menggapai keridhaan Allah dari segenap aktivitas yang dilakukan.⁶⁰

Bercermin pada uraian di atas, supaya nilai kebaikan, keadilan dapat membumi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat dalam konteks keberbangsaan dan kenegaraan, maka pemerintahan Islam sebagai model pemerintahan yang ideal dengan dasarnya yang paling mutlak (al-Qur'ân dan as-Sunnah) harus dijadikan pijakan yang paling pokok dapat disimpulkan ada empat:

Pertama. Asas amanat. Kekuasaan adalah amanat dari Allah dan amanat rakyat yang telah memberikannya lewat bai'ât. Asas ini menghendaki agar pemerintahan melaksanakan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah, termasuk amanat yang dibebankan agama dan masyarakat.

Kedua. Asas keadilan: pemerintah membuat aturan-aturan yang adil mengenai masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci oleh hukum Allah. Hukum itu agar sesuai dengan fitrah dan kodrat manusia. Supaya keadilan itu terwujud, salah satu jalan yang harus ditempuh oleh seorang pemimpin yaitu mengajak semua masyarakat yang dipimpin untuk senantiasa bermusyawarah. Sebab tanpa musyawarah atau sering diistilahkan dengan *syûra*, persamaan dan keadilan itu mustahil terpenuhi, karena

⁶⁰ Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr, *Introduction to Islamic System*, (Sistem Politik Islam—Sebuah Pengantar), (Jakarta: Lentera Basritama, cetakan pertama, 2001), h. 13.

di dalam musyawarah semua memiliki persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil, baik untuk mengungkapkan pendapat dan pandangannya masing-masing terhadap masalah yang dirundingkan atau memberikan peluang untuk mendukung pendapat yang telah disampaikan pihak lain.⁶¹

Ketiga. Asas disiplin. Wajib mentaati hukum al-Qur'ân dan as-Sunnah. Kewajiban taat ini bukan hanya pada rakyat tapi juga dibebankan pada pemerintah. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan dan kebijakan politik pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan yang bersangkutan telah gugur, karena agama melarang ketaatan kepada kemaksiatan.

Keempat. Asas musyawarah. Agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihkan di antara para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam al-Qur'ân dan Sunnah Rasulullah. Rasulullah selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, namun beliau selalu mengajak para sahabatnya untuk mengutarakan pendapat mereka dalam rangka membicarakan isu-isu penting, baru setelah para

⁶¹ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'ân*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan Kedua, 1996), h. 208.

sahabat menyatakan yakin dan percaya, beliau akan mengambil keputusan akhir.⁶²

Paparan tersebut begitu jelas, Islam memandang musyawarah sebagai bagian terpenting dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi musyawarah bukan segala-galanya. Untuk masalah hukum syari'at, suara mayoritas tidak berhak mengubah ketentuan Allah yang sudah qath'î. Sementara untuk hal yang masih bisa diperdebatkan tetapi diberikan peluang untuk dikaji, dan pengkajian ini tidak pula dilakukan oleh orang serampangan tetapi diberikan kepada yang benar-benar mampu sebagaimana ditetapkan. Jika terjadi perselisihan, pemimpin dan mempunyai otoritas untuk menentukan di antara berbagai pendapat yang paling mendekati kebenaran.⁶³

⁶² Afzal Iqbal, *Diplomasi Islam ...*

⁶³ Terkait dengan system syûra (musyawarah) sebagai pondasi yang paling pokok dalam penentuan keputusan di tengah kehidupan umat Islam terhadap segala sesuatu—dan ini merupakan cara yang paling ideal, ternyata konsep pemberlakuannya berbeda dengan yang ditawarkan oleh Barat yang diistilahkan dengan demokrasi. Setidaknya format demokrasi yang selalu digembar-gemborkan Barat. *Pertama*, kedaulatan rakyat. Bagi dunia Barat rakyat adalah pemegang kedaulatan negara. Rakyat memiliki kehendak yang menentukan merah hitamnya suatu negara. Suatu pemerintahan dibangun dari, oleh dan untuk rakyat. Dari rakyat berarti, eksekutif adalah pemegang amanah rakyat, yang wajib melaksanakan segala kehendak rakyat. Oleh rakyat berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat melalui sistem pemilu. Sedangkan untuk rakyat berarti bahwa kekuasaan pemerin-

Demikianlah sistem politik Islam yang tampaknya hanya teori namun sebenarnya telah ada dan dilaksanakan sejak zaman awal Islam, bahkan sampai kini oleh sebahagian negeri-negeri Islam. Sayangnya umat Islam di dunia ini banyak yang tidak mau memakai sistem politik Islam. Barangkali sebahagian dari mereka karena tidak faham, atau sebahagian lainnya karena kalah pengaruh dengan sistem politik non Islam. Akibatnya umat Islam kerepotan dalam menjalankan Islam, dan sering mendapatkan PR (pekerjaan rumah) dari penyelenggara kepemimpinan yang memakai sistem non Islam. Dan ketika umat Islam jadi lemah dari berbagai seginya, faktor utama yaitu disingkirkannya sistem kepemimpinan Islam itu tidak pernah disebut-sebut sebagai biang keladi atau penyebab utama, karena banyak orang Islam sendiri yang ragu-ragu bahkan menolak sistem politik Islam itu.

Sebaliknya, ada sebahagian kelompok Islam yang memfokuskan seluruh upaya dan pemikirannya seakan-akan kepemimpinan Islam itu sebagai tujuan utama dan pertama. Sehingga hal-hal pokok dan mendasar yang terkait dengan aqidah jadi terabaikan. Akibatnya mereka dijadikan

tahan yang terbentuk dikhidmatkan untuk kepentingan rakyat. Dalam Islam, kedaulatan itu di tangan Allah. Dialah pemegang kekuasaan di muka bumi. Bukan manusia, juga bukan rakyat. Bumi ini milik Allah. Negara ini milik Allah. Manusia dan rakyat itu juga milik Allah. Allahlah pemilik, penguasa, dan pemegang kekuasaan tertinggi seluruh jagat raya ini. "*Dialah Tuhan di langit, dan Tuhan (pemegang kedaulatan) di bumi. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.*" (QS az-Zuhruuf: 84)

sasaran oleh penguasa. Sesuai dengan kenyataan bahwa sistem politik Islam itu belum tentu bisa dilaksanakan oleh umat Islam di sebagian belahan bumi, maka Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak memutlakkan terwujudnya sistem itu pada setiap wilayah ataupun setiap masa. Umat Islam hanya dituntut sebatas kemampuannya, dan hanya dimutlakkan agar jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Muslim.⁶⁴

Aturan yang sesuai dengan kemampuan manusiawi itu tampaknya kadang disia-siakan oleh sebagian umat Islam, hingga kemutlakan agar jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Muslim itupun masih dilanggar, dengan jalan ketika ajalnya sampai, seseorang yang mengaku beragama Islam itu dalam keadaan ngotot menolak diterapkannya syari'at Islam di negerinya. Maka tercatatlah ia sebagai penolak diterapkannya syari'at Islam di bumi Allah. Itulah yang perlu dipikir benar-benar oleh orang-orang yang sampai kini bersikap seperti itu.

Hukum Imamah (Pemimpin) dalam Islam

Jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syari'at, maka status wajibnya imâmah adalah fardhu khifayah seperti jihad dan menuntut ilmu. Namun jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imâmah, maka harus ada dua pihak: *Pertama*. Dewan Pemilih

⁶⁴ Cita dan harapan demikian telah ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'ân di surat Al-Baqarah ayat 208 dengan maksud "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".

yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi umat. *Kedua*. Dewan Imam (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi imam.

Jika kedua pihak diatas mendapatkan keistimewaan untuk mengangkat imam (khalifah) maka masing-masing keduanya wajib memiliki kriteria-kriteria yang legal. Adapun beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh dewan pemilih ada tiga di antaranya sebagai berikut:

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal dan siapa pula yang tidak berhak diangkat menjadi imam (khalifah).
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam (khalifah) dan paling efektif serta paling ahli dalam mengelola setiap kepentingan dan siapa pula yang kurang dan tidak tepat.

Orang yang bertempat didaerah imam secara otomatis bertugas mengangkat imam menurut adat dan bukan menurut syari'at, namun mereka tidak mempunyai kelebihan atas orang lain yang ada di daerah-daerah lain. Barangkali bentuk pengangkatan imam seperti disebutkan itu sedikit banyak mewarnai dan relevan dengan bentuk pengangkatan pemimpin dalam sebuah negara, sebab antara imam dan pemimpin punya persamaan visi dan misi yakni dapat membawa orang yang diimami dan yang dipimpin kepada kebaikan. Justeru karena itu menurut penulis, kendati pengangkatan imam dikaitkan menurut adat dan pengangkatan pemimpin atau khalifah menurut

syari'at, yang penting diperhatikan bahwa semua yang menetapkan atau memilih baik imam dan pemimpin dilandasi pada suatu putusan bersama bukan bersifat parsial (kehendak) perseorangan yang sifatnya memaksakan kehendak untuk sampai ke suatu tujuan.

Keabsahan Imam (Khalifah) dalam Islam

Imâmah bukan sekadar jabatan politik atau kekuasaan formal, tetapi sekaligus sebagai jabatan spritual yang sangat tinggi. Selain menyelenggarakan pemerintahan Islam, Imam bertanggung jawab membimbing umat manusia dalam urusan agama dan dunia mereka. Imam juga membimbing pikiran dan rohani masyarakat. Memelihara syari'at Nabi Muhammad agar tidak menyimpang atau berubah serta memperjuangkan tercapainya tujuan pokok dari diutusnya Rasulullah ke permukaan bumi ini.

Di tilik dalam perspektif sejarah dan kaitannya dengan imâmah, terlihat bahwasanya jabatan tinggi yang dimiliki seseorang dewasa ini telah pula diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, setelah Ibrahim melewati fase kenabian dan risalah, dan telah lulus dari sejumlah ujian berat. Maka Ibrahim meminta kepada Allah agar jabatan ini juga diberikan kepada sebahagian keturunannya, tetapi Allah menegaskan kepada Ibrahim bahwa orang-orang zalim dan para pendosa tidak akan mencapai posisi ini.

﴿ وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

Artinya: "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat lalu ia menyempurnakannya. Tuhan berkata kepadanya: "Aku angkat engkau sebagai imâm bagi umat manusia." Ibrahim berkata: "Berikan pula kepada keturunanku." Tuhan berkata: "Jabatan-Ku ini tidak akan mengenai orang-orang zalim." (Q.S. al-Baqarah: 124)

Jelas sekali bahwa kedudukan nan tinggi ini tidak dapat diterjemahkan sebagai jabatan pemerintahan formal. Dengan demikian, jika imâmah tidak diterjemahkan sebagaimana yang telah digambarkan di atas, maka ayat di atas tidak mempunyai pengertian yang jelas.

Para nabi utama, ulûl-azmi, terutama Nabi Muhammad, adalah sekaligus sebagai imam-imam yang memiliki otoritas kepemimpinan spritual ruhaniah dan kepemimpinan formal material. Dengan demikian, Nabi Muhammad tidak sekadar menyampaikan ajaran Tuhan, tapi sekaligus memimpin umat manusia, dan jabatan imâmah ini diberikan kepada Nabi Muhammad sejak awal kenabiannya.

Dalam hal ini garis imâmah sesudah Rasulullah dilanjutkan oleh orang-orang suci dari keturunannya. Dari batasan di atas mengenai imâmah tampak bahwa untuk mencapai kedudukan ini dituntut syarat-syarat yang sangat berat, baik dari sisi taqwa dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa, maupun dari sisi ilmu dan pengetahuan yang mencakup seluruh bidang pengetahuan dan aturan agama serta pengetahuan tentang manusia dan kebutuhannya untuk setiap zaman.

Jabatan imâmah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara. Pertama Pemilihan oleh *ahlu al-aqli mâ al-hâl* (parlemen) Kedua, penunjukan oleh imâm (khalifah) sebelum-

nya. Sekelompok ulama berpendapat bahwa pemilihan imâm (khalifah) tidak sah kecuali dihadiri oleh seluruh parlemen dari setiap daerah agar imâm atau khalifah yang mereka angkat diterima oleh seluruh lapisan dan mereka semua tunduk di bawah kepemimpinannya. Kelompok ulama lain berpendapat bahwa minimal parlemen beranggotakan lima orang kemudian mereka mengangkat imâm, atau salah seorang diantara empat anggota yang lain menjadi imâm. Kelompok ini berhujah dengan dua alasan:

Pertama. Pembaitan (pengangkatan) Abu Bakar Assiddiq dilakukan oleh lima orang, yaitu 'Umar bin Khatab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudha, Disyr bin Saad, Dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah. Bahwa 'Umar bin Khatab, membentuk lembaga syûra dengan beranggotakan enam orang. Kemudian keenam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi imâm dengan persetujuan kelima anggota syûra tersebut.

Pemilihan Imam dalam Islam

Jika anggota parlemen bersidang untuk memilih imam, Mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imâmah. Kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat dan mereka tidak menolak membaicitnya. Dengan pembaiatan mereka, ia secara resmi menjadi imâm yang sah, jika demikian halnya maka telah menjadi kewajiban bagi seluruh umat membaicit dan taat kepadanya. Namun jika ia menolak menjadi imâm, maka mereka tidak boleh memaksanya. Jika ada dua orang yang

memiliki kriteria, maka yang dipilih adalah orang yang lebih tua. Jika calon yang satu lebih pandai dan calon yang lain lebih berani, maka yang dipilih adalah orang yang paling tepat pada zaman tersebut. Dalam memilih imâm Islam mengemukakan prinsip musyawarah, prinsip musyawarah ini disebutkan dalam al-Qur'ân di surat As-syûra.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٤٨﴾

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka".

Sementara dalam surat yang lain Allah juga berfirman yang artinya: "... Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam beberapa urusan dan bila engkau telah mengambil keputusan yang tetap maka percayakan dirimu kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mempercayakan diri". (Q.S. 'Alî Imran :159)

Bila diperhatikan ayat di atas dengan seksama, ternyata permusyawaratan dalam konsep Islam telah menjadi azas bagi kaum muslimin dalam pergaulan dan pemerintahannya. Prinsip-prinsip ini telah dilaksanakan dalam pemilihan khalifah-khalifah pasca kepemimpinan Rasulullah yang masuk dalam barisan Khulafa' ar-Râsyidîn.

Pembicaraan Al-Qur'an Seputar Pemimpin

Sebagaimana disinyalir oleh John L. Esposito, bahwa ajaran Islam merupakan suatu system normative, di mana agama berhubungan secara integral dengan semua bidang kehidupan orang Islam, seperti politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan keluarga.⁶⁵ Pendapat John L. Esposito tersebut terkandung makna yang begitu mendalam—makna ini akan tersembur kepermukaan bila kita memahami secara lebih komprehensif pengertian Islam sebagai satu-satunya risalah kehidupan manusia beriman, bahwa hubungan secara integral dengan semua aspek kehidupan karena kesemua aspek tersebut mendapat pengaturan dan punya landasan hukum tersendiri—serta tidak pernah paradoks antara hukum bidang yang satu dengan hukum bidang yang lain.

Begitu halnya dengan masalah kepemimpinan dengan pemahaman yang lebih universal terkait juga masalah negara (pemerintahan)⁶⁶. Berangkat dari penjelasan tersebut jelas sudah kedudukannya, masalah kepemimpinan punya posisi dan kedudukan tersendiri dalam bahasan al-Qur'an, kenyataan ini terlihat dengan banyaknya ayat al-

⁶⁵ John L. Esposito, *Islam Development and sociopolitical change*, terj. Identitas Islam Pada Perubahan social-politik, (Jakarta, Bulan Bintang, cetakan Pertama, 1986), h. 3.

⁶⁶ Konstitusi yang mengatur masalah pemerintahan lazim dikenal dalam ilmu hukum (fiqh) adalah Fiqh Siyasah, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan dan seluruh hal-hal yang terkait dengannya, baik menyangkut pengangkatan pemimpin, memilih pemimpin, bahkan sampai kepada batasan pengangkatan pemimpin dalam Islam.

Qur'an sebagai firman Allah yang mulia menceritakan secara transparan tentang kepemimpinan dan segala sesuatu yang menyangkut dengannya di antaranya: Surat al-Baqarah ayat 124, surat an-Nisa' ayat 59 dan 83. surat al-Maidah ayat 51 dan 57. surat as-Sajdah ayat 24, surat al-Furqan ayat 74.

a. Pemimpin merupakan Imâm bagi seluruh manusia

Dalam surat al-Baqarah ayat 124 Allah mengaitkan pemimpin itu dengan istilah imâm.⁶⁷

﴿وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾﴾

Artinya: "Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku menjadikanmu imâm bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "Dan saya mohon juga dari keturunanku". Allah berfirman: "JanjiKu ini tidak mengenai orang yang zalim".

⁶⁷ Kepala Negara yang disebut dengan imam atau imamul mu'minin, ini beralasan karena kaum muslimin bermakmum kepadanya dalam shalat. Qiyas kepada statemen di atas sungguh beralasan bahwa segala yang dilakukan oleh imam wajib diikuti oleh makmum, tetapi bila dihubungkan dengan pemimpin—Islam memberikan sinyal dengan nada pengikut atau makmum dilarang mengikuti imam jika imam melakukan kesalahan serta hal-hal lain di luar koridor yang ditetapkan. Sementara secara literal istilah "imâm" berarti kemajuan dan menuju arah tertentu, petunjuk, bimbingan, kepemimpinan dan keteladanan.

Dalam surah al-Furqân ayat 74 Allah menyebutkan:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."

b. Menyerahkan segala urusan kepada Allah, Rasul dan Uli al-amrî

Kata pemimpin juga disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'ân dengan istilah *uli al-amrî*, ini terdapat dalam surat an-nisa' ayat 59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan uli al-amrî di antara kamu ...".

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ
رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ

Artinya: "... Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan uli al-amrî di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan uli al-amrî) ...". Q.S. an-nisa': 83.

c. Dilarang mengangkat Pemimpin dari Orang-Orang Yahudi dan Nasrani

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Q.S. al-Maidah: 51.

Bahkan bila analisa secara mendalam, umat Islam bukan hanya diingatkan supaya mereka tidak menjadikan pemimpinnya dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tetapi bila diamati ayat berikut, ternyata larangannya begitu halus—yaitu juga dibatasi pada diri umat Islam (mereka Islam), tetapi benci dan tidak konsisten serta mendukung ajaran Islam. Firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا
مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu

jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman." al-Maidah: 57.

d. Melaksanakan kepemimpinan berdasarkan petunjuk Allah dan senantiasa sabar

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا
يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." Q.S. as-Sajdah : 24.

Sementara dalam beberapa firman-Nya yang lain Allah menggunakan istilah khalifah dan ini juga identik dengan pemimpin, di antaranya. Surat al-Baqarah ayat 30, surat al-An'am ayat 165 surat al-A'raf ayat 69 dan 74, surat Yunus ayat 14 dan 73, surat an-Naml ayat 62, surat Fathir ayat 39 dan surat Shad ayat 26.

a. Pemimpin identik dengan "Khalifah"

Surat al-Baqarah ayat 30 menyatakan tentang proses kekhalifahan: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Allah berfirman dengan maksud: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari peristiwa yang berhubungan dengan kekhalifahan tersebut, bahwa Allah seolah-olah hendak menerangkan betapa Ia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. *Pertama*. Ungkapan Allah dengan maksud: "Sesungguhnya Aku penjadi (menjadikan) kekhalifahan di bumi. Pengangkatan dan penentuan kekhalifahan adalah otoritas Ilahi. Sekalipun ada makhluk yang bertasbih dan mensucikan Allah, tetapi Allah tidak memilih mereka. Meskipun, Allah tidak menyangkal secara langsung bahwa keberadaan khalifah dapat menyebabkan kehancuran dan pertikaian, serta dapat menumpahkan darah.

Kedua. Allah mengajar khalifah-Nya, sebelum Ia mengutusnyanya untuk mengemban tugas kekhalifahannya. Diajarkan kepada Adam semua asma/nama-nama." (Q.S. al-Baqarah : 31). Pendidikan yang diberikan sempurna, sehingga seorang khalifah Allah memiliki pengetahuan yang sempurna pula. Khalifah merupakan posisi yang diberikan untuk menduduki posisi pemberi. Khalifah bukan hanya menduduki posisi pengganti kekosongan atau ketiadaan pemberi di tempat tertentu, tetapi kualitas khalifah harus memenuhi persyaratan dan harapan sang pemberi. Dan yang paling dicermati, bahwa kekhalifahan Ilahi haruslah mendunia. Kekuasaannya membentang ke seluruh alam dan berlaku untuk semua makhluk. Dia menduduki kekuasaan Yang memberikan kekuasaan di muka bumi ini—universal dan absolut.

Dari pengamatan di atas telah jelas, eksistensi Khalifah Allah adalah penguasa Ilahi di bumi dengan misi Ilahi pula. Dia adalah makhluk Allah yang memiliki otoritas Ilahi (atas pemberian-Nya) untuk membawa makhluk yang lain menuju tujuan Ilahi. Maka kesempurnaan mutlak harus dimiliki oleh khalifah tersebut. Kalau tidak, misi Ilahi tersebut akan gagal, karena tidak terpenuhinya persyaratan Ilahinya. Yakni dengan tidak akan memunculkan keyakinan pada makhluk dengan mengikutinya. Sehingga, nilai sempurna yang hendak dituju tidak akan dicapai.

Oleh sebab itu, kesempurnaan yang absolut merupakan persyaratan khalifah. Yakni bahwa ia adalah makhluk yang memiliki kesempurnaan *khalqiyah* dan *khulqiyah* dengan kesempurnaan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya. Jika tak memenuhi persyaratan ini, maka apa yang hendak dituntut Allah dari makhluknya tidak akan tercapai. Karena makhluk tidak akan memiliki dalil yang meyakinkan untuk dapat mentaati Allah. Maka perintah untuk mentaati khalifah pun tak akan dapat ditaati.

Dalam bentuk lughah, ungkapan khalifah (*khalafa—yakhlufu—khilafah*) memiliki arti: yang menggantikan. Dalam istilah tadi, telah disebutkan bahwa khalifah adalah posisi pengganti dari yang memberikan (kekhilafahan tersebut). Sehingga segala kehidupan di semesta ini terfokus padanya. Darinya terpancar sinar rahmat Ilahi. Kepada-nyalah manusia seharusnya memberikan ketaatan atas ketaatannya kepada Allah. Karena dialah yang diwajibkan Allah untuk ditaati. Allah-lah yang menentukan kekhalifahannya dan mewajibkan kepada semua makhluk untuk menaatinya. Sebaliknya penolakan akan kekhalifahan tersebut merupakan kekufuran.

Oleh karena itu, kewajiban taat kepada rasul dan uli al-amri merupakan ketaatan yang absolut. Karena ketaatan kepada mereka merupakan ketaatan kepada Allah. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ...".

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

Artinya: "Atau siapakah yang memperkenankan do'a orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi ..." Q.S. an-Naml: 62.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

Artinya: "Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi ..." Q.S. Fathir: 39.

يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan khalifah di muka bumi ..." Q.S. Shad: 26.

قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ

فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Kaum Musa berkata: "Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi (Nya), maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu".

b. Istilah pemimpin juga identik dengan "Penguasa"

Ini disebutkan oleh Allah di surat al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu ..."

فَكَذَّبُوهُ فَتَبَيَّنَتْ ذُنُوبُهُمْ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَذَابَ الْمُنذِرِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: "Lalu mereka mendustakan Nûh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu." QS. Yunus: 73.

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَادْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya: ... Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nûh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada Kaum Nûh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Q.S. al-A'râf: 69.

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ شُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجَثُونَ الْجِبَالَ بَيْوتًا فَادْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

Artinya: "Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan". Q.S. al-A'râf: 74.

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat". Q.S. Yunus: 14.

Sedang Hadith Rasulullah yang terkait dengan pemimpin ini di antaranya dengan maksud: HR. Muslim "Sesungguhnya imâm (pemimpin) itu adalah merupakan perisai". HR. Abu Daud "Apabila ada tiga orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang menjadi pemimpin".

HR. Bukhari "Suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita tidak akan bahagia". HR. Muslim "Tidaklah seorang pemimpin pun yang mengurus urusan kaum Muslimin, kemudian tidak bersungguh-sungguh, dan tidak memberi nasehat kepada mereka, melainkan dia kelak tidak masuk surga bersama-sama mereka".

HR. Bukhari dan Muslim "Tidak seorang hamba pun yang Allah angkat menjadi pemimpin suatu rakyat, yang dia mati pada saatnya tiba sedang dia tidak bersifat terbuka kepada rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya surga".

Kedudukan Wanita Sebagai Pemimpin

a. Wanita Dalam Perspektif Yang Berbeda

Sebagaimana disinyalir dalam banyak sumber sejarah, perlakuan terhadap wanita sebelum Islam sungguh mengerikan, misalnya ketika zaman jahiliyyah, para wanita selalu diposisikan sebagai makhluk yang tidak berarti sama sekali, wanita hampir tidak diberikan hak untuk hidup sebagaimana kaum pria, wanita dalam pandangan masyarakat Arab merupakan sosok makhluk yang apabila mereka dilahirkan ke dunia akan membawa aib bagi keluarganya. Kendati kenyataan ini tidak semuanya terjadi dan berkembang di semua suku Arab. Sebab ada di antara beberapa suku Arab yang tidak memperlakukan wanita seperti disebutkan. Tetapi untuk suatu tamsilan, realitas sejarah tersebut sangat ideal diangkat kepermukaan sebagai cermin perbandingan di antara beberapa persepsi yang muncul terhadap eksistensi kaum wanita.

Lebih jelas persepsi terhadap kaum wanita di mata masyarakat Arab jahiliyyah sebagai penguat argumen di atas, dikatakan bahwa bayi perempuan harus dikubur hidup-hidup karena dianggap hina jika mereka lahir ke dunia. Begitu halnya dengan kondisi wanita yang kehilangan suami, baik karena berpisah atau pun karena kematian mereka harus diasingkan dari tempat tinggal mereka, bahkan wanita tersebut dapat dan sah-sah saja diwariskan oleh anak laki-laknya sendiri, atau menjadi istri dari anak tirinya yang lelaki. Begitu halnya dalam masalah ruju', perempuan yang dicerai oleh suaminya tidak mengenal masa 'iddah, kenyataan ini memudahkan bekas suaminya untuk mengambil kembali dirinya sebagai isteri.⁶⁸

Di samping fenomena semacam di atas, banyak lagi fenomena-fenomena lain yang sungguh menyedihkan tampak dalam sejarah perjalanan kaum wanita di dunia. Kondisi wanita sangat begitu rendah dipandang, akibatnya mereka selalu diposisikan sebagai makhluk yang tidak berdaya, hak yang dimiliki sangat terbatas, dan dalam kancah-kancah sosial tertentu, mereka hampir tidak

⁶⁸ Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ababil, cetakan I, 1996), h. 17. Uraian di atas tentang anak lelaki dapat mewarisi ibu kandung sendiri jika seorang ayah meninggal, ini mengingatkan kita kepada sistim kehidupan binatang, di mana setelah binatang itu lahir mereka dapat kembali menggauli induknya sendiri. Sementara pandangan dari beberapa bangsa lain seperti bangsa Persia, menurut mereka, tidak ada batasan jumlahnya bagi laki-laki mengadakan pergundikan, dan mereka (kaum wanita) dijadikan komoditi dagang oleh pihak pria).

diposisikan sama sekali. Begitu halnya dalam peran dan kedudukan wanita di pentas perpolitikan dunia, keberadaan mereka selalu diwarnai pro dan kontra. Dalam sejarah dunia disebutkan, bahwasanya sebelum Islam diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab Jahiliyah, masa sebelum Islam, awal perkembangan Islam dan masa pertengahan, orang-orang di luar Islam memandang wanita sebagai barang hidup yang begitu rendah dan tidak berharga. Pandangan semacam ini terlihat di Roma, wanita yang bekerja tidak mendapat upah. Kalau pun mendapat upah, haknya berkurang. Fenomena serupa juga tampak di Perancis.

Di Perancis sendiri wanita secara mutlak berada di bawah kekuasaan suaminya. Jika suaminya berkehendak, ia dapat menjadi teman hidup selamanya. Jika tidak, ia pun dapat membunuhnya. Yang lebih tragis lagi, dalam kondisi tertentu wanita dapat dan sah-sah saja dicampakkan ke dalam api sebagai bentuk taubat suaminya di saat menghadapi kematian. Di Inggris, pada abad ke 5 sampai ke 11 Masehi, wanita hanya dipandang sebagai pelengkap keberadaan laki-laki dan kaum wanita hanya diprioritaskan sebagai penyalur dan pemuas nafsu laki-laki. Mereka begitu rendah posisi dan keberadaannya di mata lelaki.⁶⁹

Dalam sumber yang lain disinyalir, bahwa keunggulan biologis wanita sebagai kodrah yang dimilikinya sering dilupakan oleh lawan jenisnya dengan memeralat mereka hanya sekadar menjadi mesin reproduksi manusia, wanita diibaratkan laksana mesin copy yang dapat

⁶⁹ Ahmad Husnan, *Keadilan Hukum Islam Antara Wanita dan Laki-Laki*, (Solo: al-Husna, 1995), h. 42 - 44.

mengeluarkan copian kertas seperti yang diinginkan. Malah yang lebih tragis lagi kemampuan reproduksi ini pun diabaikan dan mereka hanya dimanfaatkan sebagai alat pemuas kebutuhan biologis pria semata, tetapi reproduksi mereka dihindari.⁷⁰

Fenomena semacam itu sampai sekarang masih terus terjadi bahkan kian meruncing berlaku dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat yang berkembang, maju dan modern. Ekses yang muncul sebagai akibat wanita diperlakukan tidak semestinya, wanita berusaha bangkit melepaskan diri dari anggapan dan perlakuan yang tidak manusiawi, kenyataan ini telah membangkitkan sebuah kekuatan pada diri kaum wanita, mereka bangkit melepaskan diri dari anggapan dan imaje yang muncul bahwa diri mereka sosok manusia yang lemah, kaum wanita bukan hanya sebagai pelengkap dari kebutuhan kaum pria, mereka juga memiliki derajat kesamaan dengan kaum pria.

Kondisi semacam ini kian terus melebar dan pada akhirnya wanita membuat sebuah gebrakan baru yaitu memperjuangkan kembali hak-hak mereka yang selama ini dianggap oleh kaum wanita itu dikekang, tidak diperlakukan sama dengan kaum pria. Dampak yang terjadi justeru mencuat sebuah malapetaka baru dalam kehidupan sosial manusia. Wacana genderisme dan melebarnya posisi kaum wanita dalam kedok emansipasi

⁷⁰ Sumber ini terdapat dalam Wanita dan Islam—satu pengantar untuk tiga buku, dalam Mazhar ul-Haq Khan, *Social Pathology of the Muslim society*, terj. Wanita Korban Patologi Sosial, (Bandung: Pustaka, Cet. I, 1994), h. V.

telah menjadi sebuah fenomena baru yang begitu mengental di masa sekarang.

Terlepas apakah Islam ada menyinggung atau tidak masalah gender dan emansipasi ini. Tetapi dalam kenyataannya problema genderisme dan emansipasi justeru melahirkan berbagai macam kasus. Salah satunya adalah akibat perjuangan keras kaum wanita dengan meminta persamaan derajat seperti kaum pria—ini telah melahirkan masalah-masalah pelik seperti munculnya ketidakharmonisan keluarga, meningkatnya kasus perceraian dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya tujuan berkeluarga itu sendiri dalam pandangan Nurcholish Madjid adalah mencapai kualitas hidup *sakinah* yang berpangkal dari cinta kasih yang tulus di antara dua pribadi yang berbeda.⁷¹ Tetapi bila diperhatikan fenomena seperti diuraikan di atas amat jelas, bahwa keberadaan sebuah keluarga tidak lagi mewarnai tujuan dan harapan sebagaimana diinginkan, kenyataan inilah yang menjadi pusat perhatian semua tentang keberadaan dan kiprah wanita yang tengah mencari kebebasan, menuntut persamaan hak dengan kaum laki-laki, yang sementara mereka begitu diperlukan keberadaannya di tengah-tengah keluarga untuk menjaga keseimbangan dan pengaturan di dalamnya.

Di samping itu, fakta atas pernyataan di atas terlihat dalam sinyalimen Ibnu Musthafa yang mengutip per-

⁷¹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius—Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, Cetakan II, 2000), h. 74.

nyataan Abul A'la Al-Maudûdî, di mana beliau pernah mengirim surat kepada Maryam Jamilah⁷², dalam surat dimaksud Al-Maudûdî mengatakan bahwasanya kebudayaan Barat terbukti amat kejam terhadap kaum wanita. Di satu pihak, ia menginginkan supaya wanita mampu memikul beban sesuai dengan kodrahnya, (kodrah wanita seperti, hamil, melahirkan dan menyusui), sementara di sisi lain kebudayaan Barat mengharuskan wanita melaksanakan pekerjaan-perkerjaan kasar seperti yang dikerjakan oleh kaum pria. Fenomena semacam ini menimbulkan suatu pandangan dan kesimpulan baru bahwa wanita berada di antara dua batu giling.⁷³

Kejamnya budaya Barat terhadap wanita seperti digambarkan Al-Maudûdî secara kondisi riil telah pula merasuki kehidupan umat Islam, pola dan tingkah laku yang merebak di lingkungan kehidupan masyarakat Barat di mana mereka menuntut kebebasan dalam semua sisi, ternyata kondisi yang sama juga dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimah di Negara-negara Islam. Imitasi mereka terhadap budaya Barat telah begitu mengental—

⁷² Maryam Jameelah nama dasarnya adalah Margaret Marcus, dia seorang muallaf berkebangsaan Amerika, di mana pada tahun 1961 setelah beberapa tahun mendalami Islam, kemudian Maryam memeluk Islam sewaktu masih tinggal di kampung halamannya New York. Menurut pengakuannya, Maryam mulai tertarik pada Islam sejak umur sepuluh tahun. Keterangan ini diangkat dalam buku "*Islam and Modernism*" yang diterjemahkan "*Islam Dan Modernisme*", Usaha Nasional, Surabaya, t.t.

⁷³ lihat Ibnu Musthafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, (Bandung: Al-Bayan, cetakan VI, 1993), h. 14.

hingga pada akhirnya kondisi yang terjadi di tengah masyarakat Barat juga sama sebagaimana dirasakan oleh masyarakat Muslim.

Oleh karena itu, sindirin Muhammad Iqbal sebagai seorang modernis intelektual dengan menyatakan, penolakan sama sekali etika-etika sosial Barat dan menyatakan wanita Barat modern sebagai tak punya hati dan sifat kewanitaan. Lebih jelas sinyalimen Iqbal terlihat dalam karyanya *jawid nama*, dalam karya tersebut Iqbal mengatakan "Nyonya-nyonya: ibu-ibu Saudari-Saudari, sampai kapan anda semua hidup sebagai kekasih-kekasih? Menjadi kekasih adalah keterpencilan semata-mata. Menahan derita tirani dan penindasan."⁷⁴

Ungkapan dan peringatan Iqbal tersebut perlu diulang kembali pada kondisi kekinian, hal ini tentu saja dikhususkan kepada para wanita Islam yang telah jauh terpeleset dari nilai-nilai islamnya. Pergeseran nilai dimaksud karena wanita menginginkan kebebasan dan persamaan hak di berbagai bidang yang salah satunya pengambilan tempat (posisi) dalam percaturan politik bangsa dan Negara, realitas lebih lanjut tentang posisi dan keterlibatan wanita di kancah perpolitikan dapat dianalisis dalam paparan berikut.

a. Wacana Pengangkatan Wanita Sebagai Pemimpin

Perdebatan seputar boleh atau tidak wanita diangkat sebagai pemimpin—ini telah menjadi sebuah wacana

⁷⁴ Lihat, Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, cetakan IV, 2000), h. 344.

hangat yang kian hari kian menarik dibicarakan. Perkembangan ini telah pula melahirkan berbagai tulisan seputar tema tersebut, baik berbentuk artikel, makalah, komentar pembaca bahkan juga telah keluar beberapa buku ilmiah yang berbicara seputar kepemimpinan wanita atau peran wanita dalam kancah perpolitikan bangsa.⁷⁵

Adapun pendapat yang menyatakan boleh seorang wanita menjadi kepala negara seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghazâli didukung oleh para cendekiawan muslim Indonesia, antara lain, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Dr. Said Aqiel Sirady dan K.H. Abdurrahman Wahid.⁷⁶ Menurut *jumhur ulama*, keberadaan lembaga *imâmah* merupakan suatu keharusan. Dalam hal ini, Al-Baidhawi menyatakan bahwa lembaga *imâmah* itu adalah suatu lembaga yang berkenaan dengan penggantian Rasulullah oleh seseorang untuk menjalankan hukum-hukum *syar'iyah* dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam satu garis yang mesti diikuti oleh umat.⁷⁷

Dr. Suhair Luthfi "*Qira'ah Naqdiyyah Fi Adabiyat Al-Musyarakah al-Siyasiyyah li al-Mar'ah al-'Arabiyah*". Sebagaimana dikutip Hibbah Rauf Izzat dalam bukunya *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi, Ru'yah Islamiyah* yang telah

⁷⁵ Lihat beberapa buku yang berbicara tentang kepemimpinan wanita, atau idealnya peran wanita dalam kancah politik. Misalnya buku yang ditulis oleh Hibbah Rauf Izzat dengan judul asli *al-mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi, Ru'yah Islamiyyah*. Fatima Mernissi, *The Queens Of Islam*. Dan beberapa buku lain.

⁷⁶ Hartono A. Jaiz, *Polemik Presiden Wanita dalam Tinjauan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 51.

⁷⁷ Ali Abdul Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, cetakan I, 1985), h. 4.

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "Wanita dan Politik Pandangan Islam", dia mengatakan bahwa pandangan Islam tentang kegiatan politik wanita pada tingkat umat berbeda dengan pandangan Barat, dalam masalah ini Barat mencurahkan perhatiannya kepada pembuatan keputusan untuk mewujudkan interaksi berbagai kepentingan golongan sosial yang salah satunya kepentingan wanita dengan tujuan mencapai stabilitas sistem politik. Sementara Islam berpersepsi dengan memperhatikan kemaslahatan agama sebagai garis gerakan politik dengan umat sebagai pelaksananya. Sedangkan institusi hanyalah perangkat untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan politik berpusar bersama syari'at, hukum-hukumnya dan kemaslahatan umatnya, dan itulah tujuan bai'at, kekuasaan serta cita-cita syûra.⁷⁸ Sementara pernyataan yang lebih ekstrem adalah Sa'adi Abu Habieb dalam bukunya "*Mausû'atu al-Ijma'*" menyatakan bahwa para ulama sepakat tentang jabatan khalifah tidak boleh dipegang oleh wanita, orang kafir, anak kecil yang belum baligh dan orang gila.⁷⁹ Ternyata perihal wanita terjun dalam kancah perpolitikan telah menjadi sebuah poliemiik dalam konteks pro dan kontra. Dan bagaimana sebenarnya posisi dan kedudukan mereka dalam kancah perpolitikan tersebut ditinjau menurut pandangan agama?

⁷⁸ Hibbah Rauf Izzat, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi, Ru'yah Islamiyah*, terj. "Wanita dan Politik Pandangan Islam" (Bandung: Mizan, Cetakan pertama, 1997), h. 97.

⁷⁹ Sa'adi Abu Habieb, *Mausû'atu al-Ijma'*, Terj. K.H.M. Ahmad Sahal Machfudz dan K.H.A. Mustafa Bisri, Kata Pengantar. Abdurrahman Wahid, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cetakan II, 1997), h. 315.

Realita Sejarah dan Wacana Pengangkatan Pemimpin Wanita Antara yang Pro dan Yang Kontra

Pendapat Yang Pro

Bila ditilik perjalanan sejarah manusia, baik dalam skala makro maupun mikro, akan tampak sebuah realitas tentang peran dan eksistensi wanita dalam kancah perpolitikan bangsa, kenyataan sejarah tersebut dirujuk kepada kepemimpinan Aceh dan beberapa Negara lain yang pernah dipimpin oleh wanita, maka wacana seputar boleh atau tidaknya wanita ditetapkan sebagai pemimpin dapat diperhatikan argument-argumen berikut.

Syaikh Abdurraûf As-Singkili menyetujui wanita menjadi pemimpin bukan atas dasar pertimbangan keadaan darurat saja, tetapi juga atas pertimbangan *al-ahliyah* yang dimiliki oleh wanita. Hal ini juga terlihat dalam perjalanan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa-masa berikutnya. Dimana Syaikh Abdurraûf As-Singkili membiarkan wanita memegang tampuk pemerintahan di Aceh sampai empat sultanah secara berturut-turut.⁸⁰

⁸⁰ Mereka adalah Sultanah Sri Ratu Tujul 'Alam Safiyatuddin Johan Berdaulat, 1050 – 1086 H (1641 – 1675 M). Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (anak angkat Safiyatuddin), 1086 – 1088 H (1675 – 1678 M). Sultanah Sri Ratu Zakiatuddin Inayatsyah (putri Naqiatuddin), 1088 – 1098 H (1678 – 1688 M). Dan Sulatnah Sri Ratu Kamalatsyah (anak angkat Safiyatuddin), 1098 – 1109 H (1688 – 1699 M).

Islam memandang bahwa kedudukan laki-laki dan wanita adalah sama, tidak ada yang lebih salah satu atas yang lainnya, kecuali mereka yang berilmu pengetahuan dan bertaqwa. Islam memberikan penghormatan yang luhur bagi wanita dan mengangkat martabatnya dari lembah kehinaan (dalam pandangan Jahiliyah) kepada kedudukan yang terhormat dan mulia. Islam membolehkan wanita untuk berkarya dan beraktifitas. Mereka dibolehkan melakukan shalat berjama'ah dengan laki-laki dalam masalah ibadah. Wanita diwajibkan juga untuk ikut serta ber-*amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, menuntut ilmu pengetahuan, melakukan transaksi dagang, bahkan ikut dalam peperangan sebagai juru rawat dan lain-lain.

Dalam tatanan kehidupan modern, ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peran yang sangat penting. Penguasaan ilmu pengetahuan oleh seseorang (baik laki-laki maupun wanita) akan memposisikan derajat dirinya lebih terhormat di tengah-tengah masyarakat. Dewasa ini, kaum wanita telah menunjukkan kiprahnya, dengan penguasaan ilmu pengetahuan, mereka telah mampu menggeser monopoli laki-laki. Mereka telah menempatkan posisinya dalam berbagai jabatan politik, karir dan jabatan-jabatan informal lainnya.

Namun demikian, para *fuqahâ'* masih berbeda pendapat tentang eksistensi wanita dalam berbagai bidang tersebut. Bahkan perbedaan yang lebih tajam lagi terlihat pada eksistensi wanita sebagai pemimpin, khususnya sebagai kepala negara. Mustafa As-Siba'i dan Muhammad Al-Mubâarak dengan tegas menyatakan bahwa *jumhur ulama* sepakat bahwa wanita tidak boleh menduduki jabatan

sebagai kepala negara, karena bertentangan dengan *syari'at Islam*. Sedangkan Muhammad Al-Ghazâli dan Syaikh Abdurraûf As-Singkili memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa wanita boleh menjadi kepala negara.

Kepala negara merupakan pemimpin dalam suatu negara, bukan sebagai pemimpin bagi seluruh umat Islam. Jadi kedudukan kepala negara bukanlah sebagai *khalifah al-'udhma* atau *imâmah al-'udhma* atau *wilayah al-'udhma*, melainkan hanya pemimpin atas satu kawasan atau wilayah tertentu. Disamping itu, kedudukan kepala negara dalam sistem paradigma baru yang dikenal dengan *trias politika*, hanyalah sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang selalu mendapat pengontrolan dan pengawasan dari lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, dan berada di bawah kekuasaan lembaga tertinggi negara (parlemen/MPR).

Dalam posisi seperti itu, seorang wanita dapat saja diangkat pada jabatan kepala negara, karena kedudukannya bukanlah sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu negara, apalagi pemimpin bagi seluruh umat Islam. Ia hanyalah sebagai seorang kepala pemerintahan yang bertugas menjalankan roda pemerintahan, sedangkan aspek-aspek kehidupan kenegaraan lainnya berada di bawah lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dengan demikian, tugas seorang kepala negara tidak lagi menjadi begitu berat, karena sudah ada pembagian wewenang dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Sehingga kendala kodrati kewanitaan yang menjadi hambatan baginya untuk menjadi kepala negara, tidak lagi menjadi hambatan utama. Melainkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologilah yang menjadi ham-

batan bagi seseorang (baik laki-laki maupun wanita) untuk diangkat menjadi kepala negara.

Pendapat Yang Kontra

Allah menentukan kaum laki-laki sebagai Imâm (Pemimpin) bagi Umat Islam, sebagaimana Imâm shalat adalah dari kaum lelaki. Kaum wanita tidak diperkenankan menjadi pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam (Khalifah) karena ada saat-saat mereka tidak dapat mengikuti shalat disebabkan haid atau lainnya. Aturan kepemimpinan Islam sama persis dengan aturan Imâmah Shalat.

Karena itu, sepanjang sejarah pun tidak ada Nabi perempuan, demikian pula dalam sistem kekhalifahan Islam sepanjang zaman, tak ada Khalifah seorang wanita kecuali dalam kerajaan Islam yang polanya mengalami penyimpangan. Ada pun Ratu Balqis memimpin negara di masa lalu terjadi sebelum menerima da'wah Sulaiman Alaihis Salâm. Siapa pun yang mengatakan bahwa seorang wanita boleh menjadi Khalifah atau presiden bagi rakyat muslim berarti pendusta yang tidak dapat dipegang omongannya.

Kaum wanita boleh menjadi Imam bila tidak ada lagi kaum pria di negerinya, atau menjadi imâm di hadapan kaumnya saja. Ini bukan menghinakan kaum wanita atau mengurangi peran wanita. Tetapi justru untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan bersama. Wanita boleh menjadi pemimpin apa saja; jadi direktur, kepala sekolah, menteri, kepala polisi, anggota parlemen, dan lain-lain, kecuali menjadi pemimpin negara dan

menjadi pemimpin rumah tangga. Inilah yang diajarkan Islam; dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini sehingga tidak memerlukan fatwa untuk memperjelas masalah ini.

Imam al-Syawkani dalam kitabnya "Nailul Authar" juz VIII halaman 265 menyatakan, bahwa kaum wanita tidak memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh menunjuk mereka sebagai pemimpin dalam suatu pemerintahan. Sementara itu, Ibnu Hazm, seorang ulama besar dari kalangan Madzhab Hambali dalam kitabnya "Al-Muhalla" Juz IX halaman 430 berpendapat bahwa jabatan yang tidak boleh diserahkan kepada kaum wanita, hanyalah jabatan sebagai Kepala negara (*ri'asah al-daulah / alwilayah al 'udzma*). Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang lain, boleh diserahkan kepada kaum wanita.

Bagaimana Pendapat Ulama modern Tentang Pemimpin Wanita: Suatu Analisis Akhir

Untuk mengetahui secara global bahwa ulama modern pun tetap menyepakati bahwa wanita tidak boleh jadi kepala negara, bisa disimak uraian Ulama Mesir, Salim Ali Al-Bahnasawi menjelaskan bahwa kepemimpinan umum tidak dibolehkan berada di tangan wanita. Semua ulama berpendapat demikian. Dengan kata lain bahwa wanita tidak dapat memegang imâmah kubra, yaitu tidak dapat menjadi khalifah umat Islam".

Salim mengemukakan: Di antara ulama modern ada yang berpandangan bahwa wanita mempunyai hak-hak politik sepenuhnya selain dari imâmah kubra atau pim-

pinan negara. Pendapat ini dianut oleh Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, Dr. Yusuf al-Qardhawi, Syeikh Mahmud Syaltout, dan Dr. Muhammad Yusuf Musa. Acuan yang mereka pakai adalah teks-teks umum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang menyamakan antara pria dan wanita dalam masalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebab pada dasarnya nash-nash ini berlaku dan tidak ditemukan nash khusus yang mengecualikannya, selain hak politik dalam imâmah kubra atau kepala negara dalam masyarakat modern.⁸¹

Para ulama fiqh, teologi, apalagi ulama Hadith dari dulu telah ijma' (sepakat) tentang tidak bolehnya wanita menduduki jabatan wilayah 'ammah, wilayah 'udhmâ, wilayah kubra, khilâfah, imâmah atau bahasa modernnya ri'asah daulah (kepala negara). Mereka membuat persyaratan-persyaratan, di antaranya adalah lelaki, tidak boleh wanita. Kemudian belakangan ada perdebatan tentang hak-hak wanita dalam bidang politik (misalnya jadi anggota parlemen), sebagian menolak, sebagian membolehkan, asal bukan menjadi kepala negara. Untuk mencari kebolehan (wanita jadi anggota parlemen) itu mereka beralasan, Nabi Muhammad menggunakan wanita untuk menjadi perawat dalam perang, dan 'Umar bin Khatab ketika jadi khalifah menugaskan Ummu Syifa' Al-Anshariyah menjadi *muhtasibah/mufattisyah* (pengawas/penggeledah) pasar. Berarti jabatan-jabatan khusus yang bisa dilakukan wanita boleh dijabat oleh wanita.

⁸¹ Salim Ali Al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cetakan Pertama, 1996), h. 294

Jika hal tersebut diterima sebagai hukum umum dalam konteks saat itu, dan diakui pula bahwa masyarakat selamanya akan mengalami perubahan dari zaman ke zaman, baik pihak laki-laki maupun wanita. Maka kepemimpinan pada masa perubahan sosial harus pula dipahami sebagai acuan kepada kondisi yang sangat khusus, yaitu kondisi perubahan sosial yang benar-benar fundamental. Karena kekhususan itu, maka pola kepemimpinan yang cocok pun memerlukan sejumlah kualifikasi tertentu yang lebih daripada tuntutan pola kepemimpinan dalam kondisi normal, demikian juga tentang kepemimpinan wanita akan mengalami distorsi yang perlu dipertimbangkan kualifikasi khusus.

Kepemimpinan umat Islam dewasa ini mengalami transformasi yang cukup signifikan, yaitu munculnya kecenderungan baru dalam hal basis otoritas pimpinan pada masa lalu. Kepemimpinan umat Islam mengisyaratkan adanya tiga kualitas utama yaitu: *akseptabilities*, *akountabilities* dan *kredibilities*. Pemilihan ketiga kualitas tersebut dalam keragaman praktiknya di lingkungan organisasi masyarakat dan kenegaraan ditentukan oleh otoritas dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama kemampuan siasat dan retorika. Sebagai akibatnya, tampak banyak pemimpin umat dari kalangan organisator-orator.

Sebagai basis otoritas kepemimpinan, kelemahan mengandung pengertian ahli dalam bidang ilmu-ilmu keislaman konvensional, terutama hukum Islam atau fiqh, sehingga konsep ulama lebih berkonotasi ahli fiqh (*fuqhâ'*). Sejalan dengan perkembangan proses sosial-politik dewasa ini, basis otoritas kepemimpinan mengalami pengertian ke arah corak kepemimpinan baru di kalangan umat Islam.

Corak kepemimpinan tersebut mengutamakan alur-alur pemikiran atau kerangka konseptual dalam pengembangan masyarakat (*community development*) dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks pembangunan masyarakat madani, kepribadian pemimpin juga menjadi ciri-ciri utama dalam otoritas kepemimpinan Islam, maka di sini umat Islam perlu menyadari eksistensi etika agama sebagai tolak ukur sosok pemimpin, bukan sosok laki-laki atau wanita untuk dapat membimbing manusia pada kesadaran akan adanya sifat-sifat Allah pada dirinya yang kreatif (*al-Khaliq*), mandiri (*al-Qiyâm binafsihi*), inovatif (*al-Mushawwir*), percaya diri (*al-Qahhâr*) dan lain sebagainya. Bila hal-hal yang disebutkan dijadikan sebagai acuan, maka isu gender dalam bidang kepemimpinan menjadi tak terfikir lagi, sebab kriteria seorang pemimpin yang dijadikan dasar pertimbangan dalam proses pengangkatan sebagai pemimpin adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinannya sejalan dengan tuntutan Islam, sebab hanya dengan jalan inilah harapan dan cita mewujudkan masyarakat dan negara yang dipimpin dalam konteks "masyarakat madani" tercapai. []

BAB V

PENUTUP

Persoalan kepemimpinan dalam konteks apapun telah menjadi suatu persoalan penting, dalam perspektif Islam kepemimpinan itu merupakan kelanjutan dari kenabian dalam arti bahwa Islam sebagai agama yang paling akhir dan untuk semua manusia dan *trans-generasi* memerlukan figur-figur yang dapat menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Nabi. Dalam perspektif sosiologis, Islam merupakan agama yang *humanisme theosentis*. Untuk itu sangat diperlukan kepemimpinan yang *humanis theosentris* pula. Kepemimpinan seperti itu tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhannya.

Seputar tanggung jawab seorang pemimpin juga telah menjadi suatu yang sangat dilematis, dikatakan demikian—banyak pemimpin yang tidak lagi mengedepankan nurani dalam melihat kebenaran, seorang pemimpin berupaya sekuat tenaga "bagaimana kedudukannya sebagai pemimpin senantiasa bertahan (tetap eksis) tidak diombang-ambing dan digeser oleh orang lain, kendati perjalanan kepemimpinannya telah bertentangan dengan nurani orang-orang yang dipimpin". Fenomena ini semakin mencuat dalam kehidupan umat, posisi pemimpin telah bergeser jauh dari

harapan orang-orang yang dipimpin, rakyat mengharapkan supaya kepemimpinan yang dijalankan itu sesuai dengan aspirasi mereka, dijalankan dengan penuh kebenaran, kebijaksanaan dan selalu dalam frame keadilan. Kenyataan yang diterima sangat kontradiktif. Akibatnya, tata nilai sosial masyarakat dalam konteks keberbangsaan dan kenegaraan semakin hancur dan amburadul, kesenjangan dan pertikaian politik antar sesama telah menjadi permasalahan tersendiri di lingkungan umat. Baik itu terjadi di negara Barat maupun di negara Islam sendiri.

Pergeseran tata sosial masyarakat dalam konteks keberbangsaan dan kenegaraan yang kian amburadul dan hancur, hal ini menandakan bahwa sistem kepemimpinan yang dijalankan tidak sesuai dengan rule dan tuntutan yang sebenarnya. Boleh jadi sistem kepemimpinan yang dijalankan sekarang adalah sistem kepemimpinan orang-orang sekular dengan konsep kekuasaan yang sangat variatif sebagaimana disebutkan dalam bab dua buku ini. Dan ternyata dalam aplikatifnya beberapa konsep tersebut nyaris tidak dapat membawa rakyat sebagai obyek yang dipimpin menuju sasaran dan tujuan akhir dalam konteks "perdamaian, keadilan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Berangkat dari suatu kenyataan tentang perjalanan kepemimpinan dewasa ini, hal yang sangat bijaksana jika kita kembali menilik konsep yang ditawarkan Islam, dan bila kita menganalisis secara mendalam ternyata banyak sekali perbedaan-perbedaan dengan konsep yang ditawarkan Barat, terutama konsep kekuasaan. Meski kepemimpinan sering dikonotasikan dengan kekuasaan, dan seorang pemimpin adalah penguasa dalam suatu lembaga atau institusi, tetapi dalam pandangan islam

sendiri kekuasaan kepemimpinan dapat saja diakui, namun kekuasaan bukan sasaran akhir bagi seorang pemimpin, Islam menghargai dan menerima kekuasaan sebagai salah satu hal penting bagi seorang pemimpin, melainkan kekuasaan tersebut menjadi penting diikuti dengan pengabdian kepada masyarakat atau komunitas, baik secara internal (sesama kaum muslimin) maupun secara eksternal (kafir zimni atau non-muslim yang mampu menciptakan kedamaian bersama ummat Islam).

Islam telah membangun fondasi kepemimpinan atas asas *amanah, keadilan, disiplin, dan musyawarah*. Maka pola kepemimpinan otoriter dan kebebasan bukan saja tidak sesuai dalam Islam, melainkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia sebagai makhluk berfikir, berkreasi dan bertanggung jawab dalam hidup dan kehidupan. Karena pemimpin merupakan khalifah Allah di muka bumi, yang harus mengemban misi Tuhan di dunia ini, yaitu membangun dan memakmurkan bumi sembari beribadah kepada-Nya.

Untuk tujuan tersebut, para pemikir Islam mengkaji secara komprehensif tentang sistem ideal kepemimpinan, mulai dari konsep kekuasaan, fungsi seorang pemimpin, bagaimana kriteria menjadi pemimpin, tanggung jawab seorang pemimpin, kaedah-kaedah pemilihan seorang pemimpin dan lain sebagainya, yang semuanya mengacu kepada landasan al-Qur'ân dan hadith Nabi. Begitu halnya permasalahan kedudukan wanita sebagai pemimpin. Terkait dengan ini telah banyak pendapat baik yang pro maupun yang kontra tentang pengangkatan wanita sebagai pemimpin. Kesemua pendapat tersebut tetap mengacu pada dalilnya masing-masing.

Tetapi hal yang paling ideal diperhatikan tentang itu, bahwa masyarakat selamanya akan mengalami perubahan dari zaman ke zaman, baik pihak laki-laki maupun wanita. Maka kepemimpinan pada masa perubahan sosial harus pula dipahami sebagai acuan kepada kondisi yang sangat khusus, yaitu kondisi perubahan sosial yang benar-benar fundamental. Karena kekhususan itu, maka pola kepemimpinan yang cocok pun memerlukan sejumlah kualifikasi tertentu yang lebih daripada tuntutan pola kepemimpinan dalam kondisi normal, demikian juga tentang kepemimpinan wanita akan mengalami distorsi yang perlu dipertimbangkan kualifikasi khusus. Untuk itu, uraian bab V buku ini pada paragraf terakhir telah menempatkan persepsi tersendiri tentang itu, di mana kepemimpinan umat Islam mengisyaratkan adanya tiga kualitas utama yaitu: *akseptabilities*, *akountabilities* dan *kredibilities*. []

DAFTAR BACAAN

- A. Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan Ketiga, 1994).
- A.M. Kadarman SJ dkk., *Pengantar Ilmu Manajemen-Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketiga, 1993).
- Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ababil, cetakan I, 1996).
- Abu Ridha, *Ummah dan Perubahan Tata Sosial Politik, Al-muslimun* (Majalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam), nomor 328, April 1997.
- Abul A'la Al-Maudûdî, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Hukum dan Konstitusi Politik, pen. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, Cetakan VI, 1998).
- Afzal Iqbal, *Diplomacy In Early Islam*, Qaumi Press, Lower Mall, Lahore, India, (terjemahan: Diplomasi Islam), pen. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cetakan-Pertama, 2000).
- Agustiono, *Konsep Al-Qur'an Tentang Pimpinan Politik*, *Harian Waspada*, 6 Juni, 1999.
- Ahmad Husnan, *Keadilan Hukum Islam Antara Wanita dan Laki-Laki*, (Solo: al-Husna, 1995).
- Ali Abdul Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, cetakan I, 1985).

- Alwahidi Ilyas, *Umat Islam Di Tengah Pergumulan Dunia Modern*, Sinar Darussalam (Medium Pengetahuan dan Kebudayaan), Nomor 225, 2001.
- Bustanuddin Agus, *Al-Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan Pertama, 1993).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ketiga, edisi II, 1994).
- EK. Imam Munawwir, *Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam*, (Surabaya, Usaha Nasional, t.t).
- Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, cetakan IV, 2000).
- Gary A. Yukl, *Leadership in Organizations*, terj. Kepemimpinan Dalam Organisasi, (Jakarta: Prenhallindo, 1998).
- Harry Hamersma, *Tokoh-tokoh Filsafat Modern*, (Jakarta: Gramedia, cet-IV, 1986).
- Hartono A. Jaiz, *Polemik Presiden Wanita dalam Tinjauan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).
- Hibbah Rauf Izzat, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi, Ru'yah Islamiyah*, terj. "Wanita dan Politik Pandangan Islam" (Bandung: Mizan, Cetakan pertama, 1997).
- Ibnu Musthafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, (Bandung: Al-Bayan, cetakan VI, 1993).
- Ibnu Syamsi, SU, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Ketiga, 1994).
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'ân*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan Kedua, 1996).

- John L. Esposito, *Islam Development and sociopolitical change*, terj. Identitas Islam Pada Perubahan social-politik, (Jakarta, Bulan Bintang, cetakan Pertama, 1986).
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan—Apakah Pemimpinan Abnormal itu?*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedelapan, 1998).
- Kranenburg dan Tk. B. Sabaruddin, *Ilmu Negara Umum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1986).
- M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2000).
- Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan I, 1996).
- Maryam Jameelah, *Islam and Modernism*, yang diterjemahkan "Islam Dan Modernisme", Usaha Nasional, Surabaya, t.t.
- Mazhar ul-Haq Khan, *Social Pathology of the Muslim society*, terj. Wanita Korban Patologi Sosial, (Bandung: Pustaka, Cet. I, 1994).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia, Edisi ke-18, 1997). Dalam Tim Penerbit Buku, 75 Tahun Prof. Miriam Budiardjo, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, (Bandung: Mizan, Cet. Pertama, 1998).
- Muhammad Dhiya'uddin Al-Rayis, *An-Nazhariyat al-Siyasah al-Islamiyah*, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, 1976.

- Muhammad Faiz Al-Math, *Min mu'jizat Al-Islam*, Darul Basyir, Beirut, Cet-I, 1990 M. terjemahan: keistimewaan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, cetakan kedua, 1995).
- Muhammad Husein Haikal *Al-Faruq Umar*, dalam Salim Ali Al-Bahsanawi, *Asy-Syari'ah Al-Muftara 'Alaiha*, Dar Al-Wafa' Al-Manshurah, Mesir, Cet-Pertama, 1995, (terjemahan: Wawasan Sistem Politik Islam), pen. Mustolah Maufur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet-Pertama, 1996).
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum – Studi Studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan Pertama, 1992).
- Musdah Mulia, *Negara Islam—Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, Cetakan I, 2001).
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius—Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, Cetakan II, 2000).
- Rafi Munawwir, *Sukses Dalam Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi*, Al-Muslimun (Majalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam), Nomor: 306, September 1995.
- Sa'adi Abu Habieb, *Mausû'atu al-Ijma'*, Terj. K.H.M. Ahmad Sahal Machfudz dan K.H.A. Mustafa Bisri, Kata Pengantar. Abdurrahman Wahid, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cetakan II, 1997).
- Salim Ali Al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cetakan Pertama, 1996).

- Salim Azzam, *Concept of Islamic State*, terj. Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam, pen. Malikul Awwal, dkk., (Bandung, Mizan, Cetakan II, 1990).
- Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr, *Introduction to Islamic System*, (Sistem Politik Islam—Sebuah Pengantar), (Jakarta: Lentera Basritama, cetakan pertama, 2001).
- Sayyid Abul A'la Al-Maudûdi, *The Islamic Law and constitution*, (Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam), (Bandung: Mizan, cetakan pertama, 1990).
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1986).
- Taufiq Asy-Syaw, *Fuqhusy-Syuura wal Istisyarat*, (Syuura Bukan Demokrasi), (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan Pertama, 1997).
- Yusuf Al-Qardhaw, *Min Fiqhid-Daulah Fil Islam*, Darusy-Syuruq, Cet-I, Cairo, 1997, (terjemahan: Fiqh Daulah Dalam Persepektif Al-Qur'an dan As-Sunnah), pen. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet-Keempat, 1999).

DAFTAR INDEKS

- A. M. Kadarman SJ, 23
 Abbasiyah, 60
 Abu Bakar, 51, 92
 Abu Dzar Al- Ghifari, 55
 Abu Hudzaifah, 92
 Abu Ubaidah bin Al –
 Jarrah, 92
 Abul A'la Al-Maududi, 74,
 109, 110
 Aimmah, 6
 Akountabilities, 117, 119
 Aksetabilities, 117, 119
 al - Baidhawii, 111
 al - Khaliq, 120
 al -qadhar ,120
 al - Ra'yu, 55
 al - Syawhani 117
 al - Ahkam ash shul 55
 al - Hijrah wa Al- Harakah,
 75
 al - Ma'shum, 56
 al - Mawardy, 55
 al - Mushawwir, 120
 al - Qiyam binafsih, 120
 al - shadiqin, 33
 al - ahliyah, 110
 al - amanah, 42, 69
 al -Hikmah al- ilahiyyah, 32
 Almani, 7
 Amanah , 1
 Amir, 45, 46
 Antroposentris, 41
 Augustinus, 15
 Autos, 25
 Azyumardi Azra, 65, 111
 Bai'at, 52
 Bani Umayyah, 60
 Bustanuddin Agus, 60
 Community Development,
 120
 Coons 12
 Dairah dawlah, 75
 Dairah hadrah, 75
 Dairah insaniah, 75
 Daniel Crecelius, 7
 Democratic, 23
 Dhiya'uddin Al-Rayis, 60
 Direct, 15
 Disyr bin Saad, 92
 Egailiter, 8
 Ekspansi, 52
 Fabermundi, 41, 42
 Fathanah, 1, 42, 70

- Frame, 4
 Free rein, 23, 24, 26
 Fugaha ,116, 118
 Gary A. Yukl, 3, 11, 12
 Genderisme, 107
 Georg Jellinek, 16, 17, 18,
 19
 Hanif, 37
 Hemhills, 12
 Hudan, 3
 Hujjah, 62
 Hujjah sya'riyyah, 56
 Human Relations, 11
 humanis theosentris, 1
 Humanisme theosentis, 1, 121
 Ibnu Hazm, 117
 Ibnu Musthafa ,108
 Ibnu Syamsi SU 22, 23
 Ibnu Syamsi, SU, 22, 23
 Ibnu Taimiyyah, 53
 Ijma, 118
 Imam, 116
 Imam Munawwir, 38, 51
 Imamah, 66, 91, 92, 117,
 118
 Imamah Al-Udhma, 115
 Imamah kubra, 118
 Imarah, 6
 Indirect, 15
 J.J. Rousseau, 20
 Jabir bin Abdillah ra, 46
 Jackques, 12
 Jacobs, 12
 Jahiliyah, 48, 114
 Jean Bodin, 16, 17, 18
 jihad fisabilillah, 53
 Johannes Althusius, 20
 John Locke, 20
 Jumhur ulama, 111, 114
 K. F. Janda, 11
 K. H. Abdurrahman Wahid,
 111
 Ka'ab bin Ajrah, 46
 Kaffah, 51, 76, 78
 Kafir zimni, 21, 61
 Kartini Kartono, 23
 Kayid Yusuf Mahmud
 Qar'usy, 63
 Kedaulatan Negara, 16
 Khalifah, 89, 90, 92, 93, 99,
 116,
 Khalifah Al - Udhma, 115
 Khalqiyah, 100
 Kharismatis, 23
 Khilafah, 118
 Khulafa Al-Rasyidin, 51, 93
 Khulqiyah, 100
 Kootz, 23
 Krabbe, 17, 19, 20

- Kratos, 25
 Kredibilities, 117, 119
 Laissez Faire 24, 25
 Leadership, 38
 Leo Tolstoy, 44
 Leon Duguit, 17, 19
 Lord Acton, 82
- Machasin, 41
 Madinah Al-Munawwarah,
 8
 Madinah Charter, 8
 Mahiyah, 2
 Mahmud Syeik Khaththab,
 45
 Man made, 7
 Marsilius, 15
 Masyarakat madani, 120
 Maternalistis, 23
 Mautu'atua Al - Ijma, 111
 Militeristis, 23
 Money politic, 39
 Mufattisyah. 118
 Muffasir Sunni, 33
 Muhammad Al-Ghazali, 111,
 114, 115
 Muhammad al-Mubarak,
 114
 Muhammad Faiz Al-Math,
 59, 60
 Muhammad Husein
- Haikal, 52
 Muhammad Iqbal, 110
 Muhammad Maghfur
 Wachid, 7
 Muhtasibah, 118
 Mustafa As- Sibai, 114
 Mustakhlif, 40
- Nailul authar, 117
 Negara Islam, 6
 Nepotisme, 38
 Nurcholish Madjid, 108
- O' Donnell, 23
 Otokratik 23, 24, 25
 Overly protective, 24
- Paternalistis, 23
 Plato, 14
 Power, 15
- Qadisiyah, 54
 Qudwah, 58
- Ra'in, 8
 Ra'iyah, 8
 Rafi Munawwir, 56
 Ratu Balqis, 116
 Ri'ayah, 6

- S. H. Nasr, 50
 Sa'ad bin Abi Waqash, 54
 Saadi Abu Habieb, 111
 Said Aqiel Sirady, 111
 Sakinah, 84
 Salim, 92
 Salim Al-Bahnasawi, 52,
 117
 Salim Azzam, 7, 63
 Sayid Muhammad Bagir
 ash-Shadr, 83
 Shiddiq, 1, 69
 Sibghah, 38
 Soehino, 13, 14
 Sovereignty, 6
 Stogdill, 11
 Struycken, 19
 Suhair Luthfi, 111
 Syaikh Abdurrauf As -
 Singkili, 113, 115
 Syaikh Muhammad
 Khadhiri, 63
 Syari'ah, 7
 Syekh Muhammad
 Abduh, 81
 Syi'ah, 33
 Syura, 52, 63, 92
- Tabligh, 1, 69
 tagrir al-Ma'shum, 56
 Tawazun, 57
- Teokrasi, 16
 Teologis, 2
 Thomas Aquinas, 15
 Trait approach, 22
 Transgenerasi, 1, 121
 Trias politika, 115
- Udhma, 118
 Uli al- Amri, 33, 96
 Umar bin Khatab, 52, 58,
 92
 Umara, 79
 Usaid bin Hudha, 92
 Usman bin Affan, 5
- Viatormundi, 41, 42
- Wala', 57
 Waliy, 6
 Wasiqah Madinah, 8
 Weihrich, 23
 Wijhah, 38
 Wilayah al-udhma, 115
- Zakat, 53
 Zuhud, 67

TENTANG PENULIS



M. Nasir Budiman

Lahir di Keude Linteung/Aceh Barat, 2 Januari 1957, berprofesi sebagai dosen PPs dan Dosen Fak. Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Setelah menyelesaikan Sarjana Lengkap Bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah tahun 1983 Nasir melanjutkan studinya ke Program Magister S2 di IAIN

Sunan Kalijaga selesai 1990. Selanjutnya pada tahun 1996 meraih gelar Doktor pada PPs yang sama. Di samping menjadi staf pengajar pada PPs dan Fakultas Tarbiyah, Nasir juga aktif di bidang penulisan ilmiah dan seminar, baik lokal maupun nasional. Karya tulisnya banyak dipublikasikan di beberapa media di antaranya: Membangun Perkembangan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Jurnal Sinar Darussalam), Ulama Dayah Dalam Perspektif Santri (Penelitian), Jurusan Kependidikan Islam: Prospek Pada Afta 2003 (Jurnal Didaktika), Pemberdayaan Kurikulum LPTK (Jurnal Syntesa), Pengembangan Sistem Pendidikan Islam Dalam Konteks Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Jurnal Islam Futura). Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Madani Press, Jakarta) 2001.

Alwahidi Ilyas



Lahir di Gugop/Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, 4 Agustus 1974. Menyelesaikan Sarjana Lengkap S1 Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 1998 Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan, sekarang sedang menyelesaikan Program

Magister di PPs IAIN Ar-Raniry Banda Aceh jurusan Pendidikan Islam, di samping aktif kuliah juga aktif dalam penulisan karya ilmiah, di antaranya: Kesiapan Fakultas Dakwah Menghadapi Millenium Ketiga (Jurnal Al-Bayan), Umat Islam Di Tengah Pergumulan Dunia Modern (Sinar Darussalam). Manajemen Dakwah Kajian Menurut Perspektif Al-Qur'an, Pustaka Pelajar, 2001. Di samping itu juga salah seorang penulis buku: Dakwah Tekstual dan Kontekstual (Peran dan Fungsinya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat), Pustaka Pelajar, 2001. []